PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

2014-2019

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENDIDIKAN

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Hasil Workshop Regional Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 Tanggal 12 Februari 2014, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 serta arahan Gubernur untuk memperhatikan aspek keberlangsungan, efisiensi dan optimalisasi program pembangunan Provinsi Riau khususnya bidang pendidikan.

Selanjutnya, dilakukan upaya pemantapan nilai-nilai budaya Melayu dan agama tersebut menjadi refensi etika, orientasi, dan sumber inpirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, penyelenggaraan pembangunan, pelestarian lingkungan, asimilasi kultural, menjaga dan memelihara heteroginitas. Rencana Strategis Revisi Dinas Pendidikan Tahun 2014—2019 dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pendidikan dan kebudayaan di Provinsi dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan, serta denganmempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan hingga saat ini. Pengintegrasian kebudayaan dalam pendidikan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau No.66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tuga dan Fungsi, Serta Tatakerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2014—2019 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai pada periode 2014 - 2019, serta merupakan dasar dan acuan bagi bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan SKPD di kabupaten/kota untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana

Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan; (4)Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU



RUDYANTO, SH, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19680312 199403 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I **PENDAHULUAN** 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pokok ... 7

2.1.1 Tugas Pokok 7

2.1.2 Fungsi 7

2.1.3 Susunan Organisasi 8

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan 14

2.2.1 Sumber daya Manusia 14

2.2.2 Sarana dan Prasarana 16

2.3 Kinerja Pendidikan Pendidikan 16

2.3.1 Pendidikan Menengah 16

2.3.2 Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 18

2.3.3 Tata Kelola 19

2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Layanan Perangkat Daerah 21

2.4.1 Ekonomi 21

2.4.2 Teknologi 22

2.4.3 Politik, Pertahanan dan Keamanan 23

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** 24

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 24

3.1.1 Permasalahan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas..... 25

3.1.2 Permasalahan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah..... 26

3.1.3 Permasalahan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 27
3.1.4 Permasalahan Manajemen/ Tata Kelola Layanan Pendidikan .. 28
3.2 Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 29
3.2.1 Telaah Program Unggulan 30
3.3 Telaah Rencana Strategis K/L dan Restra Kementrian Pendidikan Nasional 32
3.3.1 Telaah Visi dan Misi 32
3.3.2 Tujuan Strategis 33
3.3.3 Sasaran Strategis 33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 43
3.5.1 Pemerataan dan Akses Pendidikan 44
3.5.2 Mutu, Kesesuaian dan daya saing Pendidikan 44
3.5.3 Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik terhadap Pendidikan serta Efesiensi Pembiayaan 45

BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 47
4.1.1 Tujuan dan Sasaran 47
4.1.2 Sasaran jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Riau 47
4.1.3 Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidikan 49
4.1.4 Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan tenaga Kependidikan (LPTK) dan Lulusannya 50
4.1.5 Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 50
4.1.6 Penerapan Pendidikan Akhlak Muliadan Karakter Bangsa 51
4.1.7 Pengembangan Pendidikan yang membangun Manusia Yang berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha 51
4.1.8 Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi 52
4.1.9 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 53
4.1.10 Penguatan dan perluasan Pemanfaatan TIK 53
4.1.11 Koordinasi Antara Dinas Kab/Kota 54
4.1.12 Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah 3T 55

4.1.13 Penyelarasan Pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha
Dan Dunia Industri..... 55

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan 57
5.2 Strategi 58
5.2.1 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T1..... 58
5.2.2 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T2..... 59
5.2.3 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T3 59
5.2.4 Strategi Umum..... 60
5.2.5 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Tahun 2014-2019... 61
5.2.6 Koordinasi, Tata Kelola dan Pengawasan Internal 63
5.2.7 Sistem pemantauan dan Evaluasi 64
5.2.8 Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu 66

BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 68**

BAB VII **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah..... 86
7.2 Tujuan dan Sasaran 86
7.3 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Riau 86
7.4 Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik..... 88
7.5 Peningkatan Mutu Lembaga Pendidik Tenaga Pendidik..... 89
7.6 Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 89
7.7 Penerapan Pendidikan Ahlak Mulia dan Karakter Bangsa 90
7.8 Pengembangan Pendidikan yang Mengembangkan
Manusia yang berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif 91
7.9 Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi 91
7.10 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana
Pendidikan sesuai dengan standar Nasional Pendidikan..... 92
7.11 Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK 92

BAB VII **PENUTUP** 96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara lebih tehgas pada Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya.

Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang turunannya, diamanatkan terjaminnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan guna menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal nasional, global.

Percepatan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kreasi teknologi dalam berbagai bidang mengakibatkan perubahan besar pada tatanan berbagai aspek kehidupan.Terjadinya revolusi digital membawa dampak yang luas pada berlangsungnya perubahan dalam aktivitas ekonomi,pola hubungan pada berbagai aspek kehidupan antar individu, antar kelompok masyarakat, bahkan antar bangsa dan negara. Kecenderungan global yang membawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan, berimplikasi pada kepentingan untuk merancang strategi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidkan.

Pembangunan bidang pendidikan menjadi suatu keniscayaan dalam menghadapi kecepatan gelombang perubahan dan akan terus berlanjut pada masa-masa berikutnya.Terkait dengan hal tersebut ditingkat dunia diamanatkan berbagai program pendidikan diantaranya : dasawarsa pendidikan untuk semua (education for all), Literasi dunia (The world Literacy), pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan (education for sustainability development). Perubahan yang berlansung juga menumbuhkan

kecenderungan semakin pentingnya pendidikan selama hayat (Lifelong Learning), pendidikan lebih diorientasikan pada pengembangan kompetensi, bergesernya pengajaran kearah pembelajaran (student centered learning) dan pentingnya pengembangan alternatif-alternatif kecerdasan yang bersifat majemuk dalam pelaksanaan pendidikan.

Pada tataran nasional, Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Pendidikan tertuang dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) Tahun 2005-2025, dalam rencana tersebut dikembangkan empat tema pembangunan pendidikan sebagai kerangka pentahapannya, yaitu :

- Tema pembangunan pendidikan I pada tahun 2005-2009, fokusnya peningkatan kapasitas dan modernisasi.
- Tema pembangunan pendidikan II pada tahun 2010-2015, fokusnya adalah penguatan pelayanan.
- Tema pembangunan pendidikan III pada tahun 2015-2020, fokusnya adalah penguatan daya saing regional
- Tema pembangunan pendidikan IV pada tahun 2020-2025, fokusnya adalah penguatan daya saing Internasional.

Pembabakan dan tema pembangunan pendidikan yang dijabarkan dalam RPPNJP tersebut dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025,Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan perkembangan kondisi yang terjadi di masa mendatang, terutama berkenaan dengan pergantian kepemimipinan nasional yang berlangsung pada tahun 2014, perlu dijadikan pertimbangan dan bahan masukan untuk menyusun rencana strategis pembangunan pendidikan tahun 2014-2019.

Namun sejalan dengan pengalihan urusan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan efektif pada Bulan Januari Tahun 2017 serta Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) yang sebelumnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, maka diperlukan kembali penyesuaian nama dari OPD tersebut kedalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2014-2019 ini merupakan Perubahan dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah disusun dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 02 Tanggal 02 Januari .Perubahan renstra ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan,antara lain :

1. Revisi penyusunan RPJMD lama yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2014
2. Adanya Indikator Kinerja yang perlu penyelarasan lebih lanjut.
3. Keperluan penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Perubahan Renstra OPD Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ini merupakan penjabaran Visi,Misi dan Program Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang akan dilaksanakan dalam sisa periode 2 tahun terakhir yaitu 2017-2019. Perubahan Renstra ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019, dengan memperhatikan Sumber Daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Mengingat peran dan fungsi Renstra OPD Provinsi Riau sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra OPD Dinas Pendidikan Provinsi Riau dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Proivinsi Riau.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daaerah Swantantra Tk.I Sumateta Barta, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1014, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang0Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomoe 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 12);

1.3. Maksud dan Tujuan

Peubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap strategi, kebijakan, program pembangunan pendidikan. Didalamnya dilengkapi dengan rencana pembangunan tahunan dengan memuat perkiraan target-target pencapaian Kinerja Tahunan.

Adapun tujuan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau ahun 2014-2019 :

1. Sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam menyusun Renstra Sekolah 2014-2019
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan renja,RKA,RKT antara 2014-2019
3. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan antara tahun 2014-2019
4. Sebagai instrument untuk memudahkan seluruh stakeholder pendidikan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional

3.4. Telaahan Rencana Tataruang Wilayah dan Kajian Lengkungan Hidup Strategis(KLHS)

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan

4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V Strategi dan arah kebijakan

BAB VI Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pendidikan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keraja Dinas Pendidikan Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH POKOK

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;

b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan sekolah Menengah atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menegah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menegah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;

d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menegah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menegah Kejuruan, Bidang

Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan ;

e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

2.1.3.1. Dinas Pendidikan terdiri dari :

a. Kepala Dinas Pendidikan;

b. Sekretariat, terdiri atas :
   1. Subbagian Perencanaan Program
   2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik daerah; dan
   3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas :
   1. Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik Sekolah Menegah atas;
   2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menegah atas;
   3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menegah Kejuruan, terdiri atas :
   1. Seksi Pembelajaran dan Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan;
   2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menegah Kejuruan; dan
   3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan.

e. Bidang Pendidikan Khusus dan layanan Khusus, terdiri atas :
   1. Seksi Pembelajaran dan Peserta didik Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
   2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; dan

3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

f. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan
   1. Seksi Pengolahan Data;
   2. Seksi Pengembangan Kebijakan Pendidikan;dan
   3. Seksi Tugas Pembantuan,Fasilitasi dan Kerjasama Pendidikan

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menegnah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
2) Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah, Bidang Pembinaan Sekolah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Sekolah Menegah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
4) Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keungan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas,sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program kerja dan rencana kerja operasional pada Sekretariat;
2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
3) Penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu:

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik Sekolah Menengah Atas, Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah;

2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

3) Penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

a. Kepala Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik Sekolah Menengah Atas

b. Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas

c. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukankoordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan, Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana Sekolah Mengangah Kejuruan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Sekolah Kejuruan;

2) Penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Kejuruan;

3) Penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas pendidikan; dan

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

a. Kepala Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan;
b. Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
c. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan.

5. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)

Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khuus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus (PK-PLK) dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

a. Kepala Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

b. Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penddidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

c. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

6. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan

Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengolahan Data Pendidikan, Seksi Pengembangan Kebijakan Pendidikan, Seksi Tugas Pembantuan, Fasilitasi dan Kerjasama Pendidikan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

1) Penyususnan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;

2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;

3) Penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

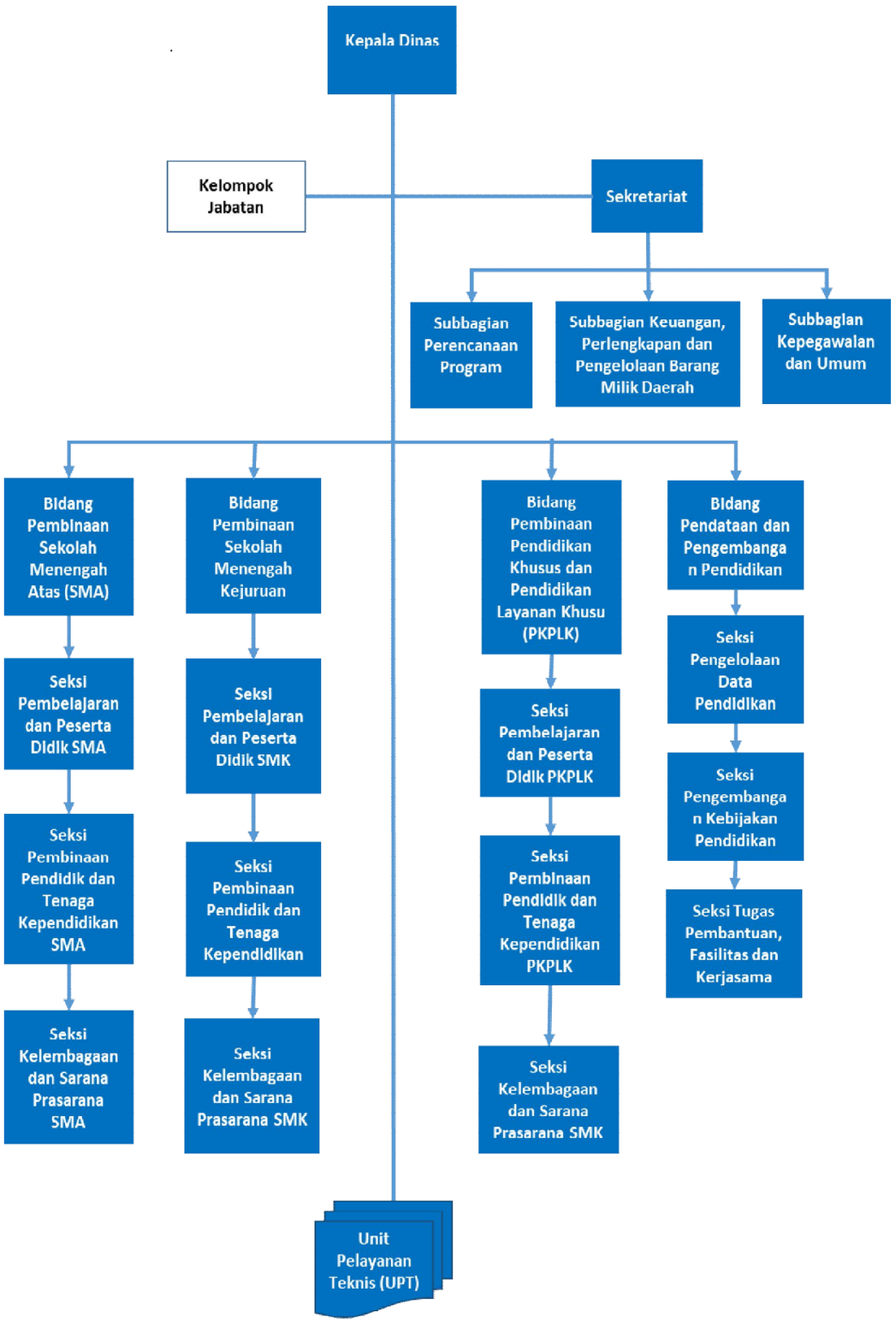
Untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

a. Kepala Seksi Pengolahan Data Pendidikan

b. Kepala Seksi Pengembangan Kebijakan Pendidikan

c. Kepala Seksi Tugas Pembantuan, Fasilitasi dan Kerjasama Pendidikan

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pendidikan

2.2.1 Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia merupakan modal yang paling berharga serta merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi.

Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada. Sumber daya manusia/personil di Dinas Pendidikan terdiri dari 8.363 pegawai termasuk guru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Kondisi Sumber daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin(Tahun 2017)

NO	UNIT KERJA	LAKI – LAKI	PEREMPUAN
1	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	**143**	**109**
JUMLAH		**143**	**109**

(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Tabel 2.2. Klasifikasi Pegawai menurut Eselon
(Tahun 2017)

NO	JENIS KELAMIN	ESELON				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	1	4	10	**15**
2	Perempuan	-	-	1	5	**6**
JUMLAH		**-**	**1**	**5**	**15**	**21**

(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Tabel 2.3. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan
(Tahun 2017)

NO	PANGKAT/GOL. RUANG	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Jabatan Struktural	-		5	16
2	Jabatan Fungsional Tertentu	23	104	4.476	2.548
3	Pelaksana	0	337	756	33
JUMLAH		**23**	**441**	**5.245**	**2.589**

(sumber data : DinasPendidikanProvinsi Riau)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Saat ini kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau terletak di Jalan Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru. Selain itu Dinas Pendidikan juga memiliki beberapa gedung yang diperuntukkan bagi kantor Unit Pelaksana Teknis, antara lain adalah kantor UPT Balai Pengembangan Teknologi dan Komunikasi Pendidikan, UPT Pusat Pelayanan Autis dan UPT Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan. Sarana dan prasarana yang dimiliki baik di kantor pusat maupun di UPT sudah sangat memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Bidang-bidang yang ada dalam struktur organisasi dan tata kerja.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Rangka mempercepat usaha pembangunan, Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Pendidikan telah melakukan tindakan-tindakan maksimal untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain. Dimulai dengan penyediaan sarana infrastruktur pendidikan, keteresdiaan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, serta program-program pendukung lainnya.

2.3.1 Pendidikan Menengah

2.3.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian kinerja pendidikan menengah Provinsi Riau periode Tahun 2017–2019 sebagaimana tergambar dalam tabel 2.5 tersebut diatas, APK mengalami penurunan dari 78,30% pada tahun 2016 menjadi 76,16% pada tahun 2017.Pada periode yang sama, angka partisipasi Kasar pendidikan jenjang menengah tersebut juga diikuti dengan penurunan Angka Partisipasi Murni yaitu pada Tahun 2016 sebesar

2.3.1.2 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah Menengah Provinsi Riau dari Tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami naik turun, di tahun 2016 peserta didik SMA/ MA/ SMK/ SMALB putus sekolah adalah sebesar 0,34%, mengalami peningkatan di Tahun

2016 dan Tahun 2017 masing-masing menjadi 0,96% dan 1,59% dan di Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,63%.

2.3.1.3 Persentase Kelulusan

Peserta didik SMA/MA yang lulus ditahun 2016 sebear 99,04%, mengalami kenaikan menjadi 99,75% ditahun 2017, sedangkan persentase kelulusan peserta didik SMK Tahun 2016 mencapai 99,77% dan naik menjadi 99,89% di tahun 2017.

2.3.1.4 Hasil Ujian Nasional

Capaian Ujian Nasional SMA/MA tahun 2014 sebagaimana ditujukan pada Tabel 2.5 tersebut diatas, Rata-rata capaian UN SMA/MA adalah 6,21 mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 64,95 dan kembali turun di tahun 2016 menjadi 55,56%. Walaupun demikian nilai rata-rata UN Provinsi Riau masih berada diatas nilai rata-rata UN Nasional.

2.3.1.5 Persentase Capaian SPM

Persentase capaian SPM SMA/MA sederajat tahun 2016 mencapai 78,88%, di Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 83,13%, sedangkan capai stantar pelayanan minimal SMK di tahun 2015 adalah sebesar 64,68%

2.3.1.6 Akreditasi Sekolah Menengah

Data dalam Neraca pendidikan, tahun 2015 dari 411 SMA yang terakreditasi 37,2% sekolah terakreditasi dengan nilai A, 29,7% nilai B, 12,4% nilai C dan 20,7% belum terakreditasi. Di Tahun 2016 dari 420 SMA terakreditasi dengan A mengalami penurunan menjadi 28,3%, nilai B menjadi 26,8%, nilai C 10,2% dan SMA yang belum terakreditasi mengalami peningkatan dan 20,7% di tahun 2015 menjadi 34,9% di tahun 2016. Untuk SMK dari 260 sekolah yang terakreditasi di tahun 2015,sebesar 25% terakreditasi dengan nilai A, 16,9% nilai B, 4,9% nilai C dan 51,2% belum terakreditasi. Di Tahun 2016 mengalami peningkatan yangsignifikan, SMK terakreditasi dengan nilai A meningkat menjadi 60,8%, nilai B 34,0% dan nilai C 5,3% serta tidak ada lagi SMK yang tidak terakreditasi.

2.3.1.7 Kualifikasi Pendidik

Kualifikasi Guru SM sangat penting dalam menghasilkan lulusan yang bemutu dan kompeten. Kualifikasi guru SM di Provinsi Riau cukup memuaskan, dan mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun ketahun. Sebagaimana digambakan pada tabel 2.5 tersebut diatas, Tahun 2015 persentase guru SMA/ SMK/ SLB adalah sebesar 92,64%, mengalami peningkatan di Tahun 2016 sebesar 96,2%.

2.3.2 Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Jenis layanan dari Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-PLK) ada 3 yaitu: 1) Pendidikan Inklusif yaitu layanan pendidikan sekolah biasa atau sekolah umum yang mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus dan sekolah luar biasa (SLB) atau sekolah khusus yang mengakomodasi anak biasa; 2) Pendidikan Khusus yaitu layanan pendidikan bagi anak anak cacat (TKLB, SDLB, SMPLB, SMLB) dan bagi anak berkecerdasan Istimewa antara lain program akselerasi dan program bagi anak berbakat istimewa; 3) Pendidikan Layanan Khusus (PLK) adalah pendidikan bagipeserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu darisegi ekonomi. Capaian kinerja dari PK –PLK, khususnya Pendidikan Luar Biasa (PLB) tergambar dalam tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6

Capaian Pendidikan Khusus (PLB) Tahun 2016—2019

MDIKBUDNo	Komponen	2016	2017	2018	2019
A.	Gambaran Umum				
1.	Jumlah Sekolah	18	31	37	38
2.	Jumlah Siswa Baru	227	239	408	497
3.	Jumlah Siswa	833	1.468	1.787	2.218
4	Jumlah Kelas	269	260	496	604
5.	Kondisi Ruang Kelas	-	145	296	313
	- Baik	-	-	-	293
	- Rusak Ringan	-	-	-	19
	- Rusak Berat	-	-	-	1
6.	Jumlah Guru	114	192	228	220

7.	Jumlah Lulusan	105	84	129	157
B.	Rasio Pendidikan				
1.	Siswa per Sekolah	-	-	-	50:1
2.	Siswa per Kelas	-	-	-	3:1
3.	Siswa per Guru	-	-	-	7:1
4.	Kelas per Sekolah	-	-	-	16,78:1
5.	Kelas per Ruang Kelas Milik	-	-	-	-
6.	Kelas per Guru	-	-	-	2,36:1
7.	Guru per Sekolah	-	-	-	7:1

Sumber: Kemendikbud.go.id diolah

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa jumlah sekolah, siswa, kelas, ruang kelas, guru dan jumlah lulusan dari tahun 2016 – 2017 mengalami perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data statistik Kemendikbud jumlah siswa Tahun 2016 sebanyak 2.268 orang terdiri dari siswa SDLB sebanyak 1.480 orang atau sekitar 81.53%, 477 orang merupakan siswa SMPLB dan 301 orang adalah siswa SMLB. Sedangkan jumlah lulusan sebanyak 157 orang di Tahun 2016 terdiri dari 128 siswa SDLB, 21 siswa SMPLB dan 8 siswa SMLB.

2.3.3 Tata Kelola

Penguatan tata kelola di tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, telah disusunPP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya pengembangan sistem tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1990-an melalui pembiayaan berbasis kompetisi. Seiring dengan meningkatnya komitmen dari semua pihak untuk mendanai

pendidikan, sejaktahun 2009 anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD seperti yang diamanatkan UUD1945 telah terpenuhi. Dengan dipenuhinya komitmen tersebut, anggaran pendidikan dalam APBD meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Di samping itu, kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pendanaan pendidikan juga terus mengalami perkembangan.

Untuk memperjelas peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan telah disusun PP Nomor48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pada tahun 2010 dana BOS dikelola oleh Pusat dan penyalurannya dilakukan melalui Tim BOS setiap provinsi yang mentransfer dana BOS langsung ke sekolah dalam bentuk *blockgrant* dan dikelola dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pada tahun 2011, mekanisme penyaluran dana BOS dilakukan melalui Transfer Daerah ke Kabupaten/Kota (masuk Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota) yang kemudian hanya dapat disalurkan langsung ke sekolah swasta. Untuk sekolah negeri penyalurannya harus melalui dinas pendidikan dan mengikuti tata cara pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2017, mekanisme penyaluran diperbaiki, yakni melalui transfer daerah ke provinsi (masuk kas umum daerah provinsi) yang kemudian dapat disalurkan ke sekolah dalam bentuk hibah. Di samping itu, unit *cost* BOS tahun 2017 juga dinaikkan: "Unit cost BOS tahun 2017 untuk Rp.800.000,00 (SD), Rp1.000.000,00 per siswa per tahun (SMP) dan Rp.1.400.000 per siswa per tahun SM Ini untuk menjamin Pendidikan Dasaryang Bebas Pungutan". Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kini penyalurannya makin lancar dan akuntabel dengan menekankan pada kriteria 4T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran,dan tepat penggunaan atau pemanfaatan)". Mulai tahun 2016 ini bantuan operasional sekolah ini di samping diberikan kepada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama diseluruh Indonesia juga diberikan kepada anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bersekolah di tempat orangtuanya bekerja di luar negeri. Penyaluran menjadi lancar karena polanya diubah, sehingga pada tahun 2016 ini tidak ditemukan lagi kendala sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Melalui mekanisme hibah, kini penyaluran dana BOS tahun 2017 lebih lancar.

Capaian kinerja penguatan manajemen/tata kelola dan pencitraan publik dilihat dari 3 indikator kinerja yaitu: 1) akreditasi sekolah; 2) daya serap APBD; dan 3) daya serap APBN. Indikator akreditasi sekolah masing-masing jenjang telah

dijelaskan pada bagian sebelumnya, untuk daya serap APBD, dibanding capaian pada Tahun 2015 yaitu sebesar 85,61% untuk daya serap keuangan dan 60,85% untuk daya serap fisik maka di Tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu untuk daya serap keuangan terealisasi sebesar 81,77% dan Fisik sebesar 87,18%. Sedangkan untuk daya serap APBN di Tahun 2016, jika dibanding dengan realisasi di tahun 2015 mengalami kenaikan, realisasi keuangan menurun dari 98.21% di tahun 2016 menjadi 90.23% di tahun 2016 dan realisasi fisik dari 100% di tahun 2015 menjadi 92,48% ditahun 2016.(LAKIP Dinas Pendidikan 2016:121)

Secara rinci, anggaran dan realisasi anggaran pendanaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang berasal dari berasal dari APBD Provinsi Riau rincian dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2. 7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Yang bersumber dari APBD Tahun 2016

No	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SKO
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**				
1.	Belanja Pegawai	132.468.005.127	126.791.771.348	95,72	5.676.233.779
B	**BELANJA LANGSUNG**				
	Belanja Langsung	1.323.101.718.904.12	1.216.245.863.386..12	91,92	106.855.855.518
TOTAL BELANJA		**1.455.569.724.031.12**	**1.343.037.634.734.12**	**92.27**	**112.532.089.297**

Sumber : Data LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Perangkat Daerah

Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Beberapa pengaruh kondisi eksternal terhadap pendidikan yang merupakan tantangan dan peluang dalam pengembangan layanan pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1 Ekonomi

Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalamkurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah:

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
2. masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah;
3. masih banyak basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan;
4. semakin meningkatnya daya saing Indonesia yang perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja;
5. munculnya ancaman raksasa ekonomi global seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional;
6. masih rendahnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berasal darisumber daya alam;
7. pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik yang sudah berjalan maupun yang direncanakan, perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memadai; dan
8. ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain serta;
9. tingkat pertumbuhan ekonomi.

2.4.2 Teknologi

Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah :

1. kesenjangan literasi (kemampuan) teknologi informasi dan komunikasi antar kabupaten/kota;
2. kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global;
3. terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan iptek di lembaga pendidikan;
4. semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan;

5. semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan berbagi pengetahuan dengan memanfaatkan TIK;
6. perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi;
7. perkembangan internet yang membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI.

2.4.3 Politik, Pertahanan dan Keamanan

Kondisi politik, pertahanan dan keamanan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah:

1. ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
2. ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan;
3. kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi;
4. implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal;
5. terjadinya penyimpangan penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah;
6. keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan;
7. ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidak dewasaan dalam berdemokrasi;
8. ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan;
9. komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuaidengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah		8.61 Tahun		8.38	8.47	8.49	8.59	8.61	8.38	8.47	8.49	8.59	8.69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.93%
	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah				12.27	12.45	12.74	12.86	13.19	12.27	12.45	12.74	12.86	13.43	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	101.82%
2	Meningkatnya Angka Melek Huruf		98.57%				98.51%	98.54%	98.54%			98.77%	99.03%	99.17%			100.26%	100.50%	100.64%
3	APK SMA/SMK		93.41%		72%	91.35%	91.85%	92.37%	78.30%	76.98%	68.89%	71.69%	74.92%	81.39%	106.92%	75.41%	78.05%	81.11%	103.95%
4	APM SMA/SMK		70.43%		75%	68.34%	68.86%	69.38%	62.92%	74.88%	54.01%	54.59%	56.71%	60.22%	99.84%	79.03%	79.28%	81.74%	95.71%
5	Persentase Kelulusan Peserta didik SMA/SMK/MA		99.71%		n/a	n/a	99.33%	99.68%	99.71%	n/a	n/a	100%	98.45%	99.96%			100.67%	98.77%	100.25%
6	Rata-rata nilai UN SMA/MA jurusan IPA		7.71		n/a	n/a	70.64	70.68	70.71	n/a	n/a	70.88	57.92	49.05			100.34%	81.95%	69.37%
7	Rata-rata nilai UN SMA/MA jurusan IPS		7.71		n/a	n/a	70.64	70.68	70.71	n/a	n/a	59.02	53.2	45.88			83.55%	75.27%	64.88%
8	Persentase Guru SMA/SMK Berkualifikasi S1/D IV		94.52%		n/a	62%	93.58%	94.05%	94.52%	n/a	92.64%	92.29%	94.06%	95.29%		149.42%	98.62%	100.01%	100.81%
9	Persentase Guru SMA bersertifikat Pendidik		39,70%		n/a	n/a	n/a	36%	45.90%	n/a	n/a	46.15%	39.70%	44.23%				110.28%	96.36%
10	Persentase Guru SMK bersertifikat Pendidik		30,59%		n/a	n/a	n/a	23%	30.59%	n/a	n/a	30.70%	30.57%	38.41%				132.91%	125.56%
11	Persentase SMA Terakreditasi		95.00%		n/a	n/a	93.43%	54.60%	64.74%	n/a	n/a	85.85%	26.60%	69.36%			91.89%	48.72%	107.14%
12	Persentase SMK Terakreditasi		45.40%		n/a	n/a	93.43%	54.60%	64.74%	n/a	n/a	51.35%	34%	99.87%			54.96%	62.27%	154.26%

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Provinsi Riau

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
Belanja Tidak Langsung	**49,791,847,000.00**	**59,080,178,212.00**	**68,797,530,512.00**	**62,371,055,186.00**	**1,185,136,496,588.00**	**41,843,658,728.00**	**46,463,395,250.00**	**48,742,987,061.00**	**56,691,821,407.00**	**943,821,670,605.00**	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8
Belanja Langsung	**347,958,218,500.00**	**377,449,205,650.00**	**425,597,666,190.00**	**555,003,354,182.71**	**842,493,565,992.00**	**306,111,133,282.00**	**198,681,910,087.00**	**252,079,790,041.00**	**435,254,613,865.00**	**751,158,897,453.00**	0.9	0.5	0.6	0.8	0.9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,226,307,500.00	6,074,873,500.00	10,538,432,200.00	19,029,907,403.21	8,966,736,580.00	4,256,063,468.00	4,723,318,678.00	7,564,451,128.00	1,407,457,134.00	7,093,081,976.00	0.7	0.8			
Program Pendidiakan Anak usia Dini			17,670,655,200	18,264,866,292.00				10,143,343,800	16,398,779,110				0.6	0.9	
Program Pendidikan Tinggi	65,118,050,000.00		93,786,374,550	84,901,603,472.00		60,769,493,325.00		44,655,208,680	70,448,484,118		0.9		0.5	0.8	
Program Pendidikan Dasar			50,334,799,340	40,894,803,118.00				30,422,908,661	33,102,059,700				0.6	0.8	
Progran Pendidikan Non Formal dan Informal	15,105,668,000.00	21,230,000,000.00	52,492,728,850	59,833,224,624.00		11,762,012,660.00	12,436,084,900.00	36,365,552,020	48,664,096,753		0.8	0.6	0.7	0.8	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,375,144,000.00	6,706,500,000.00	4,517,000,000	15,809,172,446.00	1,051,550,000.00	3,870,254,452.00	3,314,334,116.00	354,710,023	9,575,170,935	916,953,179.00	0.9	0.5	0.1	0.6	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	870,000,000.00	1,362,500,000.00	1,875,000,000	2,222,495,000.00	892,576,000.00	417,212,350.00	625,701,350.00	1,040,860,650.00	1,057,493,707	696,143,200.00	0.5	0.5	0.6	0.5	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	425,608,000.00	321,300,000.00	720,000,000	350,596,000.00		355,948,000.00	-	457,288,425.00	332,864,500		0.8	0.0		0.9	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	660,000,000.00	1,125,000,000.00	492,670,000	500,000,000.00	442,250,000.00	484,667,050.00	722,164,800.00	346,378,650.00	420,605,000	373,537,700.00	0.7	0.6		0.8	
Program Wajib Belajar Pendidikan dasar sembilan tahun	36,392,949,000.00	69,861,665,250.00				33,065,414,400.00	23,513,815,030.00				0.9	0.3			
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan		25,291,222,400.00					18,240,519,525.00					0.7			
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	43,471,652,000.00					35,564,280,850.00					0.82				
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan	88,495,000,000.00					87,832,074,200.00					0.99				
Program Peningkatan Mutu Kurikulum		1,500,000,000.00					7,385,700.00					0.0			
Program Pemerataan dan Perluasan Akses, Mutu, Relevansi dan daya saing		37,200,000,000.00					19,364,200,059.00					0.5			
Program Pembinaan dan Pengembangan Perguruan Tinggi		81,814,144,500.00					46,102,364,159.00					0.6			
Program Penataan Kelembagaan				210,550,000.00										0.0	
Program Penataan Tatalaksana				173,000,000.00										0.0	
Program Pembangunan Sekolah Terpadu			54,000,000,000					-					0.0		
Program Pendidikan Menengah	53,298,000,000.00	124,462,000,000.00	113,061,876,700	166,546,444,333.00	547,041,238,533.00	41,269,432,272.00	69,233,716,870.00	84,752,026,741	136,804,186,236	490,653,684,504.00	0.8	0.6	0.7	0.8	0.9
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	19,269,840,000.00		23,301,394,150	26,298,213,584.50	211,110,748,207.00	13,290,651,555.00		5,867,739,011	20,573,616,063	188,740,654,992.00	0.7		0.3	0.8	0.9
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			34,815,955,200	70,165,428,000.00	72,838,466,672.00			19,497,163,577	59,829,492,631	62,541,591,902.00			0.6	0.9	0.9
Program Pendidikan Luar Biasa	14,250,000,000.00					13,173,628,700.00					0.9				
Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya		500,000,000.00	21,590,780,000	49,679,849,910.00			398,304,900.00	10,487,388,675	36,519,880,978			0.8	0.5	0.7	
Program Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya															
Program Pengembangan Data/Informasi				123,200,000.00	150,000,000.00				120,427,000	143,250,000.00				1.0	1.0

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. Terkait dengan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan dan kepastian dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain yang masih perlu didorong untuk mencapai target SDGs dan Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*) sebesar 100% pada tahun 2016. Pada jenjang pendidikan menengah tahun 2017, APK dan APM SMA/MA/SMK barumencapai 81,39% dan 60,22%. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan Angka Pendidikan yang Ditamatkan berdasarkan Penduduk UsiaKerja (15-64 tahun), yang masih didominasi lulusan SD. Untuk itu pembangunan pendidikan dihadapkan permasalahan untuk meningkatkan APK SMA/MA/SMK, Rata-rata Lama Sekolah dan harapan lama sekolah. Selain itu, belum memasyarakatnya pendidikan non formal sebagai alternatif pendidikan formal merupakan permasalahan dan tantangan yang perlu diupayakan penyelesaiannya.

Apabila ditilik dari aspek kualitas terlihat masih rendahnya kualitas siswa, pendidik/tenaga kependidikan, proses pembelajaran dan prasarana. Sementara hasil Nilai Ujian Akhir Nasional baik untuk tingkat SMA/MA/SMK sudah cukup menggembirakan. sebagian besar kabupaten/kota memiliki nilai rata-rata diatas 7,0. Terkait pendidik dan tenaga kependidikan adalah masih rendahnya kesejahteraan, sertifikasi pendidik dan kualifikasi S1/D4.Untuk guru SD/MI baru 80,14% yang berkualifikasi S1/D4, Guru SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D4 baru mencapai 85,48%, sedangkan untuk guru SM telah mencapai 94,06%. Kondisi prasarana sarana pendidikan juga belum sepenuhnya memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal, baik kondisi ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi beserta kompetensinya, dan pelayanan pendidikan bagian berkebutuhan khusus. Selain itu juga belum

optimalnya pengembangan muatan lokal yang penting bagi sarana untuk mengolah kekhasan "identitas" sebagai bagian tidak terpisahkan dari watak. Hal ini dikarenakan adanya indikasi kecenderungan semakin lunturnya wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan budipekerti di kalangan siswa sekolah. Materi seperti budi pekerti, bahasa, dan kesenian merupakan subyek potencial guna merajut watak saling menghormati, toleransi terhadap kebhinekaan, peduli sesama dan lain-lain yang menjadi dasar pembangunan watak bangsa dan perlu mendapat perhatian bersama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan serta berdasarkan pada beberapa aspek kajian, kondisi saat ini, standar pencapaian yang digunakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis yang dikelompokkan dalam empat aspek yaitu: 1) aspek keterjangkauan (akses); 2) aspek mutu, kesesuaian dan daya saing; 3) aspek manajemen/tata kelola dan efisiensi pembiayaan. Selain itu, permasalahan dikelompokkan sesuai dengan bidang yang ada dalam struktur organisasi, dikelompokkan menjadi lima bidang yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
5. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan.

Secara rinci permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

3.1.1 Permasalahan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Permasalahan pada pendidikan menengah atas lebih kompleks, tidak hanya sekedar masalah ketersediaan, keterjangkauan dan mutu, akan tetapi kesesuaian dan daya saing juga sudah merupakan permasalahan yang terjadi di pendidikan menengah atas Permasalahan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi/kesesuaian serta daya saing Pendidikan Menengah Atas yang belum memadai disebabkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah:

1) rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat berdampak pada masih tingginya angka putus sekolah menengah (0,96%) dan rendahnya

angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan menengah (76,16% dan 62,63%);

2) belum terpenuhinya fasilitas (perpustakaan dan Laboratorium) dan standar sarana prasarana Pendidikan Menengah, baru 22,12% SMA dan 12,19% SMK yang memiliki fasilitas laboratorium serta 43,81% SMK yang memiliki perpustakaan;
3) belum optimalnya links and match/kesesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri;
4) belum optimalnya pembinaan kesiswaan yang mengakibatkan rendahnya rangking prestasi nasional;
5) belum terpenuhinya standar nasional pendidikan menengah;
6) belum seluruh satuan pendidikan menengah menerapkan Sistem Manajemen Mutu;
7) Belum semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum 2013;
8) Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan
9) Belum meratanya distribusi guru mata pelajaran di kabupaten/kota se Provinsi Riau
10) Masih sedikitnya tenaga pendidikan yang berkualisi S2 yaitu hanya 3,55%
11) belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
12) belum optimalnya pembinaan kesiswaan

3.1.2 Permasalahan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah kejuruan masih menjadi sekolah 'kelas dua' setelah SMA. Padahal, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jadi salah satu komponen yang patut dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia. Menjelang era perdagangan bebas, ada tuntutan kebutuhan sumber daya manusia (SDM).Indonesia sebagai pemasok tenaga kerja yang cukup produktif di mata internasional, ikut bersaing dengan Negara lain. Untuk memenuhinya, kesiapan kualitas SDM makin ditingkatkan. Jalurnya juga turut dipersiapkan melalui sistem pendidikan yang disesuaikan untuk mampu mengatasi kebutuhan sumber daya manusia. Sejak ekonomi Indonesia terpuruk pada tahun 1997, angka pengangguran di Indonesia

khususnya di Provinsi Riau tidak berkurang, justru setiap tahun selalu bertambah. Hal ini karena jumlah angkatan kerja lulus pada setiap tahunnya tidak bisa terserap habis di tahun tersebut. *Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Ir.H.Eman Suparno MBA*, belum lama ini menyampaikan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut ada dua metode penyelesaian, yakni dengan meningkatkan kompetensi lulusan dan meningkatkan program pemberdayaan masyarakat.

Atas fenomena ini, diharapkan sistem pendidikan di Provinsi Riau dapat dikembangkan untuk meningkatkan angka siap kerja dan mencegah bertambahnya pengangguran. Menjawab permasalahan ini, agaknya SMK menjadi salah satu jalan keluarnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang cukup potensial. Pemerintah Provinsi Riau berniat menargetkan Indonesia mencapai angka perbandingan hingga 60% : 40% untuk perkembangan SMK sampai tahun 2019 kelak. Berbagai langkah pengembangan mutu layanan SMK pun dijalani.

Pemerintah Riau menyadari ada permasalahan yang sangat mendasar pada pendidikan kejuruan, sehingga harus di benahi diantaranya adalah:

1. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan kejuruan masih dilakukan sepenuhnya oleh pihak Depdikbud " *Supply driven*"
2. penyusun kurikulum, guru yang mengajar, mengevaluasi hasil pengajaran adalah orang yang tidak pernah bekerja di dunia Industri"
3. Program pendidikan sepenuhnya di laksanakan di SMK
4. Dunia Usaha dan Industri hanya mengeluh mutu tamatan SMK,tetapi tidak ikut memikirkan & tidak membantu memecahkan masalah.
5. lulusan SMK cendrung staknan atau tidak dapat menunjukan sebagai pekerja yang professional di bidangnya, atau dengan kata lain lulusan SMK tidak memiliki *Soft skills*

3.1.3 Permasalahan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK)

Kurangnya ketersediaan, kesetaraan dan kualitas Pendidikan Khusus (Diksus) merupakan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, permasalahan ini antara lain disebabkan oleh:

1) Jangkauan layanan SLB belum dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK)

2) Meningkatnya anak berkebutuhan khusus yang belum mendapat layanan pendidikan khusus yaitu sekitar 2,06% per tahun

3) Kurangnya tenaga pendidik yang berkeinginan dan mampu melakukan pendidikan anak berkebutuhan khusus

4) 50% kondisi ekonomi orang tua anak berkebutuhan khusus masih prasejahtera dan 82% kesadaran orang tua anak berkebutuhan khusus masih rendah

5) Radius sekolah dari tempat tinggal anak berkebutuhan khusus sangat jauh

6) 90% kesiapan sekolah umum (SD, SMP, SMU/SMK) untuk menerima anak berkebutuhan khusus masih kurang

7) Rendahnya rangking prestasi nasional pendidikan anak berkebutuhan khusus dan layanan khusus

8) 10 kabupaten masih mempunyei anak usia sekolah di daerah marjinal yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan

9) 98,03% Kecamatan dari 12 kab/kota belum mendapatkan layanan pendidikan khusus (anak narkoba, anak jalanan, anak terbelakang, anak lapas, anak PKS)

10) belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Khusus;

11) belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);

12) belum optimalnya pembinaan kesiswaan Pendidikan Khusus;

13) sekolah inklusi belum bisa melayani anak berkebutuhan khusus karena sekolah tidak cukup untuk menampung siswa.

3.1.4 Permasalahan Manajemen/ Tata Kelola Layanan Pendidikan

Untuk menjamin terwujudnya layanan pendidikan yang berdaya saing maka diperlukan sistem tata kelola/manajemen layanan pendidikan yang mantap. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menghadapi permasalahan belum mantapnya pelaksanaan sistem tata kelola, hal ini disebabkan oleh:

1) Belum semua unit kerja/bidang pada Dinas Pendidikan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000;
2) Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3) Belum optimalnya pengendalian internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan;
4) Berkurangnya kualitas sumber daya aparatur Dinas Pendidikan.
5) Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin pegawai.
6) Kurangnya sarana dan prasarana aparatur
7) Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor Tahun 2014, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau adalah **"Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju secara Proporsional melalui Kesiapan Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis"**

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
4. Menurunkan kemiskinan
5. Mewujudkan pemerintahan yang terpercaya (handal)
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertakwa serta pemantapan stabilitas politik
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata

9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Gubernur Riau tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke 2 yaitu meningkatkan layanan pendidikan. Pada misi ke 2 ini Dinas

Pendidikan Provinsi Riau bertanggung jawab terhadap pencapaian pembangunan bidang pendidikan yang berkeadilan khususnya pada sasaran meningkatnya angka rata-rata lama sekolah, meningkatnya angka harapan lama sekolah, meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan bermutu, kesesuaian dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan Menengah dan PKPLK.

3.2.1 Telaahan Program Unggulan

Dalam upaya pencapaian misi ke 2, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau telah menetapkan beberapa program unggulan sebagai berikut:

1. Pengembangan sekolah kejuruan dan sekolah khusus
2. Peningkatan mutu dan daya saing pelayanan pendidikan
3. Peningkatan dan perluasan bantuan operasional sekolah
4. Peningkatan dan pelayanan mutu sekolah 3 T

Program unggulan pertama yaitu pengembangan sekolah kejuruan, sekolah khusus dan sekolah terpadu, diwujudkan dan dilaksanakan melalui kegiatan: 1) membangun sekolah kejuruan sebanyak 12 unit ; 2) membangun ruang kelas baru sebanyak 189 unit; 3) mensukseskan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 Tahun).

Program unggulan kedua yaitu Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan pendidikan, akan diwujudkan dilaksanakan melalui kegiatan: 1) membangun rumah dinas bagi guru sekolah marginal sebanyak 208 unit sampai dengan Tahun 2018; 2) memberikan beasiswa S1 bagi guru SD dan SMP sebanyak 709 orang sampai dengan Tahun 2018.

Program unggulan ketiga yaitu peningkatan dan perluasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah akan dilaksanakan melalui kegiatan pemberian dukungan bantuan SMA, SMK kepada 220.609 orang.

Pencapaian visi, misi dan perwujudan program unggulan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam bidang pendidikan sebagaimana tersebut diatas akan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan pada identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan, maka yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi, misi dan perwujudan program unggulan Gubernur Riau bidang pembangunan pendidikan antara lain adalah:

1. Faktor Penghambat (kelemahan)

1) belum terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan (akses) layanan pendidikan bermutu pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan
2) masih terbatasketersediaan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata
3) belum merata dan belum terpenuhinya standar nasional sarana dan prasarana pendidikan berkualitas di seluruh kabupaten dan kota
4) belum optimalnya pengembangan dan penerapan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, serta kewirausahaan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
5) belum sesuainya pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri
6) Rendahnya kemampuan ekonomi dan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya kejenjang lebih tinggi
7) belum tersedianya data dan informasi serta akreditasi pendidikan
8) manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan belum terwujud
9) tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih lemah

10) minimnya daya tampung,masih rendahnya mutu dan daya saing pada jenjang Pendidikan Tinggi

2. Faktor Pendorong (Kekuatan)

Sekalipun dalam upaya pencapaian pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dihadapkan pada hambatan dan tantangan di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang dan faktor pendorong bagi upaya pencapaian pelayanan. Faktor pendorong tersebut diantaranya adalah :

1) Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2) Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.
3) Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan
4) Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil
5) Munculnya organisasi-organisasi baru di bidang pendidikan yang dapat menjadi mitra dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.
6) Meningkatnya peran serta pelaku usaha melalui program *Corporate Social Responbility* (CSR) untuk pendidikan.

3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L Dan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional

3.3.1 Telaahan Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan dan kebudayaan, Kemdikbud menetapkan visi 2019: "**Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaanyang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong"**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kemendikbud telah menetapkan lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

3.3.2 Tujuan Strategis

Untuk merealisasikan visi dan misi Kemdikbud, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2015—2019 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemdikbud tahun 2015—2019adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem pendidikan.
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam melestarikan Kebudayaan
3. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak berkebutuhan Khusus
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
6. Peningkatan Sistem tata kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan melibatkan Publik

3.3.3 Sasaran Strategis

Guna mencapai tujuan tersebut, Kemendikbud telah menetapkan sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis dari (T1): Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem pendidikan adalah:
    1) Meningkatnya perilaku positif siswa;
    2) Meningkatnya partisipasi orangtua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan;
    3) Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial.
2. Sasaran Strategis dari (T2):Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan adalah: meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.
3. Sasaran Strategis dari (T3):Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak berkebutuhan Khusus adalah:
    1) Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten dan kota
    2) Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah
4. Sasaran Strategis dari (T4): Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter adalah:
    1) Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan
    2) Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah
    3) Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan
    4) Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga
5. Sasaran Strategis dari (T5): Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan adalah:
    1) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya

untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.

2) Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia.

3) Meningkatperan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN

6. Sasaran Strategis dari (T6): Peningkatan Sistem tata kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan melibatkan Publik adalah:

   1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja kemendikbud

   2) Dipertahankannya opini laporan keuangan kemendikbud wajar tanpa pengecualian (WTP).

   3) Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemendikbud 2015 -2019 sebagaimana tersebut diatas, maka ada beberapa faktor penghambat dan pendorong dari Dinas Pendidikan yang akan berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan Faktor penghambat dan pendorong dimaksud tidak jauh berbeda dengan faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi gubernur Riau sebagaimana penjelasan diatas.

Capaian kinerja layanan pendidikan Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten kota dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan. Beberapa permasalahan yang ada di kabupaten/kota ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemendikbud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Pendidikan Dasar yang Berkualitas (Akses, Kualitas, Pendidikan Agama dan Kewarganegaraan), yaitu Meningkatnya partisipasi penduduk terhadap pendidikan; Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas; dan Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan kewargaan/pendidikan karakter. Permasalahan yang dihadapi kab/kota dalam mencapai sasaran ini antara lain adalah:

   1) masih ada 3 Kab/Kota yang capaian APM SD/MI/SDLB/Paket A dibawah capaian APM Provinsi (95,28%) yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti

(74,09%), Kabupaten Indragiri Hilir (85,22%0, dan Kabupaten Kuantan Singingi (86,32%)

2) masih ada 7 Kab/Kota yang capaian APM SMP/MTs/SMPLB/paket B dibawah capaian APM Provinsi (72,87%) yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (78,21%), Kabupaten Kuantan Singingi (79,88%), Kabupaten Kampar (80,00%), KabupatenKepulauan Meranti (82,41%), Kabupaten Rokan Hilir (82,45%), Kabupaten Bengkalis (82,58%), dan Kabupaten Siak (82,86%)

3) Faktor ekonomi orang tua dan kondisi geografis masih merupakan faktor penyebab yang mendominasi timbulnya ketiga permasalahan tersebut diatas

4) Masih rendahnya akses pendidikan berkualitas bagi siswa miskin di daerah 3T

5) Belum optimalnya pembinaan siswa melalui kegiatan kerohanian dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di sekolah

6) Rendahnya kompetensi guru agama dalam metodologi pembelajaran dan penguasaan materi ajar

7) Terbatasnya ketersediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus

8) Terbatasnya penyediaan layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus

9) Lemahnya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam mata pelajaran

3. Sasaran Perluasan Pendidikan Menengah Universal yang Berkualitas, yaitu:(1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan menengah; (2) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat; dan (3) meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini antara lain adalah:

1) Masih terdapat 6 Kab/Kota yang capaian APK dan APM SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C berada dibawah capaian Provinsi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (65,90% dan 46,94), Kabupaten Pelalawan (68,34% dan 56,86%), Kabupaten Kampar (72,76% dan 57,14%),

Kabupaten Rokan Hulu (84,29% dan 58,66), Kabupaten Kepulauan Meranti (80,22% dan 64,04%), dan Kabupaten Indragiri Hulu (87,86% dan 64,90%)

2) Masih tingginya gap APK SMA/MA/SMK antar kab/kota, yaitu sebesar 46,37%. (lihat Tabel 2.24).

3) partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menenngah (SM) antar kabupaten/kota di Provinsi Riau memiliki kesenjangan yang sangat lebar jika dibanding dengan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).

4) Faktor geografis, kondisi ekonomi dan rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan menjadi faktor utama rendahnyacapaian APK dan APM di 6 kab/kota dan tingginya gap capaian APK antar kab/kota

5) Sarana prasarana belum memenuhi standar pelayanan minimal

6) Distribusi Guru yang tidak merata

7) Kualifikasi guru SMA/SMK yang S2 masih sangat sedikit, yaitu hanya 3,55%

8) Masih rendahnya kesiapan siswa SMA/SMK untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi

9) Masih rendahnya kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri

10) Rendahnya rangking prestasi tingkat nasional

4. Sasaran Peningkatan pemerataan akses, peningkatan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, yaitu (1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan tinggi; (2) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antar kelompok masyarakat; (3) meningkatnya kualifikasi akademik dosen minimal S2/S3; (4) meningkatnya aktivitas riset dan pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (5) meningkatnya penelitian untuk pengembangan bidang keilmuan tertentu yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan (6) meningkatnya kualitas lulusan perguruan tinggi sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran

ini tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang di hadapi Dinas Pendidikan Provinsi bidang pendidikan tinggi antara lain adalah:

1) rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat dan rendahnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anak ke perguruaan tinggi, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya angka partisipasi PT yaitu hanya mencapai 31,21% di tahun 2016
2) rendahnya kompetensi dan kualifikasi tenaga edukatif di perguruan tinggi mengakibatkan mutu lembaga pendidikan tinggi di Provinsi Riau masih Rendah
3) terbatasnya daya tampung perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, terutama untuk jurusan yang bermitra dengan pemerintah Provinsi Riau
4) sarana prasarana perguruan tinggi yang belum memadai
5) lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri belum ada kesesuaian
6) belum optimalnya kemitraan antara perguruan tinggi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
7) masih lemahnya tata kelola perguruan tinggi terutama perguruan tinggi swasta
8) masih rendahnya budaya belajar dan bekerja keras dari mahasiswa

5. Sasaran Peningkatan Ketrampilan Angkatan Kerja yaitu: (1) meningkatnya kesiapan siswa untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; (2) diterapkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk semua bidang kejuruan di SMK, PT, BLK dan kursus non-formal; (3) meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri; (4) meningkatnya proporsi angkatan kerja muda berpendidikan rendah untuk mengikuti kursus ketrampilan kerja. Permasalahan yang dihadapi jika dilihat dari keempat sasaran tersebut antara lain adalah:

1) Masih rendahnya kesesuaian antara pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri
2) Masih lemahnya pemberian ketrampilan khusus di SMA/MA untuk bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi dan bahasa

3) Masih lemahnya ketrampilan akademik siswa lulusan SMK

4) Masih lemahnya proses kerjasama/konsultasi dengan industri dan berbagai lembaga/kementrian/dinas yang relevan, dan keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran

5) Belum selarasnya bidang studi SMK dan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan pemerintah dan swasta dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kab/kota sesuai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

6) Lemahnya proses akreditasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan ketrampilan

7) Masih lemahnya peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas

8) 78,30% masyarakat usia produktif belum mempunyai ketrampilan/keahlian sesuai dengan lapangan kerja

9) 85,67% kecamatan belum mepunyai lembaga kursus

10) 91,5% lembaga non formal belum terakreditasi

11) belum optimalnya pembinaan kesiswaan sehingga lulusan sekolah menengah umum dan kejuruan belum memiliki ketrampilan dan belum mampu bersaing didunia kerja

6. Sasaran Peningkatan Kualitas Pembelajaran yaitu: Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan; Tersedianya kurikulum yang andal; Tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komperhensif. Permasalahan/tantangan yang dihadapi untuk mencapai sasaran ini antara lain adalah:

   1) Ketersediaan fasilitas pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur belum optimal

   2) Masih ada tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memiliki sertifikat pendidik

   3) Masih ada sekolah yang belum terakreditasi

4) Masih lemahnya sistem penjaminan kualitas pendidikan berdasarkan standar pendidikan nasional

5) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran

6) Masih ada kab/kota yang capaian SPM Dikdasnya masih rendah

7) Ketersediaan buku dan sumberdaya perpustakaan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan belum memenuhi SPM

8) Pendataan dan pengolahannya di semua tingkat belum cukup mendukung perencanaan untuk pencapaian Dikdas

9) Kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan dan staf sekolah terhadap SPM

10) Tidak adanya kejelasan peran masing-masing jenjang pemerintahan dan kementerian/lembaga/dinas dalam pengolahan SPM

11) Kapasitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan belum sepenuhnya baik

12) Masih rendahnya kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum 2013, khusus dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran siswa secara lebih komprehensif.

13) Belum berdayanya orang tua dan masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dari pemerintah daerah untuk pendidikan yang berkualitas.

7. Sasaran Peningkatan Manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi LPTK yaitu: (1) meningkatkan kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar; (2) meningkatnya kualifikasi akademik guru minimal S1/D-IV; (3) meningkatnya kompetensi guru: *subject knowledge* dan *pedagogical knowledge*; (4) Menurunnya angka ketidakhadiran guru; (5) Meningkatnya kompetensi LPTK yang mampu melaksanakan pendidikan profesi guru. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini antara lain adalah:

1) Program sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran

2) Masih lemahnya sistem pengelolaan kinerja guru yang terintegrasi (rekrutmen, penilaian, dan pelatihan berkelanjutan);

3) Belum optimalnya pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja guru

4) Masih lemahnya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem pengelolaan kinerja guru

5) Belum meratanya distribusi guru

6) Masih kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi

7) Belum optimalnya kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi/LPTK dalam melaksanakan pendidikan profesi guru

8. Sasaran membaiknya tata kelola pendidikan yaitu: (1) meningkatnya kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan, yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya indeks kualitas pemerintah kab/kota; (2) meningkatnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah; (3) meningkatnya tata kelola kelembagaan perguruan tinggi; (4) meningkatnya koordinasi antar instansi dan antar pemerintah; (5) meningkatnya kualitas data dan informasi pendidikan; (6) meningkatnya ketersediaan dan kualitas hasil penelitian kebijakan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Dan sasaran meningkatnya efisiensi pembiayaan pendidikan yaitu: (1) terlaksananya penerapan pendanaan dan pembiayaan pendidikan berbasis kinerja di semua jenjang pemerintahan untuk bidang pendidikan; (2) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan;(3) membaiknya efisiensi dan efektivitas mekanisme pembiayaan pendidikan. Untuk mencapai sasaran tata kelola dan efisiensi pembiayaan sebagaimana tersebut diatas, permasalahan yang dihadapi antara lain adalah:

1) kapasitas tata kelola pemerintah provinsi/kab/kota dalam pelaksanaan dan pemantauan pembangunan pendidikan masih lemah dan tidak seimbang;

2) masih lemahnya kemitraan antara pusat dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota;

3) belum selarasnya peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan;

4) masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya keuangan sekolah dan kinerja sekolah;

5) masih kurangnya sumberdaya di tingkat provinsi dan kab/kota untuk melakukan monitoring upaya peningkatan kualitas sekolah;

6) banyaknya alur pendanaan yang tumpang tindih menyebabkan sulitnya koordinasi;

7) lemahnya partisipasi pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah/manajemen berbasis sekolah (MBS);

8) kapasitas kepala sekolah, guru dan komite sekolah dalam melaksanakan MBS masih rendah;

9) masih rendahnya kapasitas kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan MBS oleh satuan pendidikan;

10) lemahnya kapasitas staf administrasi sekolah dalam pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel;

11) belum adanya aturan yang jelas mengenai kontribusi pemerintah dalam membantu satuan pendidikan swasta dalam penyediaan akses pendidikan berkualitas;

12) lemahnya akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan;

13) belum optimalnya penegakan aturan tentang jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan swasta;

14) masih lemahnya kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;

15) komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan masih lemah;

16) lemahnya lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya untuk menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;

17) sistem informasi berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi penduduk sasaran layanan pendidikan masih lemah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan dari program pembangunan daerah yang telah dijabarkan pada tabel 6.3 RPJMD untuk Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak termasuk dalam kajian Tata Ruang Wilayah dan juga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau (RPJMD) Tahun 2014 – 2019. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyususunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompesansi program

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Jika direview kembali faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan bidang ditinjau dari beberapa hal seperti gambaran pelayanan SKPD yang tergambar dalam Bab II, telaah visi, misi, dan program Gubernur Riau, sasaran jangka menengah Renstra Kemendikbud maka isu-isu strategi provinsi Riau dapat dikelompokkan kedalam 4 aspek isu yaitu : 1) pemerataan dan akses pendidikan; 2) Mutu, kesesuaian, dan daya saing pendidikan; 3) tata kelola, Akuntabilitas dan citra publik terhadap pendidikan serta efisiensi pembiayaan; dan 4) kelestarian Budaya. Keempat isu tersebut terjadi pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan yang dihadapi Indonesia pada umumnya dan Riau pada Khususnya, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan se-Provinsi Riau melalui berbagai pertimbangan, antara lain : (1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang ditimbulkan, (3) memiliki daya ungkit terhadapa

pembangunan pendidikan, (4) kemudahan untuk dikelola. Isu-isu strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.5.1 Pemerataan dan Akses Pendidikan

Isu strategis terkait dengan aspek pemerataan dan akses pendidikan antara lain adalah :

1. Peningkatan ketersediaan layanana PAUD di perkotaan dan pedesaan se Provinsi Riau.
2. Peningkatan angka partisipasi PAUD.
3. Menumbuhkan kesadaran dan pemehaman pemangku kepentingan terutama di pedesaan terhadap pentingnya PAUD bagi pengembangan potensi anak (Golden Age).
4. Peningkatan keterjangkauan dan ketersediaan layanan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur bagi anak di daerah 3 T.
5. Peningkatan keterjangkauan dan ketersediaan layanan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan bagi anak keluarga pra sejahtera.
6. Peningkatan keterjangkauan pendidikan tinggi yang berdaya saing.
7. Peningkatan APK pendidikan tinggi.
8. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan khusus dan layanan khusus pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan
9. Pemenuhan layanan pendidikan di daerah marginal.

3.5.2 Mutu, Kesesuaian, dan Daya Saing Pendidikan.

Isu strategis terkait dengan aspek pemertaan dan akses pendidikan antara lain adalah :

1. Peningkatan mutu pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.
2. Peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah 3 T
3. Peningkatan mutu laayanan pendidikan khusus dan layanan khusus.
4. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

6. Peningkatan kopetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.
7. Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
8. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) pada semua jenis, jenjang, jalur pendidikan terutama didaerah 3 T.
9. Optimalisasi pemanfaatan dan pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.
10. Peningkatan ketersediaann buku dan sumber daya perpustakaan sesuai SPM pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.
11. Peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan dan staf sekolah terhadap SPM.
12. Penerapan kurikulum 2013.
13. Peningkatan kesesuain antara pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
14. Peningkatan keterampilan khusus di SMA/MA untuk bidang aplikasi seperti ekonomi, bisnis, komunikasi dan bahasa.
15. Peningkatan keterampilan akademik dan profesionalitas siswa lulusan SMK.
16. Peningkatan proses kerjasama/konsultasi dengan industri dan berbagai lembaga/kementrian/dinas yang releven, danm keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran.
17. Penyelarasan bidang studi SMK dan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan pemerintah dan swasta dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kab/kota sesuai Masterplan Percepatan dan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
18. Penguatan proses akreditasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan.
19. Peningkatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas.
20. Meningkatkan peran serta pelaku usaha melalui program Corporate Social Responbility (CSR) untuk pendidikan.
21. Optimalisasi pembinaan siswa melalui kegiatan kerohanian dan ekstra kulikuler muatan lokal.

3.5.3 Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik terhadap Pendidikan serta Efesiensi Pembiayaan.

Isu strategis terkait dengan aspek tata kelola, akuntabilitas, citra publik terhadap pendidkan dan efesiensi pembiayaan antara lain adalah :

1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah unutk melaksanakan desentralisasi pendidkan.
2. Peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.
3. Peningkatan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.
4. Meningkatkan koordinasi antara instansi dan antara pemerintah.
5. Meningkatkan kualitas data dan informasi pendidikan.
6. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas hasil penelitian kebijakan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pendidikan.
7. Pelaksanaan penerapan pendanaan dan pembiyaan pendidikan berbasis kinerja.
8. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan.
9. Peningkatan efesiensi dan efektivitas mekanisme pembiyaan pendidikan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan visi dan misi Dinas Pendidikan, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2014-2019 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

4.1.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan strategis Dinas Pendidikan tahun 2014-2019 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan serta sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan pendidikan yang andal sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi Dinas Pendidikan dengan memperhatikan rumusan misi. Dengan demikian, tujuan strategis Dinas Pendidikan 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Menengah
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan
3. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang Bermutu dan berdaya saing
4. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan pelayanan Pendidikan Tinggi

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Riau (2014—2019)

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikandiperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2017. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis (t1) Peningkatan ketersediaan Layanan Pendidikan Menengah yang bermutu dan berdaya saing dengan sasaran :
    1) Terselenggaranya Pelayanan Pendidikan Menengah Universal

2) Meningkatnya Mutu dan kesesuaian Layanan Pendidikan menengah.

3) Meningkatnya tata kelola manajemen layanan pendidikan menengah.

4) Meningkatnya prestasi minat dan bakat pendidikan menengah di tingkat nasional. Adapun Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai berikuit:

(1) APK SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C mencapai 93,41%

(2) APM SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C mencapai 70,43%

(3) APS SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C (16-18 Tahun) mencapai 75,57%

(4) Rasio Siswa terhadap Guru SMA/MA/SMK mencapai 1:21

(5) Rasio Siswa terhadap Kelas SMA/MA/SMK 1:32

(6) Rasio Guru Terhadap Kelas SMA/MA/SMK 1:1

(7) SMA/MA/SMK yang menerapkan kurikulum 2013 mencapai 75%

(8) SMA/MA/SMK yang berakreditasi mencapai 95%

(9) SMA/MA/SMK yang memenuhi SPM mencapai 90%

(10) Guru SMA/MA/SMK dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S1/D4 mencapai 95%

2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis (t2) Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan sasaran :

1. Meningkatnya Jumlah Sekolah yang Terakreditasi

2. Meningkatnya Jumlah Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan yang meliliki Sertifikasi Kompetensi

3. Meningkatnya Angka Kelulusan Siswa SMA/SMK/MA/SMLB/ Paket C

3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis Peningkatan ketersediaan dan keterjangkuan Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang Bermutu dan Berdaya Saing dengan sasaran :

1) Terpenuhinya pendidikan khusus dan layanan khusus

2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan khusus dan layanan khusus

3) meningkatnya tata kelola pendidikankhusus dan layanan khusus

4) terpenuhinya layanan pendidikan di daerah marjinal

5) meningkatnya prestasi minat dan bakat pendidikan bagipendidikan khusus dan layanan khusus. Adapun Indikator sasaran/ kinerja adalah:

(1) APK SD/MI/SDLB/Paket A mencapai 116,80%

(2) APM SD/MI/SDLB/Paket A mencapai 96,37%

(3) APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B mencapai 109,10%

(4) APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B mencapai 97,50%

(5) APKSMA/MA/SMK/SMLB/Paket C mencapai 82,44%

(6) APM SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C mencapai 73,26%

(7) Jumlah PTK Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang mengukuti Diklat Kompetensi mencapai 60%

(8) Jumlah Layanan terhadap anak Autis

4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis (t4) Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan pelayanan Pendidikan Tinggi dengan sasaran :

1. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan perguruan tinggi bermutu yang merata

4.1.3 Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan guru dan dosen sebagai profesi. Guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4 danbersertifikat pendidik, sedangkan dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-2/S-3 dan bersertifikat pendidik. Pemerintah harus menyelesaikan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik selambat-lambatnya pada akhir tahun 2014. Selain itu, langkah inidilakukan untuk memastikan regenerasi guru yang berkompeten mengingat dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperkirakan sekitar 700 ribu guru akan pensiun. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2014—2019 Dinas Pendidikan akan mempertahankan kebijakan yang telah dilakukan dan menindak lanjuti kebijakan-kebijakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guruyang telah dilaksanakan oleh Kemendikbud, kebijakan-kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Menindaklanjuti kebijakan pengembangan sistem rekrutmen guru dengan pemberian beasiswa ikatan dinas pandubakat;

b. peningkatan sistem rekrutmen guru berkualifikasi S-1/D-4 yang berkompeten;

c. pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi S-1/D-4 dan peningkatan kualifikasi guru dan dosen menjadi S-2/S-3;

d. memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi pendidik antara lain melalui Uji Kompetensi Awal (UKA) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan; dan

e. peningkatan peran perguruan tinggi dalam pembinaan profesionalisme guru berkelanjutan melalui kegiatan KKG/MGMP.

4.1.4 Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Lulusannya

Peningkatan kualitas dan kompetensi guru bergantung pada kualitas lembaga penyedia tenaga pendidik. Penerapan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan ketersediaan LPTK sebagai lembaga yang bertugas menghasilkan calon tenaga kependidikan dan menyelenggarakan sertifikasi pendidik. Untuk menjamin ketersediaan guru yang berkompeten diperlukan peningkatan mutu LPTK. Sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi, peningkatan mutu LPTK dilakukan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut:

a. penyediaan pembiayaan bagi peningkatan kompetensi dosen LPTK

b. fasilitasi perizinan dan akreditasi program studi di LPTK;

c. fasilitasi penertiban LPTK yang tidak berizin dan/atau tidak berakreditasi; dan

d. peningkatan sarana dan prasarana LPTK.

4.1.5 Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Selain tenaga pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi kepala sekolah adalah lemahnya kompetensi manajerial, sedangkan yang dihadapi pengawas sekolah adalah lemahnya kompetensi kepengawasan.

Secara khusus, kepala sekolah dasar menghadapi permasalahan tingginya beban kerja karena tidak mempunyai tenaga administrasi sekolah. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut:

a. memberikan beasiswa S-1 dan S-2 bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah;

b. menyelenggarakan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah;

c. merevitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS; dan

d. mendorong pemerintah daerah kab/kota untuk menyediakan tenaga administrasi sekolah di setiap sekolah dasar.

4.1.6 Penerapan Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa

Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalah gunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiatisme,serta menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain sebagai berikut:

a. menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban alam penyelenggaraan pendidikan;

b. mengembangkan kurikulum pendidikan (kurikulum muatan lokal 2013) yang memberikan muatan *soft skills* akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;

c. menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli pembelajaran aktif di lapangan;

d. memperkuat pendidikan kepanduan/kepramukaan dan keolahragaan; dan

e. menilai prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak muliadan karakter berbangsa dan bernegara.

4.1.7 Pengembangan Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha

Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) tahun 2010—2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta

individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dirumuskan kebijakan pengintegrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:

a. melakukan kajian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan peserta didik sedini mungkin;
b. meningkatkan kualitas pendidikan yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada peserta didik sedini mungkin;
c. menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara pendidikan
d. menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif, mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian diinstitusi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
e. memfasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri.

4.1.8 Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan

Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan sistem evaluasi yang terpercaya. Salah satu indikatornya adalah belum terpadunya hasil ujian nasional pendidikan menengah, sehingga hasil ujian nasional tersebut belum digunakan untuk masuk perguruan tinggi. Hal tersebut diantaranya diakibatkan oleh belum sempurnanya pelaksanaan ujian nasional. Selain itu, substansi ujian nasional pun belum mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang sebenarnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut:

a. penyempurnaan sistem pengujian dan penilaian pendidikan termasuk penjaminan keterpaduan pengujian dan penilaian pendidikan antar jenjang pendidikan;

b. penguatan sistem akreditasi satuan/program pendidikan; dan

c. penguatan sistem sertifikasi kompetensi lulusan.

4.1.9 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan

Pembangunan sarana dan prasarana secara besar-besaran merupakan terobosan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna meningkatkan akses pendidikan. Prasarana yang dibangun pemerintah diantaranya unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), perpustakaan, dan laboratorium. Pembangunan sarana dan prasarana fisikterutama difokuskan pada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Sejalan dengan logika itu, lokasi pembangunan USB cenderung dikonsentrasikan di daerah-daerah pemekaran, pedesaan, terpencil, terisolir, pariwisata dan daerah yang termasuk kantong kemiskinan. Dari beberapa penjelasan tersebut, kebijakan yang dilakukan adalah melalui:

a. penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak sedang dan berat

b. pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan *workshop*;

c. pembangunan ruang kelas baru, unit sekolah baru dan revitalisasi

4.1.10 Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan

Dalam rangka menghadapi tuntutan global, penguasaan dan pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan. Namun, masih ada kesenjangan literasi TIK antar wilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat. Di samping itu juga akan memberikan peluang munculnya plagiatisme dan pelanggaran HAKI sehingga diperlukan integrasi penggunaan TIK dalam pembelajaran. Padatahun 2010-2014, penguatan pemanfaatan TIK untuk *e*-pembelajaran, *e*-manajemen dan *e*-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut.

a. penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untukpenguatan dan perluasan e-pembelajaran pada semua jenjang pendidikan

b. pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan publik.

c. pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik

d. pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK pada pendidikan dasar dan menengah; dan

e. peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK diKab/kota;

f. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidik (PTK);

g. pendampingan kurikulum 2013 dan peningkatan kualifikasi PTK.

4.1.11 Koordinasi Antar, Dinas Kab/Kota dan/atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Kondisi saat ini masih terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan antar bidang maupun antar pusat dan daerah serta kurang terintegrasinya penetapan prioritas serta target kinerja pendidikan di pusat dan di daerah. Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten danKota, telah diatur pembagian urusan antara Kemdikbud, Dinas Pendidikan Provinsi serta Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, dalam pengelolaan pendidikan. Koordinasi antar Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Kemendikbud dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan sebagai berikut:

a. peningkatan koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi dan antar Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta Kemendikbud untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan; dan

b. peningkatan koordinasi antara Kemdikbud dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta satuan pendidikan untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan.

4.1.12 Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Perbatasan/Terdepan, Tertinggal, Terpencil (3T) dan Rawan Bencana

Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal termasuk daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah tersebut. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan untuk semua, mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada di NKRI ini. Pembangunan pendidikan didaerah perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:

a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
b. pembangunan sekolah terpadu di Kabupaten/Kota
c. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap, SD-SMP satu atap, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

4.1.13 Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Hasil penyelarasan pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi. Dinas Pendidikan Provinsi Riau harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standardisasi penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut.

a. menyelaraskan rencana pengembangan layanan pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
b. menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri;

c. mengembangkan sinergitas antar Kementrian/ lembaga/ dinas yang terkait dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;

d. membangun lembaga pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai *cluster* industri; dan

e. meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri dan menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu	1.1	Meningkatnya layanan PAUD di perkotaan dan pedesaan se Provinsi Riau	1	APK PAUD Provinsi Riau	55.58	57.4	59.22			
		1.2	Meningkatnya mutu PAUD se Provinsi Riau	2	APS PAUD (0-6) Tahun	14.25	14.75	15.25			
		1.3	Terpenuhinya sarana dan prasarana PAUD yang bersatandar Nasional	3	3) Rasio Lembaga PAUD terhadap Penduduk Usia 0 – 6 Tahun	1:176	1:182	1:188			
		1.4	Tumbuhnya kesadaran pemangku kepentingan PAUD	4	Jumlah PAUD HI	0	2	6			
		1.5	mempertahankan prestasi PAUD di Tingkat Nasional	5	Rasio guru terhadap murid	1:15	1:14	1:13			
		1.6	Meningkatnya jumlah lembaga PAUD yang bermutu di Provinsi Riau.	6	Rasio Guru terhadap kelas	1:1,15	1:1,12	1:1,10			
				7	PTK PAUD yang mengikuti diklat kompetensi	28.44	32.58	36.72			
2	Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan Bermutu dan Berkesetaraan	2.1	Terpenuhinya layanan pendidikan dasar	1	APK SD/SDLB /Paket A	115.4	115.6	115.8			
		2.2	Meningkatnya mutu pendidikan dasar	2	APM SD/SDLB /Paket A	94.45	94.77	95.09			
		2.3	Meningkatnya prestasi, minat dan bakat pendidikan dasar di Tingkat Nasional	3	APS SD/SDLB/Paket A (7-12 Tahun)	98.52	98.88	99.24			
				4	Peserta didik SD/SDLB putus sekolah	0.13	0.09	0.06			
				5	Angka Kelulusan SD/MI/SDLB	99.28	99.33	99.38			
				6	Angka Nilai rata-rata UN SD/MI/SDLB	7.62	7.65	7.68			
				7	Rasio Ketersediaan sekolah per penduduk usi a (7-12 tahun)	1:203	1:203	1:202			
				8	Rasio siswa terhadap Guru SD/MI	1:19	1:21	1:23			
				9	Rasio Kelas terhadap siswa SD/MI	1:27	1:28	1:29			
				10	Rasio Guru terhadap kelas SD/MI	0,75:1	0,81:1	0,87:1			
				11	Lulusan SD/MI/SDLB yang melanjutkan pendidikan	80.95	85.71	90.47			
				12	SD/SDLB yang menerapkan kurikulum	13	26	39			
				13	SD/MI/SDLB yang berakreditasi	28.05	33.53	39.01			
				14	SD/MI/SDLB yang memenuhi SPM	18	36	54			
				15	Guru SD/MI/SDLB berkualifikasi Akademik S1/D4	47.6	48.19	48.78			
				16	APK SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	106.7	107.2	107.5			
				17	APM SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	85.61	88.14	90.67			

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				18	APS SMP/MTs/ SMPLB/Paket B (13-15 Tahun)	90.08	92.21	94.34			
				19	Peserta didik SMP/MTs/ putus sekolah	0.16	0.12	0.08			
				20	Angka Kelulusan SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B	99.28	99.33	99.38			
				21	Angka Nilai rata-rata UN SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	7.04	7.15	7.26			
				22	Rasio Ketersediaan sekolah per penduduk usia (13-15 tahun)	1:280	1:260	1:240			
				23	Rasio Guru terhadap siswa SMP/MTs	1:17,8	1:19,6	1:21,4			
				24	Rasio Kelas terhadap siswa SMP/MTs	1:35,2	1:34,4	1:33,6			
				25	Rasio Guru terhadap kelasSMP/MTs	0,55:1	0,66:1	0,77:1			
				26	Lulusan SMP/MTs/ SMPLB/Paket B yang melanjutkan pendidikan	96.89	97.66	98.43			
				27	SMP/MTs yang menerapkan kurikulum 2013	13	26	39			
				28	SMP/MTs yang berakreditasi	25.01	31.25	37.49			
				29	SMP/MTs yang memenuhi SPM	18	36	54			
				30	Guru SMP/MTs berkualifikasi Akademik S1/D4	78.66	78.99	79.32			
				31	total medali yang diperoleh dari kompetisi tingkat pendidikan dasar	29.2	34.4	39.6			
3	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Berkesetaraan dan berkesesuaian	3.1	Terselenggaranya Pendidikan Menengah Universal	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	91.35	91.85	92.37			
		3.2	Meningkatnya mutu layanan pendidikan menengah	2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	68.34	68.86	68.38			
		3.3	Meningkatnya tata kelola manajemen layanan pendidikan menengah	3	APS SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C (16-18)	67.45	68.7	69.95			
		3.4	Meningkatnya prestasi, minat dan bakat pendidikan menengah di tingkat nasional	4	Angka Putus Sekolah	0.27	0.2	0.13			
				5	Angka Kelulusan	99.62	99.65	99.68			
				6	Angka Rata-Rata UN	7.6	7.64	7.68			
				7	Rasio Guru Terhadap Siswa SMA/MA/SMK	1:18,6	1:19,2	1:19,8			

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				8	Rasio Kelas Terhadap siswa SMA/MA/SMK	1:30,4	1:40,8	1:31,2			
				9	Rasio Guru Terhadap kelas SMA/MA/SMK	0,55:1	0,66:1	0,77:1			
				10	SMA/MA/SMK yang menerapkan kurikulum 2013	15	30	35			
				11	SMA/MA/SMK yang berakreditasi	92.92	93.43	93.94			
				12	SMA/MA/SMK yang memenuhi SPM	18	36	54			
				13	Guru SMA/MA/SMK berkualifikasi Akademik S1/D4	93.11	93.58	94.05			
				14	Total Medali yang diperoleh dari kompetisi tingkat pendidikan menengah	5	6	8			
4	Terjaminnya Layanan Pendidikan Bagi Daerah Terdepan, Terjauh, dan Tersulit (3T) untuk Keluarga Miskin	4.1	Terjangkaunya layanan pendidikan bagi anak di daerah 3T	1	APK SD/SDLB/ Paket A	115.4	115.6	115.8			
		4.2	Meningkatnya mutu layanan pendidikan bagi daerah 3T	2	APK SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	106.7	107.2	107.5			
		4.3	Meningkatnya Tata kelola pendidikan di daerah 3T	3	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	68.34	68.86	69.38			
		4.4	Meningkatnya prestasi, minat dan bakat pendidikan bagi daerah 3T	4	Jumlah Sekolah Terpadu di kab/kota	0	1	1			
5	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang Bermutu, Berkesetaraan dan Berkesesuaian	5.1	Terpenuhinya pendidikan khusus dan layanan khusus	1	APK SD/SDLB/ Paket A	115.4	115.6	115.8			
		5.2	Meningkatnya mutu layanan pendidikan khusus dan layanan khusus	2	APK SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	106.7	107.2	107.5			
		5.3	Meningkatnya tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus	3	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	68.34	68.86	69.38			
		5.4	terpenuhinya layanan pendidikan di daerah marjinal								
		5.5	Meningkatnya prestasi, minat dan bakat pendidikan bagi pendidikan khusus dan layanan khusus								
6	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi yang Berdaya Saing	6.1	Terjangkaunya Pendidikan Tinggi yang berdaya saing	1	APK PT dan PTA Usia 19-23 tahun	28.58	31.43	34.28			

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				2	Mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan	15.13	16.34	17.55			
7	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Non Formal dan Informal yang Bermutu dan Berkesesuaian dengan Kebutuhan	7.1	meningkatnya layanan pendidikan non formal dan informal	1	Angka Melek Huruf	98.48	98.51	98.54			
		7.2	meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan non formal dan informal	2	Anak lulus SMP tidak melajutkan, putus dan/atau lulus SM tidak melanjutkan mendapatkan layanan pend. Keterampilan	10	20	30			
		7.3	Meningkatnya prestasi pendidik dan kependidikan nonformal dan informal di tingkat nasional	3	Lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi A dan B	42.93	44.69	46.45			
				4	PTK nonformal dan informal yang mengikuti peningkatan kompetensi	54	58	62			
				5	Kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan	38	51	64			
8	Terwujudnya Penerapan Nilai-nilai Luhur Budaya Indonesia yang Mencerminkan Jati Diri Bangsa bermartabat	8.1	Meningkatnya Peles-tarian Keaneka ragaman budaya Melayu dan kearifan lokal	1	Jumlah benda, situs, kawasan cagar budaya yang dilestarikan						
		8.2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan		- Benda cagar budaya bergerak	25	25	25			
		8.3	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan cagar budaya (CB)		- Benda cagar budaya tidak bergerak	0	1	1			
		8.4	Terwujudnya pengem-bangan promosi dan Informasi kebudayaan		- Situs Cagar Budaya	0	1	1			
					- Kawasan Cagar Budaya	0	1	1			
				2	Jumlah Komunitas Adat Terpencil yang terinventarisir/terdata	0	1	1			
				3	Jumlah sarana penyeleneggaraan seni budaya	0	1	1			
				4	Jumlah penyelenggaraan seni budaya						
					- Nasional	0	1	1			
					- Internasional	0	0	1			

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Terwujudnya Sistem Tata Kelola Manajemen Layanan Pendidikan yang Andal dalam menjamin Terselenggaranya layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan	9.1	Optimalnya Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik	1	Persentase sekolah yang melaksanakan MBS dengan baik pada semua jenjang pendidikan	10	20	30			
		9.2	Meningkatnya Efisiensi Pembiayaan Pendidikan	2	Persentase sekolah yang terakreditasi pada semua jenjang pendidikan						
					SD/MI	28.05	33.53	39.01			
					SMP/MTs	23.76	28.75	33.74			
					SMA/MA/SMK	92.92	93.44	93.96			
				3	Opini Audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP			
				4	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang kurangnya 79	51.16	54.61	58.06			
				5	Realisasi penyerapan anggaran 100% setiap tahunnya	98.00	98.50	99.00			
10	Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan (Ess. II)	10.1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C	-	-	-	78.3	80.47	82.58
				2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C	-	-	-	62.92	63.08	63.24
				3	Angka Rata Rata kama Sekolah	-	-	-	8.69	8.79	8.89
				4	Angka harapan Lama Sekolah	-	-	-	12.98	13.1	13.22
		10.2	Manajemen Pengelolaan Pendidikan	1	Presentase kepuasan pelayanan masyarakat pada sektor pendidikan	-	-	-	58%	68%	78%
		10.3	Akses Pendidikan	1	Persentase kecukupan akses pendidikan bagi siswa	-	-	-	1:32	1:32	1:32
		10.4	Sumberdaya Manusia (SDM) Pendidikan	1	Kecukupan SDM	-	-	-	95%	97%	100%
11	Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan (Ess. III)	11.1	Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah		Persentase jumlah sekolah yang yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)	-	-	-	100%	100%	100%
		11.2	Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan		Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik	-	-	-	85%	90%	100%
		11.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana		Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal	-	-	-	70%	75%	80%
		11.4	Peningkatan program wajib belajar 12 tahun		Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun	-	-	-	100%	100%	100%

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		11.5	Kompetensi SDM	Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi	-	-	-	93.56%	93.61%	93.66%
		11.6	Sertifikasi Kompetensi	Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	-	-	6.316 Orang	6.316 Orang	6.316 Orang
		11.7	Peningkatan kesehteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Jumlah penghasilan yang diterima oleh tenaga pendidik dan kependidikan	-	-	-	244 M	244 M	244 M
12	Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan (Ess. IV)	12.1	Pertemuan Stakeholder pemetaan dan pengembangan pendidikan	Jumlah FGD yang dilaksanakan	-	-	-	24 Orang	72 Orang	72 Orang
		12.2	Teknikal Asistensi/ penguatan bagi PTK	Jumlah PTK yang mengikuti pelatihan	-	-	-	6.316 Orang	6.316 Orang	6.316 Orang
		12.3	Pendidikan parenting bagi masyarakat	Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan	-	-	-	100 Orang	0	0
		12.4	Pelatihan tata kelola administrasi sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti administrasi sekolah	-	-	-	100%	100%	100%
		12.5	Pengelolaan data pendidikan berbasis elektronik	Jumlah sekolah yang menggunakan pengelolaan data pendidikan berbasis elektronik	-	-	-	21 Sekolah	31 Sekolah	41 Sekolah
		12.6	Pelatihan Teknisi UN berbasis TIK (CBT)	Jumlah teknisi UN berbasis TIK (CBT) yang terlatih	-	-	-	12 Orang	12 Orang	12 Orang
		12.7	Revitalisasi	Jumlah Sekolah yang direvitalisasi	-	-	-	9 Sekolah	14 Sekolah	19 Sekolah
		12.8	Pembangunan Perpustakaan	Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan	-	-	-	119 Sekolah	125 Sekolah	129 Sekolah
		12.9	Pembangunan Unit Skolah Baru (USB)	Jumlah sekolah baru (USB) yang dibangun	-	-	-	12 Sekolah	17 Sekolah	22 Sekolah
		12.1	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB)	Jumlah Sekolah yang mendapatkan ruang kelas baru (RKB)	-	-	-	31 Sekolah	41 Sekolah	51 Sekolah
		12.1	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Sekolah yang memiliki laboratorium	-	-	-	328 Sekolah	338 Sekolah	348 Sekolah
		12.1	Biaya Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS)	Jumlah Dana Bos Nasional yang disalurkan	-	-	-	1,283,003,200,000	1,283,003,200,000	1,283,003,200,000
		12.1	Regulasi Daerah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan	Jumlah peraturan/Perda yang mengatur tentang pendidikan wajib 12 tahun	-	-	-	1 (Perda 12 Tahun 2013)	1 Perda	1 Perda
		12.1	Biaya pendukung operasional sekolah daerah	Jumlah Dana Bos Daerah yang disalurkan	-	-	-	134,112,427,500	134,112,427,500	134,112,427,500
		12.1	Diklat Calon Kepala Sekolah	Jumlah kepala sekolah yang memiliki Sertifikat Cakep	-	-	-	30 Orang	30 Orang	30 Orang
		12.1	Pelatihan Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah Guru yang mengikuti (MGMP)	-	-	-	435 Orang	300 Orang	300 Orang
		12.1	Pelatihan Majelis Guru Bimbingan Konseling (MGBK)	Jumlah Guru yang mengikuti Bimbingan Konseling (MGBK)	-	-	-	0	36 Orang	36 Orang
		12.1	Pelatihan Pengawas Sekolah	Jumlah pengawas sekolah yang berkompeten dalam tugasnya	-	-	-	152 Orang	60 Orang	60 Orang

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		12.1	Kompetensi Pedagogik kepribadian dan profesionalisme		Jumlah guru yang memiliki Kompetensi Pedagogik dan profesionalisme	-	-	-	0	30 Orang	30 Orang
		12.2	Pemetaan SDM yang Kompetensi		Data dan informasi SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	-	-	7.212 Orang	7.212 Orang	7.212 Orang
		12.2	Fasilitasi SDM yang Bersetifikat Kompetensi		Jumlah SDM yang difasilitasi sertifikasi kompetensi	-	-	-	6.316 Orang	6.316 Orang	6.316 Orang
		12.2	Tunjangan Sertifikasi Guru		Jumlah tunjangan sertifikasi guru yang diterima	-	-	-	2186 M	2186 M	2186 M
		12.2	Tunjangan Tambahan Penghasilan		Jumlah tambahan penghasilan yang diterima	-	-	-	260 M	260 M	260 M

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 dirumuskan pada visi, misi ,tujuan dan dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Riau dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019, RPJMN 2015 – 2019, RPJMD 2014 - 2018 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan saampai tahun 2018.Pada bagian ini akanakan disajikan beberapa hal terkait dengan strategi dan arah kebijakan

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Tahun 2014-2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan an sasaran strategis yang mengacu pada Rencana trategis Pemerintah Provinsi Riaudan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, RPJMN 2015—2019, RPJMD 2014-2019 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai Tahun 2018. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen Kemendiknas dan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas/mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, mensukseskan pelaksanaan pendidikan universal serta memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK untuk pendidikan.

Strategi dan arah kebijakan pendidikan disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi pengelolaan pendidikan terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan Provinsi Riau. Kebutuhan tersebut mencakup infrastruktur, konten, pemanfaatan, SDM, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tatakelola.

5.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut antara lain meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antaratuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat, strategi tersebutmeliputi sebagai berikut:

5.2.1 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T1

Tujuan strategis T1, yaitu Meningkatnya Ketersediaan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Menengah dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

a. penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan menengah berkompeten yang merata diseluruh kabupaten, dan kota;

b. penyediaan manajemen satuan pendidikan menengah berkompeten yang merata diseluruh, kabupaten, dan kota;

c. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, danstandar mutu pendidikan menengah, dan keterlaksanaan akreditasi sertapengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan menengah;

d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA/MA/Paket C bermutu yang merata di seluruh kabupaten dankota;

e. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK/Paket C Kejuruan bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh kabupaten dankota;

f. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikanSMA/SMLB/MA/SMK/Paket C bermutu yang merata di seluruh kabupaten dankota; dan

g. penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket C berkualitas yang merata di seluruh kabupaten dan Kota.

5.2.2 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T2

Tujuan strategi T2, yaitu meningkatkan Mutu Pendidikan, Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang bermutu, akan dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut :

a. penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan untuk pendidikan khusus dan layanan khusus berkompeten yang merata di seluruh kabupaten, dan kota.

b. Penyediaan manajemen satuan pendidikan khusus dan layanan khusus berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

c. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran.

d. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang merata di seluruh kabupaten, dan kota.

e. Penyediaan subsidi unutk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan khusus dan layanan khusus bermutu yang merata di seluruh kabupaten, dan kota; dan.

5.2.3 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T3

Tujuan strategis T3, yaitu meningkatkan ketersediaan dan pemerataan pelayanan pendidikan, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut :

a. Penguatan kelembagaaan, prosedur kerja, dan sumber daya manusia Dinas Pendidikan.'

b Penguatan sistem perencanaan di lingkungan Dinas Pendidikan.

c. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

d. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

e. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

f. Peningkatan disiplin aparatur.

g. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

5.2.4 Strategi Umum.

Dari seluruh strategi pembangunan pendidikan tersebut dapat dirumuskan ke dapal strategi didasarkan pada komponen yang ada dalam sistem pendidikan.

Rumusan strategi Umum

NO	Komponen Sistem Pendidikan	Strategi Umum
1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	peneyediaan tenaga pendidik berkomepeten yang di seluruh kabupaten, dan kota
		peningkatan kesehteraan pendidik
		penyediaan manajemen satuan pendidikan berkompeten yang merata di seluruh kabupaten, dan kota
2	Pembelajaran dan Penilaian	penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
		penyediaan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal
3	Sarana dan Prasarana	peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan
4	Pendanaan	peneyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan berkualitas yang merata diseluruh kabupaten, dan kota
5	Tata Kelola	Melanjutkan reformasi birokrasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis pendidikan
		penerapan penganggarana berbasisi kinerja
		penguatan akuntabilitas sistem keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pendidikan
		penguatan akuntabilitas sistem pengawas internal Dinas Pendidikan

5.2.5 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Tahun 2014 - 2019

Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untukmenentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan periode tiga tahunyang akan datang. Berikut ini akan diuraikan beberapa arah kebijakan bidang pendidikan sesuai dengan revisi RPJMD adalah : (1) Meningkatkan kualitas SDM Pendidikan dan Kepariwisataan sebagai penyedia layanan yang profesional yang akan menjadi ujung tombak peningkatan pelayanan dasar pendidikan; (2) Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana tingkat dasar dan menengah sebagai mana yang tertuang dalam SPM bidang pendidikan tingkat dasar dan menengah untuk pendidikan umum dan kejuruan. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tersebut diperioritaskan pada wilayah yang aksebilitas dan kualitas pendidikannya yang masih rendah; (3) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran; (4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pendidikan. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui stategi peningkatan strategis peningkatan akses pelayanan pendidikan yang meliputi : (1) Peningkatan pemerataan dan relevansi pendidikan; (2) Peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaanya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (3) Peningkatan profesionalisme, kualitas pengelolaan dan penempatan guru; (4) Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini; (5) Peningkatan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan ketetrampilan kerja. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat tersebut ditandai oleh salah satu indikator yaitu peningkatan rata-rata lama sekolah. Untuk pendidikan berikut menggambarkan keterkaitan antara strategi umum dan arah kebijakan dari Dinas pendidikan yang akan ditempuh dalam periode tiga tahun kedepan (2014-2019) dan dalam rangka mewujudkan visi misi dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan

Strategi Umum	Arah Kebijakan
Penyediaan tenaga pendidik Berkompetenyang merata di seluruh kabupaten, dan kota	a. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik b. Peningkatan mutu lembaga pendidikantenaga kependidikan (LPTK) dan lulusannya
Penyediaan manajemen satuan pendidikan berkompeten yang merata di seluruh kabupaten, dan kota	c. Pemberdayaan Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah
Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	d. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa e. Pengembangan pendidikan yangmembangun manusia yangberjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha
Penyediaan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal	f. Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pendidikan
Penyediaan dan peningkatan saranadan prasarana pendidikan berkualitas yang merata di seluruh kabupaten, dankota	g. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan h. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan i. Penyediaan buku teks murah
Penyediaan subsidi untukMeningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan berkualitas yang merata di seluruhkabupaten, dan kota	j Rasionalisasi pendanaan pendidikan dan penelitian k. Pemberdayaan masyarakat dan duniausaha
Penataan struktur organisasi untukmenjamin tercapainya tujuan dansasaran strategis pendidikan	m. Melanjutkan reformasi birokrasi n. Koordinasi antar Kementrian dan/atauLembaga Pemerintah pusat dan daerah
Penerapan Penganggaran BerbasisKinerja	

Penguatan akuntabilitas sistem keuangan dan pengelolaan Aset di lingkungan Dinas Pendidikan	
Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal Kemdikbud	
Strategi Umum Gabungan	o. Akselerasi Pembangunan Pendidikan di daerah Perbatasan,Tertinggal, Terpencil dan Rawan Bencana (3T)
	p. Penyelarasan pendidikan dengankebutuhan dunia usaha dan dunia industri

Arah kebijakan tersebut sebagian sama dengan kebijakan terobosan yang dipergunakan Kemdikbud dan Dinas Pendidikan selama periode 2014-2019. Kebijakan teroboson yang dilanjutkan diantaranyakebijakan yang telah dilaksanakan dan berhasil dengan beberapa penyesuaian dan penekanan pada periode 2014-2019. Selain itu, juga diperkuat dengan berbagai kebijakan terobosanbaru sesuai dengan tuntutan yang ada untuk dijadikan arah kebijakan pembangunan Pendidikan Provinsi Riau tahun 2014-2019.

5.2.6 Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu dilakukan koordinasi secara nasional, regional, dan/atau antar Dinas dan antar instansi terkait, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan internal di lingkungan Dinas Pendidikan. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra Revisi pendidikan pada tingkat provinsi dilakukan melalui Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi, rapat kerja perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pendidikan lintas SKPD. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan pendidikan antara lain adalah Kemdikbud, Kementerian Agama, Bappeda, Pemerintah Kabupatan dan Kota, serta SKPD lain yang mengelola program, kegiatan dan anggaran fungsi pendidikan.

Implementasi Renstra Revisi Dinas Pendidikan 2014-2019 oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan SKPD lain terkait menuntut

pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja pendidikan. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra Revisi mencakup kegiatan penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

Pengendalian terhadap implementasi Renstra Revisi dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat dan badan pengawas daerah . Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra Revisi sesuai dengan sistem tata kelola Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja/bidang/SKPD yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Revisi Dinas Pendidikan. Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu atasan langsung dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan Pemerintah Provinsi. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung jawab kepada DPR RI.

5.2.7 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementsi Renstra Revisi. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah

ditetapkan dalam Renstra Tahun 2014-2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program pendidikan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; 2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; 3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan handal; 4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; 5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); 6) pelaksanaan dapat dipertanggung awabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); 7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; 9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 10) berbasis indikator kinerja; dan 11) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: 1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; 2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah; 3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan kabupaten dan kota, dinas pendidikan kecamatan, dan satuan pendidikan.

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Dinas Pendidikan meliputi: 1) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, 2) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Dinas Pendidikan, 3) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, 4) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, dan 5) evaluasi akhir masa Renstra.

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi

dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang, yaitu pemantauan dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi (bidang) , oleh Dinas Pendidikan kabupaten dan kota, satuan pendidikan serta oleh Badan Akreditasi provinsi, hal ini dolakukan dengan maksud untuk: 1) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan provinsi, kabupaten dan kota; 2) memperbaiki kinerja aparatur Pemda provinsi/ Kabupaten dan Kota, Kecamatan, dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; 3) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda provinsi, pemda kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi; 4) untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja; 5) mengevaluasi capaian Standar Nasional Pendidikan; 6) untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional serta membantu BANSM, BANPNF,dan BANPT dalam mengakreditasi satuan pendidikan.

5.2.8 Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu

Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara terpadu yang mampu meningkatkan pelayanan dan mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan, pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau khususnya dilingkungan Dinas Pendidikan perlu diperhatikan hal-halsebagai berikut: 1) Strategi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi harus selaras dengan Visi dan Misi Pemda Riau 2) Sistem dan Teknologi Informasi Disdik harus mampu mendukung manajemen Disdik dalam mengambil keputusan secara cepat, efisien dan efektif termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi. 3) Sistem dan Teknologi Informasi Disdik harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai

perubahan termasuk dilakukannya reformasi birokrasi dan organisasi. 4) Sistem dan Teknologi Informasi Disdik harus menjamin keamanan dan kesahihan data serta menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data sehingga tidak terjadi *data redundancy*. 5) Sistem dan Teknologi Informasi Disdik harus mampu menjadi sarana untuk mendukung pemberian layanan pendidikan termasuk e-pembelajaran,e-knowledgesharing dan e- sumber belajar; 6) Sistem dan Teknologi Informasi disdikbud harus mendukung tercapainya Sistem Tata Kelola Disdik termasuk sistem pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang handal, efektif dan efisien; 7) Guna menjamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan *Master Plan* Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Disdik yang selaras dengan rencana strategis Kemdikbud dan rencana strategis Disdik kabupaten dan kota.

Tabel TC-26
Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Layanan Mutu Pendidikan Provinsi Riau yang Berdaya Saing		
MISI	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan		
Tujuan		**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan
			2. Meningkatkan mutu layanan pendidikan
			3. Meningkatkan kesesuaian layanan pendidikan dengan lapangan pekerja
			4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pendidikan
			5. Meningkatkan tata kelola manajemen layanan pendidikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan yang secara langsung menunjukkan rencana program yang akan dicapai Dinas Pendidikan dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Riau.

Pendidikan merupakan salah satu parameter di dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pendidikan diukur berdasarkan dua indikator utama yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat dari 8,49 tahun menjadi 8,59 tahun untuk penduduk usia 25 tahun keatas dan harapan lama sekolah (HLS) meningkat dari 12,74 tahun menjadi 12,86 untuk penduduk mulai usia sekolah. Biro Pusat Statistik (BPS) menyusun indeks pendidikan dengan acuan dalam mengukur indeks pembangunan manusia di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan dua indikator yaitu Angka Melek Aksara dan rata-rata lama sekolah. IPM Provinsi Riau menempati urutan ke 3 dari 33 Provinsi di Indonesia dengan nilai 7,83. Dalam rangka memberikan layanan dasar di bidang pendidikan sebagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyelenggarakan program – program pembangunan bidang pendidikan yang diorientasikan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program Gubernur, program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Menengah

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan dan Meningkatjkan Ketersediaan dan Pemertaan Pelayanan Pendidikan Menengah. Target kinerja yang telah dicapai Tahun 2017 dan akan dicapai pada Tahun 2019 yang sesuai dengan RPJMD adalah: APK SMA/ MA/ SMK/ SMLB/ Paket C sebesar 92,37% pada Tahun 2016 dan 93,41% di Tahun 2017, APM SMA/ MA/ SMK/ SMLB/ Paket C sebesar 69,38% pada Tahun 2016 dan 70,43% di Tahun 2017 ,APS SMA/ MA/ SMK/ SMLB/ Paket C (16-18) di tahun 2016 sebesar 72,45% dan 75,57% di Tahun 2017, Rasio Siswa terhadap Guru SMA/MA/SMK adalah 1:19,8 pada Tahun 2016 dan 1:21 Tahun 2017, Rasio Siswa Terhadap Kelas SMA/ MA/ SMK 1:31,2 pada Tahun 2016 menjadi 1:32

pada Tahun 2017 dan Rasio Guru terhadap kelas SMA/MA/SMK sebesar 0,77:1 menjadi 1:1 pada tahun 2018

2. Program Pembangunan Sekolah terpadu

Program Pembangunan Sekolah Terpadu dilakukan untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan mutu pendidikan Terjaminnya Layanan Pendidikan bermutu Bagi Daerah Terdepan, Terjauh, dan Tersulit (3T) untuk Keluarga Miskin, dengan sasaran terjangkaunya layanan pendidikan bermutu bagi anak di daerah 3T, dengan indikator Sasaran/Kinerja terbangunnya Sekolah Terpadu (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) di 3 Kabupaten (Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hilir dan Indragiri Hilir) di Tahun 2017. Program ini adalah merupakan program baru sehingga capaian kinerja Tahun 2017 masih kondisi 0 dengan kata lain di 12 kabupaten/Kota se provinsi Riau belum ada sekolah terpadu

3. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah program yang dilakukan untuk mencapai tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Pemerataan Pelayanan Pendididkan Menengah dengan capaian indikator APK dan APM pada jenjang pendidikan dasar (SD/ MI/ SDLB/ Paket A dan SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B) dan jenjang pendidikan menengah (SMA/ MA/ SMK/ SMALB/ Paket c), sama dengan capaian pada program pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana uraian tersebut diatas

4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Layanan Pendidikan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan. Indikator kinerja sesuai dengan RPJMD adalah persentase sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) yang melaksanakan Manajemen berbasis Sekolah (MBS) dengan baik dan persentase sekolah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) yang terakreditasi. Capaian Tahun 2016 dari indikator tersebut adalah 0 untuk sekolah sekolah yang melaksanakan MBS dengan baik, hal ini disebabkan karena tidak ada data pendukung mengenai hal ini. Tahun 2017 capaian kinerja untuk indikator ini adalah

sebesar 50%. Untuk jenjang SMA/MA/SMK di tahun 2016 sekolah yang terakreditasi sebesar 65,1% dan di tahun 2017 ditargetkan mencapai 85%.

Program dan Bidang/UPT Pelaksana

No	Program	Bidang/UPT Pelaksana
1	Program Pendidikan Menengah	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan
2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan
3.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
4	Program Pengembangan Data/Informasi	Sekretariat

Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

6.1.1 Program Pendidikan Menengah

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan ke 1 yaitu Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Berkesetaraan dan Berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut:

a. penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh kabupaten, dan kota;

b. penyediaan manajemen satuan pendidikan, pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh kabupaten, dan kota

c. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan menengah, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan menengah;

d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA/MA/Paket C bermutu yang merata di seluruh kabupaten, dan kota;

e. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK/Paket C Kejuruan bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh kabupaten, dan kota;

f. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMLB/SMK/Paket C bermutu yang merata di seluruh kabupaten, dan kota; dan

g. penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket C berkualitas yang merata di seluruh kabupaten, dan kota.

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Menengah

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal (2013)	Tahun				
			2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	90,84	91,35	91,85	92,37	92,87	93,41
2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	67,82	68,34	68,86	69,38	69,90	70,43
3	APS SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C (16-18)	66,20	67,45	68,70	69.95	71,20	72,45
4.	Angka Putus Sekolah	0,34	0,27	0,20	0,13	0,07	0
5.	Angka Kelulusan	99,59	99,62	99,65	99,68	99,71	99,75
6.	Angka Rata-Rata UN	7,57	7,60	7,64	7,68	7,71	7,75
7	Rasio Siswa terhadap	1:18	1:18,6	1:19,2	1:19,8	1:20,4	1:21

	Guru SMA/MA/SMK						
8	Rasio Siswa Terhadap Kelas SMA/MA/SMK	1:30	1:30,4	1:40,8	1:31,2	1:31,6	1:32
9	Rasio Guru terhadap kelas SMA/MA/SMK	0,44:1	0,55:1	0,66:1	0,77:1	0,88:1	1:1
10	SMA/MA/SMK yang menerapkan kurikulum 2013	0	15	30	35	45	75
11	SMA/MA/SMK yang berakreditasi	92,41	92,92	93,43	93,94	94,45	95
12	SMA/MA/SMK yang memenuhi SPM	0	18	36	54	72	90
13	Guru SMA/MA/SMK berkualifikasi Akademik S1/D4	92,64	93,11	93,58	94,05	94,52	95
14	total medali yang diperoleh dari kompetisi tingkat pendidikan menengah	4	5	6	8	9	10

Pencapaian target Program Pendidikan Menengah dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Rehab sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
2. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Terpadu
3. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dan SMK
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk SMK 4 Tahun
5. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
6. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kabupaten/
7. Revitalisasi Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
8. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran melalui:
    1) Pengadaan Peralatan Praktik Survei dan Pemetaan
    2) Pengadaan Peralatan Komputer Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer SMA

3) Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Fisika, Labor IPA dan Labor Kimia

4) Pengadaan Alat Peraga IPA SMA, Alat Labor Biologi IT dan Alat Perpustakaan Terintegrasi

5) Pengadaan Alat Praktek Komputer Jaringan SMA/SMK

6) Pengadaan Alat Praktek Jurusan Agribisnis dan Tanaman Perkebunan

7) Pengadaan Alat Praktek Program Keahlian Sekretaris.

8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Workshop Mesin.

9. Peningkatan Prestasi Minat dan Bakat Siswa SMA/SMK, melalui kegiatan:

1) Pembinaan Minat Bakat Siswa SMA/SMK

2) Cerdas Cermat

10. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui:

1) Pembinaan pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA/MA dan SMK

2) Pelatihan Kompetensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pembelajaran SMA/MA/SMK

3) Lomba Guru, Pengawas, kepala Sekolah berprestasi dan berdedikasi

4) Pelatihan tata kelola Tenaga Laboran, Pengawas dan Pustakawan SMA/MA/SMK

6.1.2 Program Pembangunan Sekolah Terpadu

Program Pembangunan Sekolah Terpadu dilakukan untuk mewujudkan Tujuan Strategi ke 4 yaitu Terjaminnya Layanan Pendidikan bermutu Bagi Daerah Terdepan, Terjauh, dan Tersulit (3T) untuk Keluarga Miskin, dengan sasaran terjangkaunya layanan pendidikan bermutu bagi anak di daerah 3T, dengan indikator Sasaran/Kinerja terbangunnya Sekolah Terpadu (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) di 4 Kabupaten (Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Pelalawan), dicapai dengan menggunakan strategi utama mendirikan sekolah terpadu dan strategi lainnya antara lain adalah:

a. penyediaan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non formal);

b. penanganan akses pendidikan di daerah 3T secara lintas sektor;

c. penyediaan bantuan terutama bagi siswa miskin untuk tidak putus sekolah;

d. penguatan sistem pendataan di setiap kabupaten/kota untuk memperkuat perencanaan pendidikan

e. menyediakan SMA/SMK/MA terutama di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan tersebut baik negeri maupun swasta;

f. pemihakan pada siswa miskin untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah;

f. penjaminan seluruh satuan pendidikan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran;

g. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah;

h. penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses pada anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler;

i. pemenuhan secara bertahap SPM pendidikan menengah oleh pemerintah kab/kota dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama
Program Pembangunan Sekolah Terpadu

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal (2013)	Tahun				
			2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1.	APK SD/SDLB/Paket A	115,2	115,4	115,6	115,8	116,0	116,2
2.	APK SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	106,24	106,7	107,2	107,5	107,8	108,1
3	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	67,82	68,34	68,86	69,38	69,90	70,43
4	Jumlah sekolah terpadu di kab/kota	0	0	2	2	0	4

Pencapaian target Program Pembangunan Sekolah Terpadu dicapai melalui kegiatan pembangunan sekolah terpadu terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK

lengkap dengan Asrama dan fasilitas sarana prasarananya di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Pelalawan

6.1.3 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah program yang dilakukan untuk mencapai tujuan ke 5 yaitu Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang Bermutu, Berkesetaraan dan Berkesesuaian akan dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

a. penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan untuk pendidikan khusus dan layanan khusus berkompeten yang merata di seluruh kabupaten, dan kota;
b. penyediaan manajemen satuan pendidikan khusus dan layanan khusus berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
c. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran
d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang merata di seluruh kabupaten, dan kota;
e. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan khusus dan layanan khusus bermutu yang merata di seluruh kabupaten, dan kota; dan

Pencapaian target Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Pembangunan Asrama Putra Putri PKPLK
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PKPLK
3. Pembangunan Gedung dan Lapangan Futsal Indoor SMA Olahag
4. Peningkatan Kuantitas, kesejahteraan dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui kegiatan:
    1) Teknikal Asistensi Penguatan TPK Provinsi Riau
    2) Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau

3) Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau

4) Penyelenggaraan SMA Pintar

5) Pembayaran Honor PTK PKPLK

6) Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh

7) Penyelenggaraan Pendidikan AkademiKesehatan Provinsi Riau

8) Penyelenggaraan Penunjang Layanan Mutu Pendidikan PKPLK

9) Pendidikan Parenting Bagi Masyarakat

10) Pengembangan Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP) Pendidikan PKPLK

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana melalui:

1) Rahabilitasi Sarana dan Prasarana PKPLK

2) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Pendidikan PKPLK

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Pembelajaran PKPLK

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan PKPLK

5) Pengadaan Meubiler PKPLK

6) Pengadaan Meubiler Asrama PKPLK

7) Pengadaan Peralatan Salon dan Tata Rias PKPLK

8) Pengadaan Sarana Perlengkapan Sekolah Korban Bencana PKPLK

5. Pengembangan Pusat Layanan Autis (PLA) Provinsi Riau melalui kegiatan:

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis (PLA)

2) Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis (PLA)

3) Pembuatan Landscape Pusat Layanan Autis se Provinsi Riau

4) Rapat Koordinasi PKPLK

5) Pembuatan Landscape SMA Olahraga Provinsi Riau

6. Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB

7. Pemilihan Pendidik dan tenaga Kependidikan PKLK berprestasi dan berdedikasi

8. Peningkatan prestasi lembaga pendidikan khusus dan layanan khusus melalui:

1) Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka PKPLK

2) Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKLK

3) Bimtek Pendidikan Penanggulangan Resiko Bencana PKLK

4) Gerakan Literasi PKLK

5) Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK

6.1.4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Layanan Pendidikan dilaksanakan untuk mencapai tujuan ke 9, yaitu Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

a. penguatan kelembagaan, prosedur kerja, dan sumber daya manusia pada Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan;

b. penguatan sistem perencanaan di lingkungan Dinas pendidikan; dan

c. penguatan sistem pencatatan dan pelaporan di lingkungan Dinas Pendidikan

Strategi lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan program ini dan dapat juga dipakai sebagai strategi dalam menjalannkan program non urusan wajib, adalah:

a. peningkatan layanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum Dinas Pendidikan;

b. peningkatan layanan prima dalam pengadaan dan penataan aset serta sarana dan prasarana Dinas Pendidikan;

c. peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta kerja sama dinas terkait dan dunia usaha dan industri;

d. peningkatan pelayanan prima bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas;

e. peningkatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang andal;

f. peningkatan layanan prima di bidang hukum dan organisasi;

g. penyediaan data dan statistik pendidikan;

h. peningkatan layanan prima di bidang informasi dan kehumasan;

i. pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendayagunaan e-pembelajaran dan e-administrasi;

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 6.2

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Utama Program Manajemen Layanan Pendidikan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal (2013)	Tahun				
			2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	Persentase sekolah yang melaksanakan MBS dengan baik pada semua jenjang pendidikan	0	10	20	30	40	50
2.	Persentase sekolah yang terakreditasi pada semua jenjang pendidikan						
	SD/MI	22,57	28,05	33,53	39,01	44,49	50
	SMP/MTs	18,77	23,76	28,75	33,74	38,73	43,73
	SMA/MA/SMK	92,41	92,92	93,44	93,96	94,48	95
3.	Opini Audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang kurangnya 79	47,76	51,16	54,61	58,06	61,51	65
5.	Realisasi penyerapan anggaran 100% setiap tahunnya	98	98,00	98,50	99,00	99,5	100

Pencapaian target Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan sub kegiatan:

   1) Diklat Calon kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)

   2) Diklat calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

2. Implementasi Kooordinasi pelaksanaan dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dikdas dan Dikmen Provinsi Riau

3. Dukungan Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dan UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

4. Pelaksanaan Hari-Hari besar Nasional

5. Pengendalian dan Pelaporan Program/Kegiatan

6. Penguatan perencanaan program dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

7. Pembayaran Honor Guru Bantu Dikdas dan Dikmen Provinsi Riau

8. Penyuluhan Bahaya Narkoba, Radikalisme, Lalulintas dan Korupsi

   Bagi Pelajar Se- Provinsi Riau

9. Kualifikasi S2 Terakreditasi

10. Pemberian Penghargaan kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan kependidikan berprestasi se Provinsi Riau

11. Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Serta Pelaporan BOS Se- Provinsi Riau

Selain melaksanakan program-program wajib bidang pendidikan sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendidikan Provinsi Riau melaksanakan program dan kegiatan non urusan wajib yaitu: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur; 5) Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai barikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan dari program ini adalah:

1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3) Penyediaan jasa kebersihan kantor
4) Penyediaan alat tulis kantor
5) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8) Penyediasan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9) Penyediaan makanan dan minuman
10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11) Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerimaan bantuan hibah dan bantuan sosial
12) Belanja surat khabar, majalah, sosialisasi dan publikasi
13) Penyediaan jasa keamanan kantor dan tenaga administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan dari program ini adalah:

1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan dari program ini adalah:

1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2) Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan dari program ini adalah:

1) Pendidikan dan pelatihan formal
2) In House Training Diklat Perencanaan dan Keuangan
3) Peningkatan Sistem Manajemen SDM
4) Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Penyempurnaan
5) Pembinaan Jasmani dan Rohani

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kegiatan dari program ini adalah:

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
3) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
5) Penyusunan Laporan Aset

6.2 Pendanaan Indikatif

Guna mendukung keberhasilan yang terukur implementasi program-program Pendidikan perlu diatur beberapa hal pendukung sebagai berikut: 1) strategi pendanaan pendidikan dan kebudayaan; 2) sistem koordinasi, tata kelola dan pengawasan internal; 3) sistem pemantauan dan evaluasi dan 4) sistem dan teknologi informasi terpadu.

6.3 Strategi Pendanaan Pendidikan

Amandemen UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang dasar tersebut, undang- undang Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan menunjukkan pembagian peran Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah.

Selain menjadi tanggung jawab penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab tersebut adalah 1) biaya pribadi peserta didik; 2) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; 3) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; 4) pendanaan biaya non personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan 5) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Tabel 6.3

Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH TINGGI
I	**Biaya Investasi Satuan Pendidikan**		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
II	**Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan**		
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	**Biaya Operasi Satuan Pendidikan**		

1	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2	Biaya Non personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
IV	**Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan**		
1.	Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalia	Pemerintah/Pemda	
V	**Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa**	Pemerintah/Pemda	
VI	**Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri**	Pemerintah	

Sumber Renstra Kemendikbud

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Pendanaan masyarakat tersebut diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 6.4

Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH TINGGI
I	**Biaya Investasi Satuan Pendidikan**		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Tambahan sampai menjadi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy di luar orang tua/ Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan	Penyelenggara/Satuan

		Pendidikan/Masy	Pendidikan/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy diluar orang tua/ Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
II	**Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan**		
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
III	**Biaya Operasi Satuan Pendidikan**		
1	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. diluar orang tua/ Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
2	Biaya Non Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan /Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/ Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
IV	**Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan**		
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Nonpersonalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
V	**Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa**	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy diluar orang tua/ Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	

Sumber Renstra Kemendikbud

Pendanaan pendidikan dalam kurun waktu 2014-2019 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005-2025, yaitu 1) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; 2) penguatan desentralisasi dan tonomi pendidikan; dan 3) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan tersebut bertujuan mewujudkan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggung jawab pendanaan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

Perkiraan anggaran pembangunan pendidikan untuk melaksanakan fokus prioritas program pembangunan pendidikan Provinsi Riau pada Dinas Pendidikan, serta anggaran pendidikan yang dialokasikan ke kabupaten, dan kota dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 6,5%-8,0% dan tingkat inflasi berkisar antara 4,8%-5,3% sesuai yang ditargetkan Pemerintah Provinsi dalam

RPJMD, seperti dirangkum dalam Tabel 6.4 terlampir. Perkiraan pendanaan fungsi pendidikan dan kebudayaan dalam Tabel 6.4 sebagaimana terlampir adalah didasarkan pada angka perkiraan *baseline* tahun 2014 dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mencapai sasaran Renstra Pembangunan Pendidikan diperlukan peran serta Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Kota, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemenuhan pendanaan pendidikan.

Pada Tabel 6.1 (tc-28) Tentang Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel t-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			DINAS PENDIDIKAN			**425,598**		**555,003**		**742,474**		**744,627.62**		**621,369.58**		**3,089,072**
Peningkatan kualitas dan kapasitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**			**10,538**		**19,030**		**18,711**		**11,578**		**8,164**		**68,022**
				IKU												
				Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Selama 12 Bulan)		10,538		19,030		**18,711**		**11,578**		**8,164**		**68,022**
			Kegiatan :	**IKK**												
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	40										40
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	1,469	12 Bulan	4,958	12 Bulan	3,000	12 Bulan	3,000	12 Bulan	1,527	60 Bulan	13,954
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	12 Bulan	829	12 Bulan	1,735	12 Bulan	1,250	12 Bulan	1,300	12 Bulan	740	60 Bulan	5,853
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor untuk Dinas Pendidikan Provinsi Riau	12 Bulan	900	12 Bulan	1,642	12 Bulan	980	12 Bulan	978.47	12 Bulan	504	60 Bulan	5,004
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Terpenuhinya Cetak dan Penggandaan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Riau	12 Bulan	200	12 Bulan	395	12 Bulan	435	12 Bulan	305	12 Bulan	336	60 Bulan	1,670
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		-	12 Bulan	200	12 Bulan	200	12 Bulan	200	12 Bulan	46	48 bulan	646
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau	12 Bulan	3,153	12 Bulan	5,432	12 Bulan	1,746	12 Bulan	500	12 Bulan	441	60 Bulan	11,272
			Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan	600	12 Bulan	594	12 Bulan	600	12 Bulan	250	12 Bulan	420	60 Bulan	2,464
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	200	12 Bulan	100	12 Bulan	100				-	36 Bulan	400
			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah dan luar daerah	12 Bulan	1,000	12 Bulan	941	12 Bulan	1,500	12 Bulan	1,000	12 Bulan	756	60 Bulan	5,197
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Keamanan Kantor dan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,079	12 Bulan	1,789	12 Bulan	1,800	12 Bulan	1,500	12 Bulan	991	60 Bulan	7,159
			Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	Penyampaian informasi pendidikan malalui liputan langsung media surat kabar dan majalah serta terwujudnya sosialisasi dalam hasil karya pendidikan dan pemberitaan pendidikan	12 Bulan	310	12 Bulan	445	12 Bulan	500	12 Bulan	200	12 Bulan	95	60 Bulan	1,550

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
kelembagaan dan aparatur perencana	dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan		Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial			-	12 kab/kota	800						-	12 kab/kota	800
			Penyelenggaraan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 12 Kab/Kota	Tersedianya biaya penunjang UPT		-			12 Kabupaten/ kota	6,000	12 Kabupaten/ kota	1,844.98	11 kab/kota	2,309	35 kab/kota	10,154
			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	758			12 Bulan	600	12 Bulan	500		-	36 Bulan	1,858
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			**4,517**		**15,809**	88	**1,650**		**1,494**		**809**		**24,279**
				IKU										**-**		
				Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang Memadai Sebanyak 100%		**4,517**			12 Bulan	**1,650**	12 Bulan	**1,494**		**809**		**24,279**
			Kegiatan :	**IKK**										**-**		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	12 Bulan	200	12 Bulan	467	3 Ruang	500	4 ruang	493.50		294	12 Ruang	1,954
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	552	12 Bulan	917	12 Bulan	500	12 Bulan	500	12 Bulan	314	60 Bulan	2,783
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	12 Bulan	300	12 Bulan	663	20 Kali	650	20 Kali	500		168	72 Kali	2,281
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Penyediaan Sarana Kearsipan			-		-					1 Kegiatan	34	1 Kegiatan	34
			Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung Kantor	Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung Kantor	12 Bulan	965	12 Bulan	13,762						-	24 Bulan	14,727
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	2,500								-	12 Bulan	2,500
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			**720**		**351**						**-**		**1,071**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya											-		-
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu		510 Orang	720								-	510 Orang	720
			Pengadaan pakaian Olahraga dan perlengkapannya				510 Orang	351						-	510 Orang	351
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			**1,875**		**1,882**	93	**1,428**		**650**		**389**		**6,225**
			Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan bagi PNS Dinas Pendidikan		350	50 Pns	347	1 Kegiatan	200	10 orang	250		62	130 orang	1,209
			Peningkatan Sistem Manajemen SDM	Jumlah Sistem Database Guru menengah atas (Software)	1 Kegiatan	200		-	1 Kegiatan	198				-	2 Kegiatan	398
			In House Training Diklat Perencanaan dan Keuangan	personal mengerti dan memahami tentang tentang cara merencanakan dan mengelola administrasi Keuangan	60 Orang	250	60 orang	330	60 orang	330	-	-	-	-	180 Orang	910
			Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terwujudnya SDM Kantor Dinas yang sehat dan peningkatan terhadap keagamaan	12 Bulan	250	12 Bulan	667	12 Bulan	400	12 Bulan	400	12 Bulan	160	60 Bulan	1,876
			Peningkatan Pelaksanaan Kerja Pengawas Sekolah			-		-					134 orang	168	134 orang	168
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyempurnaan	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih sempurna	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	-	-		-	3 Kegiatan	900

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pendidikan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pengawas Pendidikan	26 Orang	250	36 orang	239						-	62 Orang	489
			Penyelenggaraan Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi		1 Kegiatan	275		-						-	1 Kegiatan	275
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPOARAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			**493**		**500**		**550**		**-**		**-**		**1,543**
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau	1 Dokumen	105	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100				-	3 Dokumen	305
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	75	1 dokumen	100	1 Dokumen	100				-	3 Dokumen	275
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terpenuhinya Laporan Akhir Tahun	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 Dokumen	100				-	3 Dokumen	300
			Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja SKPD Provinsi Riau	1 dokumen	113	1 dokumen	100	1 Dokumen	100				-	3 Dokumen	313
			Penyusunan Laporan Aset	Tersedianya Laporan Aset	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 Dokumen	150				-	3 Dokumen	350
			Penyusunan Dokumen Renstra											-		
			Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Provinsi Riau											-		
			Program Pendidikan Anak Usia Dini			**11,071**		**10,366**						**-**		**21,437**
			Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD		200 Orang	800								-	200 Orang	800
			MONEV PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal)		665 Orang	1,356								-	665 Orang	1,356
			Kompetensi PTK PAUD		50 Orang	425								-	50 Orang	425
			Pelatihan Berjenjang Dasar, Lanjutan dan Mahir Bagi PTK PAUD		136 Orang	950								-	136 Orang	950
			Alat Permainan Edukasi Indoor/Dalam		200 Lembaga paud	850	5 lembaga	200						-	200 Paud	1,050
			Gebyar PAUD		14 Medali	1,800	14 Medali	1,957						-	28 Medali	3,757
			Pembangunan Gedung Paud Raudhatul Jannah Kel. Sidomulyo Barat Tampan		1 Sekolah	400								-	1 Sekolah	400
			Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Alhikmah Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu (3 Ruang)		3 Ruang	500								-	3 Ruang	500
			Manajemen Peningkatan dan Pengembangan serta Monitoring dan Evaluasi Mutu Pendidikan		1 Kegiatan	1,005								-	1 Kegiatan	1,005
			Sosialisasi Standar PAUD		60 Orang	243								-	60 Orang	243

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Workshop PAUD Terakreditasi		60 Orang	220								-	60 Orang	220
			Seminar Kompetensi Orang Tua sebagai Pendidikan PAUD		120 Orang	367								-	120 Orang	367
			Lomba Gugus dan Lembaga PAUD			-	72 Lembaga	234						-	72 Lembaga	234
			Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Murid dan Guru PAUD			-	12 cabang	1,816						-	12 Cabang	1,816
			Pendidikan dan Pelatihan Parenting PAUD			-	108 Orang	372						-	108 Orang	372
			Bimtek Kurikulum 2013 bagi PTK (Guru, Pengawas, dan Kepala PAUD)			-	264 Orang	973						-	264 Orang	973
			Diklat Penguatan Supervisi bagi Pengawas dan Penilik PAUD			-	110 Orang	372						-	110 Orang	372
			Diklat Pengawas TK/SD			-	108 Orang	372						-	108 Orang	372
			Pelatihan Tata Keloka Kepala PAUD			-	100 Orang	371						-	100 Orang	371
			Diklat Uji Kompetensi Pendidik PAUD		312 Orang	1,104	120 orang	539						-	432 Orang	1,643
			Pendidikan dan Pelatihan Uji Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Tingkat Dasar			-	400 Orang	1,580						-	400 Orang	1,580
			Pendidikan dan Pelatihan Uji Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Tingkat Lanjutan			-	400 Orang	1,580						-	400 Orang	1,580
			Training of Trainers Diklat Berjenjang Tingkat Dasar PAUD			-								-		-
			Training of Trainers Diklat Berjenjang Tingkat Lanjutan PAUD			-								-		-
			Pengadaan Motor Pintar PAUD		2 Unit	150								-	2 unit	150
			Sosialisasi Pemanfaatan Motor Pintar PAUD		80 Orang	387								-	80 Orang	387
			Bimtek Pengelola PAUD Binaan PKK		100 Orang	514								-	100 Orang	514

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Tersedianya dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang bermutu, berkesetaraan dan Berkesesuaian	Terselenggaraanya Pelayanan Pendidikan Menengah		**PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH**			**71,542**		**91,875**		**373,464**		**373,702**		**293,031**		**1,206,719**
				IKU										-		
				1. APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	72%		91.85%		92.37%		92.37%		78.30%			
				2. APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	75%		68.34%		68.86%		69.38%		62.92%			
				3. APS SMA/MA/SMK/SMALB (16-18 Tahun)	0.2		0.13		0.07		0		0			
				4. Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK/SMALB	12.00		14.16		14.16		14.15		14.44			
				5. Rasio murid terhadap kelas SMA/MA/SMK/SMALB	30.00		29.33		29.33		29.33		29.8	-		
				6. Rasio Guru terhadap kelas SMA/MA/SMK/SMALB	0.39		0.40		0.45		0.50		0.54	-		
			Kegiatan :	**IKK**										-		
			Pembangunan Asrama SMK Pertanian Terpadu											-		-
			Pembangunan USB SMK dan Kelengkapannya											-		-
			Pengadaan Mebeluer Sekolah	tersedianya Mobiler Sekolah	1 Kegiatan	2,640			1 Kegiatan	5,600				-	2 Kegiatan	8,240
			Pengadaan Mebeluer Sekolah SMK	tersedianya Mobiler Sekolah SMK							2 sekolah	2,550	11 Sekolah	4,445	13 Sekolah	6,995
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas SMA					25 ruang kelas	2,500	10 sekolah	1,750		-	42 Ruang	4,250
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK								1 Sekolah	4,500	8 Sekolah	3,372	9 Sekolah	7,872
			Sertifikasi Keahlian Bagi Siswa Tidak Mampu Dan Berprestasi										100 orang	1,469	100 orang	1,469
			Pembangunan Auditorium SMK/ Gedung Serbaguna SMK										5 unit	1,050	5 unit	1,050
			Diklat Kepala Sekolah SMK										120 orang	588	120 orang	588
			Revitalisasi SMA	Tersedianya Revitalisasi SMA			4 Sekolah	6,949	3 Sekolah	25,000			3 sekolah	3,117	10 Sekolah	35,066
			Revitalisasi SMK	Terlaksananya Revitalisasi Pembangunan SMK			4 Sekolah	2,543	3 Sekolah	6,300				-	7 Sekolah	8,843
			Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK	Terlaksananya Pembangunan USB			2 Unit	284	8 Unit	21,865			6 Unit	6,298	16 Unit	28,447
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	Tersedianya pembangunan RKB SMA				-	98 RKB	26,694	50 RKB	19,485	24 RKB	6,192	172 RKB	52,371
			Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	Terlaksananya Pembangunan RKB	1 Sekolah	864	52 ruang	11,508	60 Ruang	24,864	3 rkb	1,700	8 Rkb	2,138	126 rkb	41,074
			Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA					-			15 sekolah	5,726.88	14 Sekolah	2,099	29 Sekolah	7,826
			Pengadaan Sistem Pengujian Mandiri untuk Peningkatan Mutu Kompetensi Siswa					-			4 sekolah	162		-	4 Sekolah	162
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Biologi SMA	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana Labor Biologi SMA	6 Sekolah	2,500	1 Paket	2,140	Provinsi Riau	2,650	-	-	-	-	17 Sekolah	7,290
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Bahasa SMA	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana Labor Bahasa SMA	1 Paket	2,500								-	1 Paket	2,500

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Multimedia dan Perpustakaan SMA	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana Labor Multimedia dan Perpustakaan SMA		2,000	5 Sekolah	6,926						-	8 Sekolah	8,926
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Labor Pengawasan Mutu		2 Sekolah	1,200		-						-	2 Sekolah	1,200
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Labor Hama dan Penyakit Tanaman		3 Sekolah	2,500		-						-	3 Sekolah	2,500
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Labor Perikanan		3 Sekolah	3,000		-						-	3 Sekolah	3,000
			Lomba Guru, Pengawas Berdedikasi dan Berprestasi, Kepala Sekolah Berprestasi serta Pengawas Berdedikasi Daerah Terpencil SMA/SMK		96 Orang	400		-						-	96 Orang	400
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA	Tersedianya sarana Prasarana Labor IPA		-		-	-	-				-		-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Kimia SMA	Tersedianya sarana dan prasarana Labor Kimia SMA	1 kegiatan	1,500	1 kegiatan	5,155	1 Kegiatan	3,150	-	-		-	3 kegiatan	9,805
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Fisika SMA	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Labor Fisika SMA	1 kegiatan	1,500	1 kegiatan	5,328	1 Kegiatan	3,150	-	-		-	3 kegiatan	9,978
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Praktek Tatabusana		1 Sekolah	500		-						-	1 Sekolah	500
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK di Kab. Rokan Hulu		1 Sekolah	750		-						-	1 Sekolah	750
			Pembangunan Kantor SMK		1 Unit	300		-						-	1 Unit	300
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Teknologi Workshop Otomotif	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Otomotif		-	7 paket	5,612	7 Paket	6,000				-	14 Paket	11,612
			Pengadaan Paket Trainer Teknik Roda 2 dan 4 berbasis Simulasi	Tersedianya Alat Praktek trainer roda 2 dan 4 berbasis simulasi		-		-	-	-				-		-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Sosial SMA	Tersedianya sarana dan prasarana Labor Sosial SM	1 Paket	1,500	1 Paket	1,408	1 Paket	1,500	-	-	-	-	2 Paket	4,408
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Teknologi Workshop Listrik	Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Workshop Listrik		-		-	5 Paket	3,444				-	5 Paket	3,444
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Teknologi Workshop Elektro	Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Workshop Elektro		-	4 Sekolah	2,825	5 Paket	2,537				-	10 Paket	5,362
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Administrasi Perkantoran			-	1 Sekolah	441						-	1 Sekolah	441
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Kelompok Bisnis Labor Multimedia dan Akuntansi	Terlaksananya Pengadaan Sarana & Prasarana Labor Multi Media	3 sekolah	2,500	5 Sekolah	2,782	5 Paket	4,448				-	13 Sekolah	9,731
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Pariwisata Ruang Praktek Perhotelan	Terlaksananya Pengadaan Saran & Prasarana Ruang Praktek Perhotelan	1 Sekolah	750	1 Sekolah	913	1 Sekolah	500				-	3 Sekolah	2,163
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Praktek Kecantikan	Terlaksananya Pengadaan Saran & Prasarana Ruang Praktek Kecantikan		-	1 Sekolah	692						-	1 Sekolah	692
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Agribisnis dan Agroteknologi Ruang Labor Kultur Jaringan	Terlaksananya Pengadaan Sarana & Prasarana Ruang Labor Kultur Jaringan		-		-	5 Paket	2,050				-	5 Paket	2,050

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Agribisnis dan Agroteknologi Ruang Labor Teknologi Hasil Pertanian	Terlaksananya Pengadaan & Prasarana Ruang Labor Teknologi Hasil Pertanian		-	5 paket	2,334	4 Paket	1,937				-	4 Paket	4,271
			Pengadaan peralatan bidang agrobisnis dan agroteknologi SMKN		SMKN 2 Pasir	350		-						-	1 sekolah	350
			Pengadaan Media Pembelajaran SMA	Terlaksananya Pengadaan Media Pembelajaran SMA	6 paket	230	6 paket	254	3 paket	1,200	10 paket	2,336	6 Paket	1,542	31 Paket	5,562
			Pengadaan Media Pembelajaran SMK	Terlaksananya Paket Pengadaan Media Pembelajaran SMK	1 Sekolah	230		-	12 Sekolah se Provinsi Riau	1,400	10 sekolah	10,500	10 Sekolah se Provinsi Riau	4,198	33 Sekolah	16,328
			Pengadaan e-Book untuk tingkat SMA		3 Paket	1,000		-						-	3 Paket	1,000
			Pengadaan e-Book untuk tingkat SMK		144 Unit	1,000		-						-	144 Unit	1,000
			Pembinaan Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Provinsi Riau Jenjang SMA/SMK		160 Unit	975	12 kab/kota	805						-	24 Kab/Kota	1,780
			TOT Instruktur Kurikulum 2013 SMA			-	150 Orang	968						-	150 Orang	968
			Diklat Calon Pengawas dan Sertifikat Pengawas SMA			-		-					50 Orang	484	50 Orang	484
			Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah SMA				40 orang	204							40 orang	204
			Diklat Tenaga Pengawas SMA			-	60 Orang	604						-	60 Orang	604
			Diklat Tenaga Pengawas SMK			-	36 Orang	276						-	36 Orang	276
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Menengah		5 Sekolah	20,000		-						-	5 Sekolah	20,000
			Pelatihan Kompetensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pembelajaran	Terlaksananya Training Of Trainers (TOT) Pengembangan Media Pembelajaran berbasis TIK bagi PTK SMA/SMK Se Provinsi Riau	120 Orang	425	50 orang	202	12 Kab/Kota	500			12 Kabupaten/ kota	618	48 Kab/kota	1,745
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK	Terselenggaranya pelatihan tata kelola tenaga laboran SMK		-	60 Orang	337						-	60 Orang	337
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMA	Terselenggaranya pelatihan tata kelola tenaga laboran SMA	12 kabupaten/kota	300	60 orang	387	60 org	350	-	-	216 Orang	468	336 Orang	1,505
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustakawan SMK	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Perpustakaan SMK		-	60 Orang	339						-	60 Orang	339
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustakawan SMA	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Perpustakaan SMA	12 kabupaten/kota	300	60 Orang	377	60 org	350	-	-	60 Orang	338	180 orang	1,364
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan SMA	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kependidikan Laboran, Pustakawan dan Pengawas	12 kabupaten/kota	300		-	-	-				-	12 Kab/kota	300
			Dukungan Pelaksanaan UN/UASBN SMA/MA/SMK		12 kabupaten/kota	1,450	12 kab/kota	1,400						-	24 Kab/kota	2,850

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Pembangunan Hotel Training	Terlaksananya Pembangunan Hotel Training	1 Sekolah	2,709	60 Orang	171	1 Sekolah	5,500	-	-	-	-	3 Sekolah	8,380
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK	40 orang	300		-	40 Orang	150	-	-	192 Orang	347	272 Orang	797
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustaka SMK	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustaka SMK	40 orang	300		-						-	40 Orang	300
			Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pengawas SMK	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pengawas SMK	40 orang	300		-	40 Orang	150	-	-	-	-	80 Orang	450
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan SMK	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kependidikan Laboran, Pustakawan dan Pengawas				-	-	-				-		-
			Pembangunan Ruang Kelas Baru Untuk SMK 4 Tahun				12 Ruang	3,100						-	12 Ruang	3,100
			Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Teknologi (MA/SMK) Provinsi Riau					-						-		-
			Penyelenggaraan SMK 4 Tahun	Terlaksananya Pembelajaran SMK Tahun ke 4	305 Orang	4,000	11 Program	323	11 program	500			8 program	716	41 Program	5,539
			Rehabilitasi SMA/SMK					-					7 Sekolah	1,428	7 Sekolah	1,428
			Penyelenggaraan Pendidikan SMK 4 Tahun				12 Bulan	177						-	12 Bulan	177
			Pembangunan USB SMA	Terlaksananya pembangunan USB SMA				-	3 Sekolah	6,000	2 Sekolah	3,400	1 Sekolah	20,153	6 Sekolah	29,553
			Penyediaan biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK	Terselenggaranya Ujian Kompetensi SMK	30,000 Siswa	565	30,000 siswa	565	24.250 Siswa	500			5000 siswa	226	89.250 siswa	1,856
			Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	Tersedianya Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	12 kabupaten/kota	1,500	12 kab/kota	1,000	330 org	663	342 orang	1,000	250 Orang	985	1584 Orang	5,148
			Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMK		175 Orang	1,000	250 orang	625					120 orang	301	545 orang	1,926
			Verifikasi dan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan Menengah SMA dan SMK		12 kabupaten/kota	1,500								-	12 Kab/kota	1,500
			Pelatihan Kompetensi tenaga Pendidik		60 Orang	400		-					100 orang	924	160 orang	1,324
			Pembinaan Kelembagaan Sekolah Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)					-					120 sekolah	385	120 sekolah	385
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Mata Pelajaran Kurikulum 2013 SMA	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik Mapel Kurikulum 2013				-	-	-				-		
			Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMA	Terlaksananya Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMA			70 orang	270	70 orang guru BK	270	-	-	100 orang	336	240 orang	876
			Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA	Terlaksananya Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA			70 orang	264	70 Orang	263	70 orang	200	-	-	210 orang	727
			Pelatihan Analisis Materi Esensial Mata Pelajaran UN SMA				se provinsi	296						-	12 kab/kota	296
			Pelatihan Pembelajaran Aktiv, Inovativ, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan bagi Tenaga Pendidik SMA				60 Orang	262						-	60 orang	262
			Pelatihan Pendalaman Materi Try Out SMA	Terlatihnya Pelatiihan Pendalaman Materi Try Out SMA			180 orang	672	216 guru mata pelajaran UN SMA	600				-	396 orang	1,272
			TOT Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK SMA				50 Orang	257						-	50 orang	257
			Pelatihan Guru Mata Pelajaran UN SMA/SMK				se provinsi	846						-	12 Kab/kota	846
			Training of Trainers Kurikulum 2013 SMK				180 Orang	951						-	180 orang	951

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	Terlaksananya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA Se Provinsi Riau			550 orang	305	12 Kab/Kota	2,700	12 Kab/Kota	273.45	12 Kab/Kota	665	48 kab/kota	3,943
			MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	Terlaksananya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMK Se Provinsi Riau			550 orang	305	12 Kab/Kota	2,700	12 Kab/Kota	314.06	12 Kab/Kota	366	48 kab/kota	3,685
			Diklat Tim Pengembang Kurikulum 2013 Dikmen				1 Paket	332						-	1 paket	332
			Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Berbasis Kompetensi				12 kab/kota	9,600						-	12 kab/kota	9,600
			Pelatihan Pendidikan Tata Kelola Administrasi SMK	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Administrasi SMK				-	40 orang	400	-	-	120 orang	275	160 orang	675
			Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS Daerah	Terlaksananya BOS Daerah untuk Siswa SMK				-	220.609 Siswa	133,747	175561 siswa dan 3645 guru	271,789.23		201,593		607,130
			Sertifikasi ANT IV dan ATT IV Siswa Nautika dan Teknika	Terlaksananya Sertifikasi ANT IV dan ATT Siswa Nautika dan Teknika				-	85 Orang	1,000	85 Orang			2,226		3,226
			Sosialisasi dan Pelatihan Assessor dalam rangka Pembentukan LSP-P1	Terselenggaranya Sosialisasi dan Pelatihan Assessor dalam rangka Pembentukan LSP-P1				-	112 orang	400	-	-	-	-		400
			Pendidikan Alih Profesi guru Adaptif menjadi guru Produktif kerjasama dengan UNRI/UIN/UNAND/UN	Terlaksananya Pendidikan Alih Profesi Guru Adaptif menjadi Guru Produktif				-	20 orang	1,000	20 orang		133 siswa	840	173 siswa	1,840
			Workshop Rencana Induk Pengembangan Sekolah	Terlaksananya Workshop Rencana Induk Pengembangan Sekolah				-	224 Orang	582	-	-		-	224 orang	582
			Focus Group Discussion Pemberdayaan Unit Produksi SMK dari Sisi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya FGD Unit Produksi SMK dari Segi Pengelolaan Barang Milik Negara				-	50 Orang	125	-	-		-	50 orang	125
			PPDB On Line SMA/SMK	Terselengggaranya PPDB On Line SMA/SMK				-	12 KAb/Kota	2,000	12 KAb/Kota	790.88	12 Kab/Kota	420	36 kab/kota	3,211
			Pengadaan Peralatan Praktik Survei dan Pemetaan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Praktik Survei dan Pemetaan				-	5 Sekolah	3,000				-	5 sekolah	3,000
			Peningkatan Infrastruktur SMK	Terlaksananya PEningkatan Infrastruktur SMK				-	3 Sekolah	6,200	2 Sekolah	8,720	12 sekolah	7,704	17 sekolah	22,624
			Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	Terlaksananya Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau				-			150 0rang	100	60 orang	126	210 orang	226
			Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK	Terlaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK				-			12 kab/kota	100	12 kab/kota	822	24 kab/kota	922
			Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasinal (USBN) SD/SMP dan Ujian Paket A/B/C	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasinal (USBN) SD/SMP dan Ujian Paket A/B/C				-			1 kegiatan	150	1 Kegiatan	538	2 kegiatan	688
			Pengadaan Peralatan Komputer Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer SMA	Terlaksananya pengadaan Peralatan Komputer Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer SMA	2 Sekolah	750		-		2,000				-	8 sekolah	2,750

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Pengadaan Peralatan Komputer Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer SMK	Terlaksananya pengadaan Peralatan Komputer Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer SMK	1 Sekolah	679		-						-	1 sekolah	679
			Diklat Kepala Sekolah SMA	Terlaksananya Diklat Kepala Sekolah SMA					20 org	479			120 orang	482	140 orang	961
			Pembangunan Pagar SMA	Terlaksananya Pembangunan Pagar SMA				-	3 sekolah	1,200	6 sekolah	1,180	7 sekolah	1,451	16 sekolah	3,831
			Pengadaan Paving Blok SMA	Terlaksananya Pengadaan Paving Blok SMA				-	1 Kegiatan	1,200	-	-	-	-	1 kegiatan	1,200

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
perencana			Pengadaan Sanitasi SMA	Telaksananya Pengadaan Sanitasi SMA				-	1 Kegiatan	1,200	-	-	-	-	1 kegiatan	1,200
			Peningkatan Prasarana Gedung Sekolah SMA Negeri	Meningkatnya Prasarana Gedung Sekolah				-	-	-	5 sekolah	4,332		-	5 Sekolah	4,332
			Penyelenggaraan Riau Cerdas Untuk Siswa Miskin dan Kawasan 3T	Terselenggaranya Riau Cerdas Siswa Miskin dan Kawasan 3T	612 orang	800		-	1625 siswa	13,624				0	2237 orang	14,424
			Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Fisika	Adanya Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Fisika di 30 Sekolah				-	30 Sekolah	6,000	-	-	-	-	30 sekolah	6,000
			Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Labor IPA	Terlaksananya pengadaan Sarana Edukasi Integratif Labor IPA				-	1 Paket	5,000	-	-	-	-	1 Paket	5,000
			Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Labor Kimia	Terlaksananya Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Labor Kimia				-	1 Kegiatan	2,100	-	-	-	-	1 Kegiatan	2,100
			Pengadaan Alat Peraga Edukasi dan Integratif Labor IPA SMA	Tersedianya APE perkembangan Fisik Motorik Siswa Didik				-	-	-				-		-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA					-			10 sekolah	1,000	4 sekolah	1,872	14 sekolah	2,872
			Pemeriksaan Kontruksi Gedung Sekolah (PP No. 29 Tahun 2000)	Terlaksananya Pemeriksaan Kontruksi Gedung Sekolah (PP No. 29 Tahun 2000)				-	1 Kegiatan	750	-	-		-	1 Kegiatan	750
			Pengadaan Alat Peraga IPA SMA	Telaksananya Pengadaan Alat Peraga IPA SMA				-	1 Kegiatan	5,000	1 Kegiatan	4,300	-	-	2 Kegiatan	9,300
			Pengadaan Alat Labor Biologi IT	Terlaksannya Pengadaan Alat Labor Biologi IT	1 Kegiatan	2,500		-	1 Kegiatan	6,000	-	-		-	2 Kegiatan	8,500
			Pengadaan Alat Laboratorium IPA Berbasis Kompetensi	Tersedianya Alat Lab.berbasis Kompetensi				-	-	-				-		-
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Pengadaan Alat Perpustakaan Terintegrasi	Terlaksanannya Pengadaan Alat Perpustakaan Terintegrasi				-	1 Kegiatan	2,900				-	1 Kegiatan	2,900
			Pembangunan Lapangan Olahraga SMA	Terlaksananya Pembangunan Lapangan Olahraga SMA				-	1 kegiatan	400	-	-	-	-	1 Kegiatan	400
			Pengadaan Alat E-learning SMA	Terlaksananya Pengadaan Alat Elearning SMA				-	1 kegiatan	910	-	-	-	-	1 Kegiatan	910
			Pembangunan Gedung Serbaguna SMA	Pembangunan Gedung Serbaguna SMA				-	1 Kegiatan	350	-	-	-	-	1 Kegiatan	350
			Pembangunan Perpustakaan SMK	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan SMK				-	1 Kegiatan	250	-	-	1 Kegiatan	724	2 Kegiatan	974
			Pembangunan Perpustakaan SMA	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan SMA				-			SMA 12 Pekanbaru	1,000		-	1 Sekolah	1,000
			Peningkatan Infrastruktur SMA					-			12 sekolah	2,312		5,436		7,748
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK					-			10 sekolah	1,500		4,137		5,637
			Pengadaan Alat Kesenian SMK					-			2 sekolah	200		-	2 sekolah	200
			Pengadaan Alat Labor SMK					-			2 sekolah	200	2 sekolah	2,244	4 sekolah	2,444
			Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT					-			1 paket	20,000		-	1 paket	20,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Pengadaan Alat Praktek Jurusan Agribisnis dan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktek Jurusan Agribisnis dan Tanaman Perkebunan				-	1 Kegiatan	400				-	1 kegiatan	400
			Pengadaan Alat Praktek Komputer Jaringan SMA/SMK	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktek Komputer Jaringan SMA/SMK				-	1 Kegiatan	3,000				-	1 kegiatan	3,000
			Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK				-	1 Kegiatan	150	1 Kegiatan	830		-	2 kegiatan	980
			Beasiswa Siswa SMA Taruna Nusantara Magelang	Terlaksananya Beasiswa SMA Taruna Nusantara magelang				-	1 Kegiatan	750	1 Kegiatan	750		-	2 kegiatan	1,500
			Pembangunan pagar SMK					-			2 sekolah	550		-	2 sekolah	550
			Pemetaan Dan Pengembangan Pendidikan Menengah SMA/SMK Se Provinsi Riau	Terlaksananya Pemetaan dan Pengembangan Pendidikan Menengah SMA/SMK Se Provinsi Riau				-	1 Kegiatan	800				-	1 kegiatan	800
			Pengadaan Alat Praktek Program Keahlian Sekretaris	Tersedianya Alat Praktek Program Keahlian Sekretaris				-	2 Sekolah	787	-	-		-	2 sekolah	787

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Workshop Mesin	Tersedianya Sarana dan Prasarana Workshop Mesin			9 sekolah	7,562	2 Sekolah	1,275	-	-		-	2 sekolah	8,837
			Peningkatan Fungsi Peralatan Praktek SMK	Terlaksananya Peningkatan Fungsi Peralatan Praktek SMK				-	2 Unit	500	-	-		-	2 Unit	500
			Pengadaan Simulator Alat Berat SMK	Jumlah Paket Simulator				-	-	-				-		-
			Pelatihan Sertifikasi Tenaga Pelatih Simulator Alat Berat	Jumlah yang dilatih				-	-	-			-	-		-
			Penyelesaian Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Pekanbaru	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Pekanbaru	1 Sekolah	200		-	-					-	1 sekolah	200
			Pembangunan RKB Lengkap SMA Islam Tibyan Al Ihsan		1 Sekolah	175		-						-	1 sekolah	175
			Pembangunan Kantor dan Meubeler SMK Bina Insan Siak Hulu, Jl. Rezeki Desa Baru Siak Hulu		1 Paket	400		-						-	1 paket	400
			Penyelesaian Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA N 1 Taluk Kuantan	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Taluk Kuantan				-	-	-			-	-		
			Penyelesaian Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA N 1 Rengat/INHU	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Rengat/Inhu				-	-	-			-	-		
								-						-		
						181,905		**189,893**		**237,252**		**83,318**		**74,356**		**763,618**
Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Pendidikan Yang Andal	Optimalnya Tata Kelola, akuntabilitas pencitraan publik didalam penyelenggaraan pendidikan		**PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN**	**IKU**										-		
				Persentase Sekolah Yang melaksanakan program MBS dengan baik										-		
				- SD/MI					83%		50%		50%	-		
				- SMP/MTs					70%		50%		50%	-		
				- SMA/MA/SMK					80%		50%		50%	-		
				Persentase Sekolah yang Terakreditasi										-		
				- TK/RA										-		
				- SD/MI					44,49%		50,00%		50,00%	-		
				- SMP/MTs					38,73%		43,73%		43,73%	-		
				- SMA/MA/SMK					94,48%		95,00%		95,00%	-		
			Peningkatan Kompetensi Bagi Guru Bantu Se Provinsi Riau											-		
			Diklat Muatan Lokal bagi guru SMA/SMK se Provinsi Riau										415 orang	588	415 orang	588
			Pembentukan Karakter Siswa Pendidikan Menengah Di Provinsi Riau											-		
			Pencapaian SPM Pendidikan Dan Pemantauan Evaluasi Spm Pendidikan Di Provinsi Riau Dan Kab Kota										12 kab/kota	630	12 kab/kota	630
			Pengendalian Dan Penilaian Resiko Spip Pada Program Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Riau											-		
			Rakor dan Sinkronisasi bantuan keuangan dan hibah se Provinsi Riau											-		
			Operasional Kelembagaan SMK											-		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD											-		-

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	Adanya Diklat Calon Kepala Sekolah SMA Se Provinsi Riau					30 orang	800	40 Orang	100	40 orang	768	110 orang	1,668
			Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan		12 kab/kota	800								-	12 kab/kota	800
			Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Adanya Diklat Calon Kepala Sekolah SMK Se Provinsi Riau					30 calon	800				-	30 orang	800
			Pengadaan Kalender Pendidikan	Terlaksananya Pengadaan Kalender Pendidikan untuk 12 kab/kota di Provinsi Riau	12,500 Eks	300	14,470 Eks	445	14.470 explr	553	14.250 explr	300	11743 explr	230	67433 explr	1,828
			Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	Meningkatnya Siswa dan Guru berprestasi	1 kegiatan	600		-	1 kegiatan	500	1 kegiatan	600	1 kegiatan	420	4 kegiatan	2,120
			Review Kurikulum Muatan Lokal		12 kab/kota	750	12 kab/kota	1,071						-	24 kab/kota	1,821
			Penerbitan Jurnal Pendidikan		1 kegiatan	750	1 kegiatan	709						-	2 kegiatan	1,459
			Pengelolaan Data Pendidikan	Terlaksananya pengelolaan data pokok pendidikan	12 kab/kota	1,500	12 kab/kota	1,200	6 Jenjang pendidikan, 12 kab/kota	1,250	200 orang	50	540 orang	1,164	540 orang	5,164
			Penyusunan Program/Kegiatan Pendidikan Provinsi Riau	Terlaksananya pemantapan dan sinkronisasi program kegiatan provinsi dan kab/kota	12 kab/kota	1,201	12 kab/kota	1,200	12 Kab/Kota	900	1			-	36 kab/kota	3,301
			Dukungan Operasional Internet Dinas Pendidikan Provinsi Riau		12 Bulan	630								-	12 bulan	630
			Persiapan dan Pembinaan OSN Nasional SD, SMP dan SMA se-Provinsi Riau		312 orang	1,000								-	312 Orang	1,000
			Sosialisasi dan Workshop Gerakan Gemar Membaca Dikdasmen		12 kab/kota	1,510								-	12 kab/kota	1,510
			Sosialisasi Good School Governance bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah		12 kab/kota	970								-	12 kab/kota	970
			Penyusunan Rencana Awal Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah dan PKPLK Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014		12 bulan	726								-	12 bulan	726
			Pengadaan Perangkat Aplikasi Edukatif Multikonten			5,500								-		5,500
			Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala SMA Se-Provinsi Riau		300 Orang	1,500								-	300 orang	1,500
			Penghargaan Siswa Berprestasi se- Provinsi Riau			-	50 Penghargaan	975						-	50 penghargaan	975
			Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	Tersedianya Publikasi informasi pendidikan melalui media cetak dan elektronik	12 Bulan	620	12 bulan	1,156	12 bulan	500	12 bulan	300	12 bulan	117	60 bulan	2,693
			Workshop Penyusunan dan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi				150 guru	468						-	150 guru	468
			Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan				200 Guru	529						-	200 guru	529
			Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Jurnal Karya Tulis Ilmiah				100 Orang	459					270 orang	634	370 orang	1,093
			Sosialisasi PPDB Online				12 kab/kota	243						-	12 kab/kota	243

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Pendidikan Expo				1 Kegiatan	403						-	1 kegiatan	403
			Sosialisasi Program e-Sabak											-		-
			Pelatihan Pengembangan Program e-Sabak											-		-
			Pengadaan Peralatan Program e-Sabak				12 kab/kota	3,000						-	12 kab/kota	3,000
			Pelatihan Teknisi UN Berbasis TIK (CBT)				1 Kegiatan	284						-	1 kegiatan	284
			Pelatihan Teknisi PPDB-Online	Terlaksananya Pelatihan Teknisi PPDB Online Provinsi Riau			12 kab/kota	367	12 kab/kota	420				-	24 kab/kota	787
			Pelatihan Teknisi UN Berbasis TIK (CBT)	Terlaksananya Pelatihan Teknisi UN Berbasis TIK (CBT) Provinsi Riau			se Provinsi Riau	188	Provinsi Riau	500				-	24 kab/kota	688
			Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Terlaksananya hari Pendidikan Nasiona			1 kegiatan	251	1 kegiatan	200				-	2 kegiatan	451
			Peringatan Hari Guru Nasional				1 kegiatan	160						-	1 kegiatan	160
			Peringatan Bulan Bahasa Nasional				1 kegiatan	147						-	1 kegiatan	147
			Peringatan Hari Membaca Nasional											-		-
			Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan PKPLK				1 Kegiatan	6,100						-	1 kegiatan	6,100
			Diklat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD, SMP, SMA dan SMK											-		-
			Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Riau	Adanya Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Berdedikasi			1 kegiatan	2,593	1 kegiatan	2,750				-	2 kegiatan	5,343
			Ki Hajar Award Tingkat Provinsi Riau	Terlaksananya Ki Hajar Award Provinsi Riau			1 kegiatan	1,215	1 kegiatan	**250**				**-**	2 kegiatan	1,465
			Pembinaan dan Monitoring Guru Bantu	Terlaksananya Pembinaan Guru Bantu Provinsi Riau	1 kegiatan	430	1 kegiatan	1,723	1 kegiatan	**1,500**				**-**	3 kegiatan	3,653
			Penyelenggaraan Badan Akreditasi Sekolah	Terlaksananya Penyelenggaraan Badan Akretasi Sekolah			35 sekolah	369	35 sekolah	**300**				**-**	70 sekolah	669
			Pelaksanaan Zona Integritas	Terlaksananya Zona Integritas					1 kegiatan	200				-	1 kegiatan	200
			Sekretariat Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Sekretariat Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi					1 kegiatan	200				-	1 kegiatan	200
			Pendidikan Kesetaraan untuk Anak Putus dan Lepas Sekolah				120 Orang	2,100						-	120 orang	2,100
			Pembinaan Pendidikan Keluarga (Informal)				150 Orang	3,540						-	150 orang	3,540
			Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan Pendidikan Keluarga				3 Lembaga	1,393						-	3 lembaga	1,393
			Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan, Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan	Terlaksananya Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan, Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan			1 kegiatan	1,750	1 Kegiatan	894	1 kegiatan	600	1 Kegiatan	651	4 kegiatan	3,895
			Seleksi dan Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Riau	Pemilihan Dewan Pendidikan Provinsi Riau	13 Anggota Dewan Pendidikan	175	13 Anggota dewan Pendidikan	420						-	26 Anggota Dewan Pendidikan	595
			Meningkatkan Kapasitas Dewan pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	Kapasitas Dewan Pendidikan yang perlu di tingkatkan di tingkat provinsi dan kab/kota					1 Keg	950	1 Kegiatan	200	1 Kegiatan	776	3 Kegiatan	1,926

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Biaya Audit/Opname Ruang Labor Bahasa dan IPA SDN 01 Benteng Hulu dan SDN 04 Perawang Barat Kab. Siak	Terlaksananya Audit/Opname Ruang Labor Bahasa dan IPA SDN 01 Benteng Hulu dan SDN 04 Perawang Barat Kab. Siak					1 Kegiatan	77	-	-	-	-	1 kegiatan	77
			Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) di Provinsi Riau	Terlaksananya Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) di Provinsi Riau	12 kab/kota	1,000			12 Kab/Kota	7,000	-	-		-	24 kab/kota	8,000
			Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA				12 kab/kota	12,500			12 kab/kota	2,500	12 kab/kota	1,569	36 kab/kota	16,569
			Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN)		120 Orang	889								-	120 orang	889
			Pelatihan Tata Kelola Kepala Sekolah SMP				60 Orang	285						-	60 orang	285
			Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	12 kab/kota	2,980	12 kab/kota	3,730	456 Orang	2,500	5 cabang	2,000	12 kab/kota	775		11,985
			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Terlaksananya Lomba Festival Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	12 kab/kota	2,350	12 kab/kota	2,508	288 Orang	1,500	5 cabang lomba	1,700	5 cabang lomba	875	25 cabang lomba	8,934
			Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	12 kab/kota	816	12 kab/kota	974	144 Orang	1,000	144 Orang	2,000	144 Orang	983	720 orang	5,773
			Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Terlaksananya Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	12 kab/kota	1,203	12 kab/kota	1,251						-	24 kab/kota	2,455
			Cipta Pelajar SMP	Terlaksananya Lomba Cipta Pelajar SMP	12 kab/kota	495	12 kab/kota	564	12 Kab/Kota	400				-	36 kab/kota	1,459
			Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP	Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	12 kab/kota	820	12 kab/kota	972	12 Kab/Kota	800				-	36 kab/kota	2,592
			Lomba Karya Jurnalistik Siswa SMP (LKJS) SMP	Terlaksananya Lomba Karya Jurnalistik Siswa SMP (LKJS)	12 kab/kota	825	12 kab/kota	817	12 Kab/Kota	837				-	36 kab/kota	2,478
			Pembelian Alat Marching Band Lengkap Untuk Madrasah Al Huda Dumai, Jl Hayam Wuruk No. 3 Kel. Buluh Kasap Kec Dumai Timur Kota Dumai		1 Sekolah	200		-						-	1 sekolah	200
			Pembangunan Ruang Kantor MTS Muhammadiyah Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab Kuansing		1 paket	400	1 Paket	16						-	2 paket	416
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PDTA Al-Mukhlisin Jl. SSQ Desa Sei. Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis		1 paket	400								-	1 paket	400
			Bantuan Pengadaan Komputer Sekolah 15 Unit Pondok Pesantren Nurussalam Dumai (Yayasan Haji Abdul Hamid Riau) Jl. Panglima Jambul Kel. Tanjung Palas, Dumai		15 Komputer	170								-	15 unit	170
			Pembangunan RKB MTs Madrasah Manabiul Ulum Simpang Gaung Kec. Gaung Kab. Inhil		1 Sekolah	350								-	1 sekolah	350
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTs Hidayatul Islamiyah Kab. Inhil.		1 Sekolah	500								-	1 sekolah	500
			Pembangunan Lokal SMP Al Hidayah Yayasan Pembina Taman Hidayah Kandis Kab. Siak		1 Sekolah	210								-	1 sekolah	210
			Workshop TIK bagi Guru SD Pembina		90 Orang	352								-	90 orang	352
			Workshop TIK bagi Guru SMP Standar Nasional		2 Kegiatan	323								-	2 kegiatan	323

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Supervisi Kegiatan Bimtek Intra dan Ektra Kurikuler Sekolah Dasar		108 Sekolah	250								-	108 sekolah	250
			Kursus Mahir Dasar Pramuka untuk Guru SD		450 Orang	1,862								-	450 orang	1,862
			Pelatihan Tenaga Labor Bahasa SD bekerja sama dengan perguruan tinggi		1 kegiatan	594								-	1 kegiatan	594
			Pendamping Kurikulum SD		240 Sekolah	1,446	240 sekolah	1,593						-	480 sekolah	3,039
			Diklat Bimbingan Konseling bagi Guru Kelas di Sekolah Dasar			-	216 orang	624						-	216 orang	624
			Sosialisasi Kamp Literasi bagi Guru SD			-	240 orang	664						-	240 orang	664
			Lomba Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi SD		2 Medali	500								-	2 MedaLI	500
			Lomba Guru Berprestasi dan Berdedikasi SD		2 Medali	400								-	2 MedaLI	400
			Lomba Kepala Sekolah Berprestasi SD		2 Medali	400								-	2 MedaLI	400
			Lomba Pengawas Berdedikasi Daerah Terpencil SD		2 Medali	600								-	2 MedaLI	600
			Lomba Budaya Mutu SD	Terlaksananya lomba budaya mutu SD	7 Kegiatan	820		178	180 Sekolah	350				-		1,348
			Pelatihan Tata Kelola Kepala Sekolah SD			-	170 Orang	777						-	170 orang	777
			Pelatihan Kompetensi guru Kelas SD			-	200 Orang	780						-	200 orang	780
			Akreditasi Sekolah Dasar		50 Sekolah	350	140 orang	640						-	50 sekolah	990
			Cerdas Cermat SD		50 Sekolah	3,150								-	50 sekolah	3,150
			Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	7 cabang	2,000	9 cabang Olahraga	2,303	408 Orang	1,500	5 cabang	1,400	6 cabang	730	27 cabang	7,933
			Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	2 cabang	550	2 Kegiatan	836	180 Orang	750	8 cabang	1,000	2 cabang	755	14 cabang	3,892
			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	2 Kegiatan	1,200	9 cabang	1,613	180 Orang	1,700	8 cabang	1,000	5 cabang	700	31 cabang	6,212
			Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD			-	3 sekolah	777						-	3 sekolah	777
			Lomba Cipta Pelajar SD	Terlaksanya lomba cipta pelalar SD	3 lomba	300	3 lomba	320	72 Orang	333				-	9 lomba	953
			Pengadaan Media Pembelajaran Penunjang Kurikulum 2013 SD			-	6 sekolah	200						-	6 sekolah	200
			Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP			-	12 kab/kota	1,933						-	12 kab/kota	1,933
			Pelaksanaan Ujian Sekolah SD/MI	Terlaksananya US SD/MI	12 kab/kota	2,850	12 kab/kota	2,882						-	24 kab/kota	5,732
			Dukungan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP		12 kab/kota	2,000								-	12 kab/kota	2,000
			Bimtek Penulisan Penelitian Ilmiah Remaja bagi siswa SMP				1 kegiatan	235						-	1 kegiatan	235
			Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) GURU DIKDAS (SD dan SMP)				4 Medali	803						-	4 medali	803
			Pengadaan Alat Olahraga SMP					-						-		-
			Pengadaan Media Pembelajaran Penunjang Kurikulum 2013 SMP					-						-		-
			Pelaksanaan Ujian Sekolah SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs dan SMA/MA/SMK	Terlaksananya US SD/MI dan UN SMP/MTs, dan SMA/SMK				-	3 Jenjang	5,500				-	3 jenjang	5,500
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Berbasis Standar Nasional (SBSN) se Provinsi Riau		36 sekolah	77		-						-	36 sekolah	77
			Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan serta Pelaporan BOS DIKDAS Se-Provinsi Riau		12 kab/kota	2,500	12 kab/kota	1,891						-	24 kab/kota	4,391
			Pendampingan Kurikulum SMP		120 Orang	1,053								-	120 orang	1,053
			Lomba Guru Berprestasi dan Berdedikasi SMP		2 Kegiatan	600								-	2 kegiatan	600
			Lomba Kepala Sekolah Berprestasi SMP		2 Kegiatan	600								-	2 kegiatan	600
			Lomba Pengawas Berdedikasi Daerah Terpencil SMP		2 Kegiatan	600								-	2 kegiatan	600

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Penilaian Sekolah Potensial Menuju SBSN		36 Sekolah	450								-	36 sekolah	450
			Lomba unit kesehatan sekolah (UKS) SMP		5 Medali	650	3 Medali	533						-	8 medali	1,183
			Bimtek Tim Pengembang Kurikulum Dikdas				232 Orang	755						-	232 orang	755
			Diklat Tim Pengembang Kurikulum 2013 Dikdas				110 Orang	472						-	110 orang	472
			Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Dikdas		464 Orang	2,300		-						-	464 orang	2,300
			Lomba Tata Kelola Manajemen Pelaporan BOS Dikdas		120 Orang	600	120 Orang	952						-	240 orang	1,552
			Cerdas Cermat SMP		192 Orang	3,150								-	192 orang	3,150
			Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Remaja Bagi Siswa SMP		120 Orang	505								-	120 orang	505
			Pelatihan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMP bekerja sama dengan Perguruan Tinggi	Terlaksananya Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMP	120 Orang	459	360 Orang	1,002						-	480 orang	1,461
			Diklat Pengawas SMP				20 Orang	112						-	20 orang	112
			Lomba Cerdas Terampil (LCT) Paket B		116 Orang	655								-	116 orang	655
			Lomba Karya Kreativitas dan Inovasi (LK2I) Paket B		12 kab/kota	349								-	12 kab/kota	349
			Pelatihan Tenaga Labor Bahasa SMP bekerja sama dengan perguruan tinggi		12 kab/kota	733								-	12 kab/kota	733
			Pelatihan Kompetensi Tutor mata pelajaran Paket B		234 Orang	750								-	234 orang	750
			Diklat Kurikulum 2013 DIKDAS				60 Orang	228						-	60 orang	228
			Training Of Trainers (TOT) Kurikulum 2013 Dikdas				100 orang	585						-	100 orang	585
			Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK Bagi Pendidik SMP				50 Orang	206						-	50 orang	206
			Pengembangan Asesor Program Induksi Guru Pemula SMP				96 Orang	583						-	96 orang	583
			Kelompok Kerja Guru (KKG) SD				500 Orang	305						-	500 orang	305
			MGMP Guru Mata Pelajaran SMP				500 Orang	305						-	500 orang	305
			Pelatihan Tenaga Pustakawan SMP bekerja sama dengan perguruan tinggi		48 Orang	377		-						-	48 orang	377
			Pengembangan ASESOR Program Induksi Guru Pemula Dikdas		115 orang	583	112 orang	500						-	227 orang	1,083
			Pengadaan Perlengkapan Asrama SMP Olahraga					-						-		-
			Bimtek Pendidikan Karakter Guru Dikdas				480 Orang	1,680						-	480 orang	1,680
			Pelatihan Tenaga Labor IPA SMP				60 Orang	378						-	60 orang	378
			Pelatihan Tenaga Labor Bahasa SMP				50 Orang	338						-	50 orang	338
			Pelatihan Tenaga Pustakawan SMP				40 orang	125						-	40 orang	125
			Pelatihan Tenaga Labor IPA SD				60 Orang	384						-	60 orang	384
			Pelatihan Kompetensi Guru Mata Pelajaran UN SMP bekerja sama dengan Perguruan Tinggi		96 orang	775		-						-	96 orang	775
			Pelatihan Guru Olahraga SD				180 Orang	681						-	180 orang	681
			Pelatihan Kompetensi Guru Mata Pelajaran UN SMP				70 Orang	288						-	70 orang	288
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				1 kegiatan	279						-	1 kegiatan	279
			Apresiasi Pendidik, tenaga Kependidikan dan peserta didik PAUD				192 orang	600						-	192 orang	600
			Beasiswa S1 PAUD	Terlaksananya program Beasiswa PAUD	471 Orang	6,600	709 orang	7,020	709 Orang	5,818	493 orang	6,300		-	2382 orang	25,738
			Lomba unit kesehatan sekolah (UKS)	Terlaksananya Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD, SMP/MTs, SMA/SMK	1 kegiatan	650		-	1 kegiatan	500				-	2 kegiatan	1,150
			Pembinaan Generasi Muda Melalui Pendidikan Saka Widya Budaya Bakti	Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda Melalui Pendidikan Saka Widya Budaya Bakti				-	1 Kegiatan	2,000				-	1 kegiatan	2,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Perkemahan Bakti Saka Widya Budaya Bakti Se Provinsi Riau	Terlaksananya Perkemahan Bakti Saka Widya Budaya Bakti Se Provinsi Riau				-	1 Kegiatan	1,750				-	1 kegiatan	1,750
			Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Riau	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Dalam Provinsi Riau	1 kegiatan	32,574	1 kegiatan	32,501	1 Kegiatan	24,000	1 kegiatan	23,548.80	1 kegiatan	22,848	5 kegiatan	135,472
			Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	1 kegiatan	13,749	1 kegiatan	16,440	1 Kegiatan	15,000	1 kegiatan	8,906.74	1 kegiatan	8,725	5 kegiatan	62,820
			Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Luar Negeri	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Luar negeri	54 Orang	2,400	30 Orang	1,500						-	84 orang	3,900

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	Terlaksananya Beasiswa bidik misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	1 kegiatan	6,013	1 kegiatan	15,010	1 Kegiatan	12,000	1 kegiatan	15,000	1 kegiatan	12,595	5 kegiatan	60,619
			Beasiswa Bidik Misi S2 untuk Ekonomi Kurang Mampu	Terlaksananya Beasiswa bidik misi S2 untuk Ekonomi Kurang Mampu	300 Orang	4,525		-						-	300 orang	4,525
			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba-lomba Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi	7 cabang	1,643	7 cabang	1,758	7 cabang	2,600	7 cabang	2,000	7 cabang	1,579	35 cabang	9,580
			Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba-lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi	12 kab/kota	1,817	12 kab/kota	3,985	Provinsi Riau	4,800	Provinsi Riau	3,500	5 cabang	2,231	25 cabang lomba	16,334
			Debat Bahasa Indonesia SMA	Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Indonesia siswa SMA Tk. Provinsi	12 kab/kota	345	12 kab/kota	375	12 Kab/Kota	402				-	36 kab/kota	1,122
			Debat bahasa Inggris SMA	Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris siswa SMA Tk. Provinsi	12 kab/kota	351	12 kab/kota	382	12 Kab/Kota	402			12 kab/kota	379	48 kab/kota	1,514
			Penyusunan Program/Kegiatan Pendidikan Provinsi Riau	Terlaksananya pembinaan dan seleksi OSN siswa SMA Tk. Provinsi				-	12 Kab/Kota	4,962				-	12 kab/kota	4,962
			Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	Terlaksananya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SMK	12 kab/kota	1,095	12 kab/kota	1,900	12 Kab/Kota	2,200	12 kab/kota	2,000	12 kab/kota	1,679	60 kab/kota	8,874
			Debat bahasa tingkat SMK	Terlaksananya Pembinaaa Prestasi Siswa SMK	168 Orang	1,011	168 Siswa	1,011	276 Siswa	1,223				-	612 orang	3,244
			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	15 cabang	1,558	15 Cabang	1,458	432 Orang	1,885	9 bidang	1,500	15 Cabang	1,260	69 cabang	7,661
			Sosialisasi Persiapan Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Kab/Kota ke Provinsi		150 orang	500								-	150 orang	500
			Pendataan Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Kab/Kota ke Provinsi		12 kab/kota	1,500								-	12 kab/kota	1,500
			Parade Cinta Tanah Air untuk jenjang SMA	Terlaksananya Lomba Parade Cinta Tanah Air untuk Jenjang SMA Tk. Provinsi	12 kab/kota	750	12 kab/kota	750	12 Kab/Kota	500				-	12 kab/kota	2,000
			Kemah Pramuka Pendidikan Karakter SMA		48 orang	250								-	48 orang	250
			Pengadaan Alat Astronomi dan Kebumian SMA		2 Sekolah	1,000								-	2 sekolah	1,000
			Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	Terlaksananya Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk Jenjang SMA			12 kab/kota	488	Provinsi Riau	650	12 kab/kota	100	12 kab/kota	373	48 kab/kota	1,610
			Lomba Cerdas Cermat (LCC) Pancasila, UUD45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat (LCC), Pancasila, UUD45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	12 kab/kota	2,500	12 kab/kota	2,302	Provinsi Riau	2,500				-	36 kab/kota	7,302

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Kawah Kepimpinan Pelajar (KKP)	Terlaksananya KKP				-	Provinsi riau	500			-	-	12 kab/kota	500
			Penyelenggaraan Pekan Inovasi Kreatifitas Siswa (PIKS)	terlaksananya Pekan Inovasi				-	10 Orang	100			-	-	10 orang	100
			Kualifikasi S1 Terakreditasi	Terlaksananya Kualifikasi S1 Terakreditasi	1 kegiatan	7,000	1 kegiatan	768	1 Kegiatan	5,000				-	4 kegiatan	12,768
			Kualifikasi S2 Terakreditasi	Terlaksananya Kualifikasi S2 Terakreditasi	1 kegiatan	13,558	1 kegiatan	7,251	1 Kegiatan	6,000	1 kegiatan	6,100	1 kegiatan	4,728	5 kegiatan	37,637
			Kualifikasi S3 Terakreditasi	Terlaksananya Kualifikasi S3 Terakreditasi	42 Orang	3,292	31 Orang	2,508						-	73 orang	5,800
			Pelatihan Guru Bantu Provinsi Riau	Terlaksananya Pelatihan Guru bantu	672 Guru Bantu	2,500								-	672 orang	2,500
			Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru Dikdasmen dan PKPLK		160 orang	940	240 Orang	848						-	400 orang	1,788
			Pembayaran Gaji Guru Bantu					-	3.645 Orang	96,228				-	3.645 orang	96,228
			Penyuluhan Bahaya Narkoba. Radikalisme, Lalulintas dan Korupsi Bagi Pelajar Se- Provinsi Riau	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, Radikalisme, lalu lintas dan Korupsi bagi Pelajar se Provinsi Riau	240 Siswa	900	272 Siswa	623	272 Siswa	900				-	784 orang	2,423
			Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS)	Terlaksananya Lomba Kompetensi Siswa SMK	1 kegiatan	2,600	1 kegiatan	2,600	1 kegiatan	1,950	-	-	1 kegiatan	1,602	4 kegiatan	8,752
			Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Serta Pelaporan BOS Se- Provinsi Riau	Terlaksananya Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Serta Pelaporan BOS Se-Provinsi Riau				-	12 Kab/Kota	3,500			12 kab/kota	884	24 kab/kota	4,384
			Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band) SMA/SMK Provinsi Riau	Terlaksananya Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band dan Tenis Meja) Siswa SMA/SMK Provinsi Riau				-	12 Kab/Kota	1,500	12 kab/kota	200		-	24 kab/kota	1,700
			Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastruktur Berbasis Mading Digital Interaktif					-			3 sekolah	162		-	3 sekolah	162
			Bantuan Keikutsertaan Siswa/Mahasiswa Provinsi Riau dalam Iven Nasional/Internasional	Tersediannya Biaya Bantuan Melalui Proposal				-	-	-				-		-
			Pemetaan sekolah berbasis GIS	Tersedianya pemetaan sekolah				-	-	-	1 Paket	250		-	1 paket	250
			Gebyar PAUD Provinsi Riau	Terlaksananya Kegiatan Gebyar PAUD				-	1 Kegiatan	669				-	1 kegiatan	669
			Monitoring dan Evaluasi Data Pokok Pendidikan Provinsi Riau	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Data Pokok Pendidikan Provinsi Riau				-	-	-				-		-
			Pelatihan Operator Pendataan SMA/SMK	Terlaksananya Pelatihan Operator Pendataan SMA/SMK				-	-	-				-		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi dalam dan luar daerah				-	-	-				-		
			Penguatan Pengembangan Model Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/ Swasta	Terlaksananya Model Penguatan Pengembangan Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/ Swasta				-	-	-				-		
			Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta	Terlaksananya Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta				-	-	-				-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru	Terlaksananya program Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru di Provinsi Riau				-	-	-				-		
			Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SD/SMP dan Ujian Paket A/B/C se Provinsi Riau	Terlaksananya Ujian Nasional (UN) SD/SMP dan Ujian Paket A/B/C se Provinsi Riau				-	-	-				-		
			Pameran dan Lomba Pendidikan Teknologi Tepat Guna Tingkat SMA/SMK/Perguruan Tinggi Se-Provinsi Riau	Terlaksannaya Pameran dan Lomba Pendidikan Teknologi Tepat Guna Tingkat SMA/SMK/Perguruan Tinggi Se-Provinsi Riau				-	-	-				-		
			Program Pembangunan Sekolah Terpadu					-						-		
			Pembangunan Sekolah Terpadu Kab. Meranti				0	-						-		
								-						-		
						68,453		**123,844**		**109,419**		**31,252**		**40,882**		**373,727**
				IKU										-		
Tersedianya dan Terjangkaunya layanan Pendidikan Khusus dan Layanan khusus yang Bermutu, Berkesetaraan dan Berkesusaian	Terpenuhinya layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus		**PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS**	1. APK SD/MI/SDLB/Paket A					116,0%		116,2%		117,20%	-		
				2. APM SD/MI/SDLB/Paket A					95,41%		95,73%		96,73%	-		
				3. APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B					107,8%		108,14%		109,14%	-		
				4. APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B					93,20%		95,73%		96,73%	-		
				5. APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C					92,87%		93,41%		94%	-		
				6. APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C					69,90%		70,43%		71%	-		
			Kegiatan :	**IKK**										-		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	Persentasi sarana dan prasarana pusat layanan autis provinsi Riau	1 paket	1,748			1 Paket	500	1 paket	200		-	3 paket	2,448
			Pengadaan Sarana Prasarana Alat Bantu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) SLB		3 set	540	6 set	600						-	9 set	1,140
			Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	Terlaksananya Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	12 kab/kota	1,594	12 kab/kota	893	12 kab/kota	1,045	12 kab/kota	600	12 kab/kota	477	60 kab/kota	4,609
			Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	Terlaksananya Penelusuran Minat dan Bakat Siswa PKPLK			1 Kegiatan	6,269	1 Kegiatan	7,539	1 kegiatan	2,100	1 Kegiatan	1,912	4 kegiatan	17,820
			Peningkatan Penyelenggaraan pusat layanan autis	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	1 Kegiatan	1,300	1 Kegiatan	2,389	1 Kegiatan	3,197	1 kegiatan	1,330	1 Kegiatan	1,071	5 kegiatan	9,287
			Diklat Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB)					-					1 Kegiatan	185	1 kegiatan	185
			Bimtek Pengembangan Kurikulum PKPLK				300 orang	2,230							300 orang	2,230
			Bimtek Pendidikan Karakter bagi PTK PKPLK				516 Orang	2,074						-	516 orang	2,074
			Penigkatan Tata Kelola bagi PTK PKPLK				200 Orang	754						-	200 orang	754
			Pelatihan Pendidikan Lalu Lintas Sekolah bagi SLB				70 Orang	336						-	70 orang	336
			Rapat Teknis Pengisian Aplikasi Data Kependidikan Berbasis TIK PKPLK					-						-		-
			Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK				1 Kegiatan	131			1 kegiatan	3,000		-	2 kegiatan	3,131

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Akreditasi Lembaga PKPLK	Terlaksananya Akreditasi Lembaga Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusu			1 Kegiatan	318	1 kegiatan	500				-	2 kegiatan	818
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga SLB				3 paket	289						-	3 paket	289
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PKPLK	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PKPLK				-	1 kegiatan	800			1 kegiatan	1,260	2 kegiatan	2,060
			Pembangunan Kantin SLB				4 Ruangan	720						-	4 ruang	720
			Pembangunan Ruang Konseling SLB				3 Unit	420						-	3 unit	420
			Bimtek UKS bagi PTK PKPLK				87 Orang	335						-	87 orang	335
			Rapat Koordinasi PKPLK	Terlaksananya Rapat Koordinasi PKPLK	120 Orang	330	150 orang	525	150 Orang	551				-	420 orang	1,406
			Diklat Tenaga Pustakawan dan Laboran PKPLK		150 orang	489		-						-	150 orang	489
			Workshop Lifeskill PTK PKPLK				72 Orang	589						-	72 orang	589
			Workshop Manajemen Berbasis Sekolah PKPLK		140 Orang	412		-						-	140 orang	412
			Pematangan Lahan, Pembuatan Turap dan Parit Keliling Pusat Layanan Autis Provinsi Riau					-						-		-
			Pembangunan Turap SLB				1 Paket	2,000			1 paket	750		-	2 paket	2,750
			Pendampingan Implementasi Kurikulum PKPLK		200 Orang	711								-	200 orang	711
			Workshop Pengelola Lembaga/Klinik Autis		130 Orang	415		-						-	130 orang	415
			Aplikasi Manajemen Pelayanan Pusat Layanan Autis		1 paket	66		-						-	1 paket	66
			Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi				540 Orang	1,937						-	540 orang	1,937
			TOT Tenaga Instruktur Sekolah Inklusi				150 Orang	672						-	150 orang	672
			Bimtek Sekolah Inklusi se Provinsi Riau	Terlaksananya Bimbingan Teknis Sekolah Inklusi Provinsi Riau			500 Orang	2,216	170 orang	750	-	-		-	670 orang	2,966
			Pengadaan Media Pembelajaran SLB				1 Kegiatan	1,000							1 Kegiatan	1,000
			Diklat Pengawas PKPLK					-						-		-
			Peningkatan Kompetensi tenaga Pendidik Inklusi PKPLK	Terlaksananya Kompetensi tenaga Pendidik Inklusi			500 orang	2,054	-	-				-	500 orang	2,054
			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Pendidikan PKPLK	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Pendidikan PKPLK			1 Kegiatan	1,324	1 Kegiatan	2,300			1 Kegiatan	1,057	3 kegiatan	4,681
			Bimtek Kepramukaan Berjenjang PKPLK	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepramukaan Berjenjang PKPLK			140 Orang	720	200 orang	756				-	340 orang	1,476
			Bimtek Persiapan Ujian Nasional dan Penulisan Naskah Try Out Bagi Tenaga Pendidik	Terlaksananya Bimbingan Teknis Persiapan Ujian Nasional dan Penulisan Naskah Try Out bagi Tenaga Pendidik			102 Orang	715	102 orang	750				-	204 orang	1,465
			Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional bagi PTK PKPLK	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Mata Pelajaran Ujian Nasional bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKPLK	160 orang	683	100 Orang	549	150 orang	700				-	410 orang	1,932
			Penyelengaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	1 Kegiatan	1,700	1Kegiatan	8,531	1 Kegiatan	8,500	1 kegiatan	3,250	1 Kegiatan	5,763	5 kegiatan	27,744
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PKPLK	Terlaksananya Pembangunan RUang Kelas Baru (RKB) PKPLK	24 Ruang	2,007	10 Ruang	1,440	10 ruang	1,600				-	34 ruang	5,047

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Pengadaan Saran Labor Komputer PKPLK	Tersedianya Pengadaan Sarana Labor Komputer PKPLK	1 Kegiatan	240	1 Kegiatan	750	1 Kegiatan	790				-	18 paket	1,780
			Diklat Peningkatan Kompetensi PTK Marginal				257 Orang	1,071						-	257 orang	1,071
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan PKPLK	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan PKPLK			5 paket	625	5 paket	660				-	10 paket	1,285
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Pembelajaran PKPLK	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Pembelajaran PKPLK	1 Kegiatan	240			1 Kegiatan	1,050	-	-		-	2 kegiatan	1,290
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Seni SLB		1 Kegiatan	540	1 Kegiatan	720						-	2 kegiatan	1,260
			Pelatihan Tenaga Kependidikan SLB		72 orang	340		-						-	72 orang	340
			Pelatihan Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan		70 orang	230		-						-	70 orang	230
			Honor Guru SD Marginal		208 orang	6,240		-						-	208 orang	6,240
			Penyelenggaraan Pelatihan Pusat Layanan Autis provinsi Riau		1 Kegiatan	180	1 kegiatan	485						-	2 kegiatan	665
			Sosialisasi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus		1 Kegiatan	275		-						-	1 kegiatan	275
			Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat Layanan Autis Provinsi Riau		25 orang	300	8 Orang	235						-	33 orang	535
			Jambore Anak Berkebutuhan Khusus		289 orang	1,401	274 Orang	1,401						-	563 orang	2,803
			Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKLK		300 Orang	1,394		-						-	300 orang	1,394
			Olimpiade Sains Nasional (OSN) PKLK		150 Orang	1,010		-						-	150 orang	1,010
			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) PKLK		300 Orang	1,534		-						-	300 orang	1,534
			Lomba CIBIPelajar PKLK		12 kab/kota	140		-						-	12 kab/kota	140
			Lomba Gebyar PKLK		160 orang	1,210	160 orang	1,437						-	320 orang	2,646
			Lomba Unit Kesehatan Sekolah (UKS) PKLK		12 kab/kota	350		-						-	12 kab/kota	350
			Pengadaan Kendaraan Operasional Pusat Layanan Autis Provinsi Riau		2 Unit	700		-						-	2 unit	700
			Peningkatan Sarana dan Prasarana SLBN Pembina Pekanbaru		1 Kegiatan	470		-						-	1 kegiatan	470
			Workshop Guru Pendidikan Khusus non PLB		230 orang	700	120 Orang	435						-	350 orang	1,135
			Pengadaan Media Berbasis IT PKPLK	Tersedianya Media Pembelajaran Berbasis IT				-	-	-				-		-
			Pengadaan Media Praktek PLH serta wirausaha berbaiss Hidroponik PKPLK	Tersedianya Media Praktek PLH serta wirausaha berbaiss Hidroponik				-	-	-				-		-
			Pembangunan Asrama Putra Putri PKPLK	Tersedianya Asrama Putra Putri PKPLK			8 unit	4,350	5 unit	2,567				-	13 unit	6,917
			Pendampingan Kurikulum 2013 PKLK		12 kab/kota	1,434	12 kab/kota	708						-	24 kab/kota	2,141
			Lomba Guru Berprestasi dan Berdedikasi SDLB		1 Kegiatan	325		-						-	1 kegiatan	325
			Peningkatan Tata Kelola Pengawas PKLK		12 orang	105		-						-	12 orang	105
			Tata Kelola Kepala Sekolah PKLK		35 orang	306		-						-	35 orang	306
			Diklat PTK Marginal		10 kab/kota	1,500		-						-	10 kab/kota	1,500
			Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus		12 kab/kota	150	12 kab/kota	800						-	24 kab/kota	950
			Pengadaan Alat Tulis untuk Kelompok Belajar Marginal		1 Kegiatan	284		-						-	1 kegiatan	284
			Pengadaan Kelengkapan Sekolah Siswa SD Marginal		35 sekolah	700		-						-	35 sekolah	700
			Pengadaan pakaian Dinas Guru Huni SD Marginal		208 stel	104		-						-	208 stel	104
			Pengadaan Komputer Braille dan Printer Braille SLB				5 Paket	1,350						-	5 paket	1,350
			Data Base PKPLK				408 Orang	500						-	408 orang	500

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Pembangunan Ruang Keterampilan dan Labor PKPLK	Terlaksananya Pembangunan Ruang Keterampilan dan Labor PKPL			7 unit	1,450	7 ruang	1,520				-	14 ruang	2,970
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (UKS) SLB				1 Unit	4,730						-	1 unit	4,730
			Pembangunan Pagar Sekolah SLB				3 Paket	2,000						-	3 paket	2,000
			Pembagunan Ruang Perpustakaan SLB				5 Unit	1,280						-	5 unit	1,280
								-						-		-
			Pembangunan Ruang Bengkel PKPL	Terlaksananya Pembangunan RUang Bengkel PKPLK			4 paket	720	4 ruang	756				-	8 ruang	1,476
			Pembangunan Ruang UKS PKPLK	Terlaksananya Pembangunan Ruang UKS PKPLK			5 Ruang	720	5 ruang	756				-	10 ruang	1,476
			Pengadaan Meubiler SLB					-			SLB Pembina Pekanbaru	200		-	1 sekolah	200
			Pengadaan Alat Kesenian PKPLK					-			30 sekolah	100		-	30 sekolah	100
			Pengadaan Buku PKPLK	Tersedianya Buku PKPLK				-	1 kegiatan	400				-	1 kegiatan	400
			Pengadaan Meubiler PKPLK	Tersediannya Meubilier PKPLK			15 Paket	1,688	15 paket	1,778	2 paket	200	17 paket	1,112	49 paket	4,778
			Pengadaan Meubiler Asrama PKPLK	Tersedianya Meubilier Asrama PKPLK					8 paket	840				-	8 paket	840
			Pengadaan Peralatan Salon dan Tata Rias PKPLK	Tersedianya Peralatan Salon dan tata rias PKPLK				-	5 paket	700				-	5 paket	700
			Pengadaan Peralatan Tata Boga PKPL	Tersedianya Pengadaan Peralatan Tata Boga PKPLK				-	5 paket	700				-	5 paket	700
			Pembangunan Gedung dan Lapangan Futsal Indoor SMA Olahraga	Tersedianya Gedung dan Lapangan Futsal Indoor SMA Olahraga	1 kegiatan	240		-	1 kegiatan	1,500				-	2 kegiatan	1,740
			Pembuatan Landscape Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	Terlaksananya Pembangunan Landscape Pusat Layanan Autis Provinsi Riau				-	1 paket	1,500				-	1 paket	1,500
			Pembuatan Landscape SMA Olahraga Provinsi Riau	Terlaksananya Pembangunan Landscape SMA Olahraga Provinsi Riau				-	1 paket	1,500				-	1 paket	1,500
			Penugasan Sarjana Mengajar Daerah 3T	Terlaksananya Penugasan Sarjana Mengajar Daerah 3T (SM3T)				-	230 orang	4,000				-	230 oraNG	4,000
			Pengembangan Sekolah Penyelenggara Inkluisi	Terlaksananya Pengembangan Sekolah Penyelenggara Inkluisi				-	1 Kegiatan	1,000				-	1 kegiatan	1,000
			Penyusunan Materi Modul Pembelajaran PKPLK	Terlaksananya Penyusunan materi Modul Pembelajaran PKPLK				-	120 orang	1,200				-	120 orang	1,200

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Tehnikal Asistensi/Penguatan TPK Provinsi Riau	Terlaksananya Tehknikal Asistensi/Penguatan TPK Provinsi Riau				-	1 kegiatan	2,500				-	1 kegiatan	2,500
			Pengembangan Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP) Pendidikan PKPLK	Terlaksananya Pengembangan Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP) Pendidikan PKPLK				-	260 orang	1,250				-	260 orang	1,250
			Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	Terselenggaranya Kegiatan Operasional SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau	12 Bulan	9,028	12 bulan	13,371	12 bulan	8,500	12 bulan	2,500	12 bulan	6,234	48 bulan	39,634
			Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau				4 sekolah	13,343							4 sekolah	13,343
			Cerdas Cermat				112 orang	1,878							112 orang	1,878
			Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	Tersedianya Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan yang berkualitas	12 Bulan	4,000		-	12 bulan	5,500	12 bulan	2,136	12 bulan	3,761	48 bulan	15,397
			Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka	Jumlah siswa yang mengikuti lomba motivasi belajarb mandiri SMP terbuka	1 kagiatan	253	1 Kegiatan	316	1 Kegiatan	500				-	3 kegiatan	1,069
			Lomba Budaya Mutu SD											-	84 sekolah	-
			Pembayaran Honor PTK PKPLK	Terlaksananya Pembayaran Honjor Guru Pembantu Khusus, Pengelola Pendidikan PKPLK dan TPK PKPLK			201 Orang	6,270	210 orang	8,084				-	420 oraNG	14,354
			Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKPLK	Terlaksanannya Festival Inovasi dan Kreatifitas PKPLK				-	1 Kegiatan	2,500	1 kegiatan	600	1 Kegiatan	660	3 kegiatan	3,760
			Bimtek pendidikan Penanggulangan Resiko Bencana PKPLK	Terlaksananya Bimtek Pendidikan Penanggulangan Resiko Bencana PKPLK				-	220 orang	500	-	-	-	-	220 orang	500
			Pengadaan Sarana Perlengkapan Sekolah Korban Bencana PKPLK	Tersedianya Sarana Perlengkapan Sekolah Korban Bencana PKPLK				-	1 paket	225				-	1 paket	225
			Gerakan Literasi PKPLK	Terlaksananya Gerakan Literasi PKPLK				-	1 kegiatan	500				-	1 kegiatan	500
			Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	Terselenggaranya Kegiatan Operasional SMA Negeri Plus Provinsi Riau	12 bulan	7,982	12 bulan	8,040	12 bulan	8,000	12 bulan	3,500	12 bulan	4,658	60 bulan	32,180
			Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh	Terwujudnya Program PKPLK dengan adanya Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh	100%	675		-	125 orang	2,000			125 orang	645	375 orang	3,320
			Pengadaan Meubeleur SLBN Pembina Pekanbaru		1 Paket	177		-						-	1 paket	177
			Penyusunan Master Plan SLBN Pembina Pekanbaru		1 Dokumen	77		-						-	1 dokumen	77
			Pengadaan Design Grafis		3 Sekolah	200		-						-	3 sekolah	200
			Diklat Calon Kepala Sekolah PKPLK		50 Orang	750		-						-	50 orang	750
			Diklat Tim Pengembangan Kurikulum Tutor dan Tutorial PKPLK	Terlaksananya Diklat Tim Pengembangan Kurikulum Tutor dan Tutorial PKPL		-			165 orang	800				-	165 orang	800
			Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi Riau	Terwujudnya Kegiatan Operasional Akademi Kesehatan Provinsi Riau	1 PT	4,800		3,435	1 Perguruan Tinggi	4,105	130 mahasiswa	1,962.78		-	4 PT	14,303
			Pameran Karya Ilmiah dan Cipta karya Perguruan Tinggi se Provinsi Riau			-		-						-		-

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Pengadaan sarana Laboratorium Perguruan Tinggi di Provinsi Riau		1 PT	3,034	2 PT	2,128						-	3 PT	5,162
			Pengadaan sarana Perpustakaan Perguruan Tinggi di Provinsi Riau				1 PT	378						-	1 PT	378
			Pengadaan Meubelier Perguruan Tinggi di Provinsi Riau				5PT	2,000						-	5 PT	2,000
			Pengadaan Alat Kesehatan Perguruan Tinggi di Provinsi Riau				1 PT	378						-	1 PT	378
			Pengadaan Peralatan Olahraga Perguruan Tinggi di Provinsi Riau				1 PT	278						-	1 PT	278
								-						-		-
			Pengadaan Komputer Perguruan Tinggi di Provinsi Riau		5 PT	1,796		-						-	5 PT	1,796
			Pengadaan Peralatan Elektronik Perguruan Tinggi di Provinsi Riau		5 PT	1,045	1 pt	328						-	6 PT	1,373
			Pengadaan Prasarana Perguruan Tinggi di Provinsi Riau					-						-		-
			Penyelenggaraan Penunjang Layanan Mutu Pendidikan PKPLK	Terlaksananya Layanan Mutu Pendidikan PKPLK				-	1 Kegiatan	3,900			1 Kegiatan	2,243	2 kegiatan	6,143
			Penyelenggaraan SMA Pintar	terselenggaranya penididkan				-	1 Sekolah	7,000	1 sekolah	2,747.25	1 sekolah	4,062	3 sekolah	13,810
			Pendidikan Parenting Bagi Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Kebutuhan Pendidikan Parenting Bagi Masyarakat			350 orang	2,095	300 orang	850	-	-	122 orang	252	772 orang	3,197
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK					-			204 orang	4,776	204 orang	4,641	408 orang	9,417
			Penyelenggaraan Pendidikan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Bagi Daerah 3T dan KAT Provinsi Riau					-					12 kab/kota	195	12 kab/kota	195
			Apresiasi GTK PAUD DIKMAS Dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi Se- Provinsi Riau					-			1 kegiatan	850	1 Kegiatan	695	2 kegiatan	1,545
			Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan					-			240 orang	450		-	240 orang	450
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik tingkat PAUD	Terlaksananya Kompetensi Tenaga Pendidik tingkat PAUD				-	-	-				-		-
			PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI					-		**-**				**-**		-
			Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	Terlaksananya Pameran Tahunan melalui Riau Expo			1 Kegiatan	123						-	1 kegiatan	123
														-		-
			PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH											-		-
			Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)								12 kab/kota	242,634.60	12 kab/kota	203,738	24 kab/kota	446,372
			PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL			52,893		**51,050**				**-**		**-**		**103,943**
			Pengadaan alat-alat Praktek kursus dan pelatihan		1 kegiatan	3,500	1 kegiatan	2,184						-	2 kegiatan	5,684
			Pengadaan mobiler				1 kegiatan	650						-	1 kegiatan	650
			Apresiasi PTK-PAUDNI		204 Orang	2,200		-						-	204 orang	2,200
			Sertifikasi kursus menjahit		290 Orang	1,725		-						-	209 orang	1,725
			Apresiasi peserta warga belajar PNFI		1 kegiatan	920	1 kegiatan	1,100						-	2 kegiatan	2,020
			Pembangunan TBM Percontohan di daerah 3T		1 Unit	1,500		-						-	1 unit	1,500
			Bantuan honor tutor Keaksaraan		524 Orang	3,000	480 orang	900						-	1004 orang	3,900
			Pengarustamaan Gender bidang pendidikan		40 Orang	450	180 orang	850						-	220 orang	1,300
			Pengadaan komputer untuk PKBM		1 kegiatan	1,600	1 kegiatan	943						-	2 kegiatan	2,543

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Apresiasi PTK Kursus dan Pelatihan				7 Juara	1,350						-	7 juara	1,350
			Apresiasi PTK Pendidikan Masyarakat				8 Juara	1,350						-	8 juara	1,350
			Apresiasi lembaga kursus dan Penghargaan Bagi Pengabdi Kursus				108 Orang	650						-	108 orang	650
			Bimtek Penulisan Karya Nyata dan Karya Tulis bagi PTK PNFI				150 Orang	874						-	150 Orang	874
			Bimtek Asesor PNFI				244 Orang	900						-	244 Orang	900
			Fasilitasi Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B dan C		12 Kab/Kota	2,000	12 kab/kota	1,707						-	24 kab/kota	3,707
			Pembangunan PKBM Rujukan					-						-		-
			Pengembangan Standar Kompetensi Lembaga Kursus dan Pelatihan				160 orang	800						-	160 orang	800
			Pengadaan Sarana PKBM Rujukan					-						-		-
			Workshop Penyalahgunaan Narkoba bagi Anak Putus Sekolah				240 Orang	1,254						-	240 Orang	1,254
			Pendidikan Keterampilan bagi Anak Putus Sekolah				80 Orang	-						-	80 Orang	-
			Pelatihan Persiapan Ujian Nasional dan Penulisan Naskah Try Out bagi Tenaga Pendidik PNFI				108 Orang	676						-	108 Orang	676
			Uji Kompetensi Penguji Praktek				36 Orang	882						-	36 Orang	882
			Diklat Pengembangan Model Pamong Belajar				25 Orang	166						-	25 Orang	166
			Peningkatan Mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) se Provinsi Riau				120 Orang	520						-	120 Orang	520
			Diklat Komputer Paket C				20 Orang	113						-	20 Orang	113
														-		-
			Kompetensi tutor keaksaraan fungsional		1 Paket	525	1 Paket	4,250						-	2 Paket	4,775
			Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Kursus Mahir Dasar				60 orang	551						-	60 orang	551
			Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Kursus Mahir Lanjutan				60 orang	551						-	60 orang	551
			Pembelajaran Keaksaraan Fungsional				24 orang	1,388						-	24 orang	1,388
			Pengadaan buku TBM		90 TBM	1,500		-						-	90 TBM	1,500
			Pengadaan alat-alat praktek kepramukaan		48 Sekolah	3,500	24 Lembaga	2,000						-	72 sekolah	5,500
			Diklat Pengembangan Model				40 Orang	164						-	40 orang	164
			Peningkatan Kualifikasi PTK Pendidikan Masyarakat					-						-		-
			Pembinaan kepramukaan berjenjang		180 orang	1,200		-						-	180 orang	1,200
			Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Non Formal dan Informal		420 orang	1,220		-						-	420 orang	1,220
			Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Lembaga Kursus dan Pelatihan				300 Orang	1,347						-	300 Orang	1,347
			Pendidikan dan Pelatihan Kursus Menjahit Pakaian Wanita dan Anak Tingkat Dasar				1 kegiatan	355						-	1 kegiatan	355
			Pendidikan dan Pelatihan Kursus Menjahit Pakaian Wanita dan Anak Tingkat Terampil				1 kegiatan	355						-	1 kegiatan	355
			Pendidikan dan Pelatihan Kuliner Tradisional Daerah				20 Orang	293						-	20 Orang	293
			Pendidikan dan Pelatihan Masakan Oriental dan Kontinental Tingkat Dasar				20 Orang	293						-	20 Orang	293
			Pendidikan dan Pelatihan Kursus House Keeping Perhotelan				30 Orang	460						-	30 Orang	460
			Penyebaran Informasi PNFI		12 Kab/Kota	915	12 kab/kota	650						-	12 kab/kota	1,565
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Forum PKBM		1 Unit	250		-						-	1 unit	250
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Forum HIPKI		1 Unit	250		-						-	1 unit	250
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Forum PAUD		1 Unit	250		-						-	1 unit	250

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Kompetensi penilik dan pamong belajar PNFI		60 orang	470		-						-	60 orang	470
			Peningkatan Manajemen Pengelolaan Organisasi Mitra		168 orang	750	410 orang	1,100						-	578 orang	1,850
			Pelatihan Kursus Bordir				24 Orang	369						-	24 orang	369
			Pelatihan Kursus Tata Boga				15 Orang	218						-	15 Orang	218
			Pengadaan Peralatan Kursus Bordir, Menjahit dan Tata Boga				12 lembaga	500						-	12 lembaga	500
			Sosialisasi Program Pendidikan Non Formal dan Informal				30 Orang	1,100						-	30 Orang	1,100
			Rapat Koordinasi Bidang PNFI dan Mitra PNFI Se Provinsi Riau				260 Orang	874						-	260 Orang	874
			Bimbingan Teknis Tutor Dikmas dan Instruktur Kursus dan Pelatihan				150 orang	750						-	150 orang	750
			Pengadaan Alat - Alat Pembelajaran PKBM					-						-		-
			Peningkatan Kompetensi Therapis Autis		250 org	670		-						-	250 org	670
			Diklat Parenting Autis		500 orang	1,500		-						-	500 orang	1,500
			Bimbingan Teknis Pembetukan Mitra Autis		50 Orang	444		-						-	50 Orang	444
			Gebyar Autis		2000 orang	750		-						-	2000 orang	750
			Pengembangan Kemampuan Diri Anak Autis		100 org	472		-						-	100 org	472
			Pembangunan Gedung Sanggara Seni Salsabila Pekanbaru		100%	300		-						-	100%	300
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud (Yayasan Darul Amal) desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar		1 RKB	250		-						-	1 RKB	250
			Workshop Penilik dan Pamong Belajar Pendidikan Non formal dan Informal		30 Orang	220		-						-	30 Orang	220
			Workshop Pendidikan Untuk Semua (PUS)		150 Orang	750	168 orang	800						-	318 orang	1,550
			Pembinaan Sekolah dan Lembaga Berwawasan Gender				2 sekolah	900						-	2 sekolah	900
			Lomba Sekolah Berwawasan Gender				48 sekolah	900						-	48 sekolah	900
			Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pendidikan Non Formal dan Informal		1 kegiatan	1,220		-						-	1 kegiatan	1,220
			Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Pelatihan Calon Assesor		24 Orang	596		-						-	24 Orang	596
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Non Formal Provinsi Riau		1 Lembaga	750		-						-	1 Lembaga	750
			Workshop Pembelajaran Keaksaraan Fungsional bagi Kader Penggerak PKK		150 orang	500	35 orang	216						-	185 orang	716
			Sosialisasi Pendidikan Layak Bermutu Ramah Anak dan Bebas Pungutan (PANUTAN)		1 kegiatan	789	1 kegiatan	4,000						-	2 kegiatan	4,789
			Studi Banding Pendidikan Layak Bermutu Ramah Anak dan Bebas Pungutan (PANUTAN)		5 Provinsi	250		-						-	5 Provinsi	250
			Workshop Bordir Motif Melayu Riau		36 Orang	650		-						-	36 Orang	650
			Workshop Pendidikan Keorangtuaan Untuk Kelompok Dasawisma		150 orang	500		-						-	150 orang	500
			Pelatihan Administrasi UP2K PKK		60 orang	312		-						-	60 orang	312
			Pelatihan Manajemen Koperasi Bagi Kader PKK Se-Provinsi Riau		50 Orang	312		-						-	50 Orang	312

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Peningkatan Kapasitas LP3PKK (Latihan Pengelola Program dan Penyuluh PKK)		100 Orang	550		-						-	100 Orang	550
			Bantuan Honor Tutor Paket A, Paket B dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan dan PKBM		330 Orang	909	180 orang	550						-	510 orang	1,459
			Pameran Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI EXPO)				1 pameran	1,300						-	1 kali	1,300
			Akreditasi Pendidikan Non Formal		120 Orang	1,000	200 orang	2,310						-	320 orang	3,310
			Pengadaan Sarana SKB				4 Skb	1,093						-	4 SKB	1,093
			Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan		120 orang	977		-						-	120 orang	977
			Workshop Pengelola Pendidikan Masyarakat		216 Orang	977	130 orang	700						-	346 orang	1,677
			Workshop Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan		120 orang	440	120 orang	53						-	240 orang	493
			Pameran Hari Kompetensi Nasional		2 Pameran	538		-						-	2 kali	538
			Pengadaan Sarana Pelatihan PKBM		60 Lembaga	2,000		-						-	60 lembaga	2,000
			Pengadaan buku bacaan untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM)				1 TBM	793						-	1 tbm	793
			Pengadaan Sarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM)		24 TBM	1,250	12 TBM	700						-	36 TBM	1,950
			Workshop Penulisan Karya Nyata bagi PTK PNFI dan Karya Tulis		216 orang	977		-						-	216 orang	977
			Pengadaan Media Pelatihan Wira Usaha Pertanian Hidroponik untuk PKBM		12 Lembaga	1,250		-						-	12 lembaga	1,250
			Pengadaan Media Pengembangan Akhlakul Karimah Kelompok Remaja dan Majelis Taklim		8 Lembaga	500		-						-	8 lembaga	500
			Pengadaan Media Ajar Presentasi dan Sosialisasi Berbasis Digital Elektronik		1 kegiatan	1,250	1 kegiatan	1,300						-	2 kegiatan	2,550
			Workshop Pengembangan Satuan Pendidikan Responsif Gender		40 Orang	275		-						-	40 orang	275
			Persiapan Pelaksanaan PKBM Rujukan		36 Lembaga	169		-						-	36 Lembaga	169
			Sosialisasi Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga		10 kecamatan	472		-						-	10 kecamatan	472
			Kajian dan Analisis Struktur Organisasi Perangkat Daerah		2 Naskah	400		-						-	2 Naskah	400
								-						-		-
			PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA			**21,591**		**49,680**						-		**71,994**
														-		-
			Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau untuk Pelajar Tingkat SMP, SMA, SMK se Provinsi Riau		1 kegiatan	500	1 kegiatan	1,168						-	2 kegiatan	1,668
			Anugrerah Seni dan Budaya untuk Tokoh dan Pelaku Seni Budaya se Provinsi Riau				10 Orang	175						-	10 orang	175
			Peningkatan Sarana Kesenian untuk Komunitas Masyarakat Etnis Melayu dan Non Melayu											-		-
			Penerbitan Buku Cerita Rakyat dan Lagu Daerah se Provinsi Riau		1 Kegiatan	300								-	1 Kegiatan	300
			Seminar Kebudayaan Melayu		1 Kegiatan	200								-	1 Kegiatan	200
			Inventarisasi dan Pendaftaran HAKI Karya Seni Budaya se Provinsi Riau		50 Karya seni Se-Provinsi Riau	150								-	50 Karya seni Se-Provinsi Riau	150

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Inventarisasi Tokoh dan Pelaku Budaya se Provinsi Riau		120 org seniman/budaya wan	100	120 ORANG	162						-	240 orang	262
			Festival Seni Budaya KAT se Provinsi Riau		1 kali 7 KAT	1,000								-	1 kali	1,000
			Dukungan Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau		3 kali budaya di rohil, kuansing dan siak	300								-	3 kab/kota	300
			Peningkatan Sarana Kesenian untuk Komunitas Masyarakat Etnis Melayu dan Non Melayu		6 paket peralatan seni	300								-	6 paket	300
			Peningkatan sarana dan prasarana taman budaya		1 Kegiatan	1,754								-	1 Kegiatan	1,754
			Penyelenggaraan event dan kegiatan berkesenian taman budaya		10 Kegiatan berkesenian	2,520								-	10 kegiatan	2,520
			Pendaftaran, Registrasi dan Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau		2 cagar budaya	500								-	2 CB	500
			Pendaftaran, Registrasi dan Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau		2 cagar budaya	300								-	2 CB	300
			Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau		1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	693						-	2 kegiatan	993
			Pemetaan Situs Cagar Budaya		1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	453						-	2 kegiatan	753
			Pemugaran Cagar Budaya		1 Kegiatan	600	1 Kegiatan	1,514						-	2 kegiatan	2,114
			Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak		1 Kegiatan	500	1 Kegiatan	245						-	2 kegiatan	745
			Pemetaan Sejarah Lokal		1 Kegiatan	300								-	1 Kegiatan	300
			Pengelolaan Museum Sang Nila Utama		1 Kegiatan	1,147								-	1 Kegiatan	1,147
			Pengelolaan Taman Budaya		1 Kegiatan	657								-	1 Kegiatan	657
			Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama		1 Paket	615	5 Paket	925						-	6 paket	1,540
			Publikasi Museum baik media cetak maupun digital			308	4 kegiatan	545						-	4 kegiatan	852
			Pengadaan Alat-alat Rebana untuk Kab. Kampar		1 Kegiatan	250	1 Kegiatan	245						-	2 kegiatan	495
			Penerbitan dan Pengadaan Buku Sejarah Perjuangan Riau Sultan Syarif Kasim		1 Kegiatan	198								-	1 Kegiatan	198
			Penerbitan dan Pengadaan Buku Sejarah Perjuangan Riau Tuan Guru Syekh Abdurrahman (Mufti Kerajaan Indragiri)		1 Kegiatan	198								-	1 Kegiatan	198
			Penerbitan dan Pengadaan Buku Sejarah Perjuangan Riau Panglima Besar Reteh Tengku Sulung		1 Kegiatan	198								-	1 Kegiatan	198
			Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rebana di Kota Pekanbaru		1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	99						-	2 kegiatan	199
			Pendaftaran Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau				1 Kegiatan	965						-	1 Kegiatan	965
			Pendaftaran Cagar Budaya tidak Bergerak Provinsi Riau				1 Kegiatan	901						-	1 Kegiatan	901
			Registrasi Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau				1 Kegiatan	925						-	1 Kegiatan	925
			Registrasi Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau				1 Kegiatan	865						-	1 Kegiatan	865
			Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau				1 Kegiatan	810						-	1 Kegiatan	810
			Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau				1 Kegiatan	782						-	1 Kegiatan	782
			Pembuatan Profil Cagar Budaya				1 Kegiatan	468						-	1 Kegiatan	468
			Publikasi Cagar Budaya				1 Kegiatan	474						-	1 Kegiatan	474
			Konservasi Cagar Budaya Bergerak				1 Kegiatan	412						-	1 Kegiatan	412
			Penelusuran Peninggalan Naskah-Naskah Melayu				1 Kegiatan	893						-	1 Kegiatan	893
			Pembuatan Master Plan Kawasan cagar budaya				1 Kegiatan	928						-	1 Kegiatan	928
			Pembuatan DED cagar budaya				1 Kegiatan	180						-	1 Kegiatan	180
			Seminar Cagar Budaya				1 Kegiatan	926						-	1 Kegiatan	926
			Inventarisasi dan dokumentasi sejarah Provinsi Riau				1 Kegiatan	853						-	1 Kegiatan	853

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Napak Tilas Sejarah				1 Kegiatan	440						-	1 Kegiatan	440
			Lomba foto Cagar Budaya Provinsi Riau				1 Kegiatan	456						-	1 Kegiatan	456
			Pembuatan Film Dokumenter Cagar Budaya				1 Kegiatan	731						-	1 Kegiatan	731
			Ekskavasi Cagar Budaya				1 Kegiatan	664						-	1 Kegiatan	664
			Olimpiade sejarah				1 Kegiatan							-	1 Kegiatan	-
			Penerbitan dan Pengadaan Buku Sejarah Perjuangan Riau		1 Kegiatan	198								-	1 Kegiatan	198
			Promosi dan Misi Kebudayaan Provinsi Riau Dalam dan Luar Negeri		1 Kegiatan	850								-	1 Kegiatan	850
			Pengembangan Zapin Center		5 Provinsi	500								-	5 provinsi	500
			Workshop Seni di Taman Budaya		5 cabang seni	503								-	5 cabang seni	503
			Rapat Koordinasi Museum Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau		1 Kegiatan	277								-	1 Kegiatan	277
			Pengadaan Alat Kesenian/Musik Tradisional		1 paket	1,313								-	1 paket	1,313
			Pendataan dan Monitoring Sanggar dan Teater Se-Provinsi Riau		12 Kab/Kota	400								-	12 kab/kota	400
			Pendataan Benda Sejarah dan Budaya Se-Provinsi Riau		12 Kab/Kota	300								-	12 kab/kota	300
			Akuisisi Benda Sejarah Budaya Se-Provinsi Riau		1 Paket	875								-	1 paket	875
			Pembuatan Patung Berpakaian Adat Melayu Riau di Taman Budaya		1 Kegiatan	200								-	1 Kegiatan	200
			Bentang Seni dan Gelar Musik Tradisi Anak-anak Se-Provinsi Riau		1000/anak	2,000								-	1000 orang	2,000
			Kampanye Permuseuman		1 Kegiatan	200	1 Kegiatan	582						-	2 kegiatan	782
			Pameran Museum Se-Sumatera dan Se-Indonesia		1 Kegiatan	381								-	1 kegiatan	381
			Survei data Koleksi											-		-
			Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SMP se Provinsi Riau				1 Kegiatan	176						-	1 Kegiatan	176
			Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum				1 Kegiatan	105						-	1 Kegiatan	105
			Pengadaan Koleksi Museum				1 Kegiatan	463						-	1 Kegiatan	463
			Penyempurnaan Tata Pamer				1 Kegiatan	157						-	1 Kegiatan	157
			Pendalaman Nilai-nilai Budaya melalui Koleksi Museum				2 Kegiatan	645						-	2 Kegiatan	645
			Pembuatan Vitrin dan Lighting Museum											-		-
			Pembuatan Katalog, Brosur, Kalender, Buku Panduan Museum				1 Kegiatan	413						-	1 Kegiatan	413
			Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama				1 Paket	430						-	1 Paket	430
			Pameran Museum Se-Sumatera dan Se- Indonesia				6 Kegiatan	685						-	6 Kegiatan	685
			Pemilihan Duta Museum se- Provinsi Riau dan Nasional				1 Kegiatan	345						-	1 Kegiatan	345
			Pengembangan Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi Kebudayaan se Provinsi Riau											-		-
			Penyusunan Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu untuk SD, SMP dan SMA di Provinsi Riau											-		-
			Sosialisasi Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Etnis Non Melayu se Provinsi Riau				165 orang	853						-	165 orang	853
			Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Provinsi Riau											-		-
			Inventarisasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Provinsi Riau				7 KAT	114						-	7 KAT	114

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Penyediaan Peralatan Kesenian untuk KAT se Provinsi Riau											-		-
			Pembangunan Balai Pertemuan untuk KAT se- Provinsi Riau											-		-
			Pengadaan Meubeler dan Peralatan Pendukung Penunjang Operasional Balai Pertemuan KAT se Provinsi Riau											-		-
			Pendokumentasian Upacara-upacara Adat Melayu dan Non Melayu se Provinsi Riau											-		-
														-		-
			Sosialisasi Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk SD, SMP, SMA dan Guru se Provinsi Riau											-		-
			Pendokumentasian dan Publikasi Sastra Tradisi Lisan se Provinsi Riau											-		-
			Pendokumentasian seni budaya KAT se Provinsi Riau											-		-
			Penyediaan dan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Kebudayaan se Provinsi Riau											-		-
			Penyelenggaraan Festival Permainan Rakyat se Provinsi Riau											-		-
			Workshop Peningkatan Kapasitas Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau untuk SD, SMP, SMA dan SMK se Provinsi Riau											-		-
			Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pamong Budaya se Provinsi Riau											-		-
			Pemberian Insentif bagi Tokoh dan Pelaku Budaya se Provinsi Riau											-		-
			Anugerah Budaya Provinsi Riau											-		-
			Pembinaan Cabang Lomba Seni pada FLS2N untuk SD, SMP,SMA dan SMK se Provinsi Riau											-		-
			Penyusunan Peta Bahasa Melayu Riau											-		-
			Penyusunan Peta Budaya Melayu Riau											-		-
			Inventarisasi Komunitas/Kelompok/Sanggar/Group Budaya Melayu se Provinsi Riau				12 kab/kota	150						-	12 kab/kota	150
			Lomba Karya Ilmiah Tingkat SLTA				1 Kegiatan	200						-	1 Kegiatan	200
			Dialog Interaktif melalui media elektronik											-		-
			Dialog Budaya di Televisi dan Radio											-		-
			Pemetaan sejarah lokal				1 kegiatan	903						-	1 Kegiatan	903
			Penulisan sejarah lokal				1 kegiatan	410						-	1 Kegiatan	410
			Penerbitaan Buku Sejarah Lokal				1 kegiatan	456						-	1 Kegiatan	456
			Kajian Permuseuman Museum				1 kegiatan	459						-	1 Kegiatan	459
			Peningkatan SDM Juru Pelihara Situs Cagar Budaya				1 kegiatan	989						-	1 Kegiatan	989
			Studi Kelayakan Penetapan Cagar Budaya Untuk Provinsi dan Nasional				1 kegiatan	601						-	1 Kegiatan	601
			Studi Teknis Pemugaran Cagar Budaya				1 kegiatan	678						-	1 Kegiatan	678
			Promosi Cagar Budaya Riau				1 kegiatan	672						-	1 Kegiatan	672
			Misi Kebudayaan Melayu Dalam dan Luar Negeri											-		-
			Kajian Budaya di Provinsi Riau											-		-

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Publikasi dan Dokumentasi Taman Budaya				1 kegiatan	410						-	1 Kegiatan	410
			Festival Lancang Kuning Taman Budaya				3 Kegiatan	2,101						-	3 kegiatan	2,101
			Pembuatan Master Plan Taman Budaya											-		-
			Workshop Penulisan Skenario Film				1 Kegiatan Berkesenian	131						-	1 Kegiatan	131
			Pergelaran dan Antologi Sastra Daerah dan Nusantara				1 kegiatan	207						-	1 Kegiatan	207
			Workshop Pembuatan Film Dokumenter				1 kegiatan berkesenian	243						-	1 Kegiatan	243
			Gita Bahana Nusantara				1 kegiatan	157						-	1 Kegiatan	157
			Parade Tari				1 kegiatan	317						-	1 Kegiatan	317
			Festival Lagu Melayu				1 kegiatan	275						-	1 Kegiatan	275
			Festival Seni Islami				1 kegiatan	379						-	1 Kegiatan	379
			Festival Teater				1 kegiatan	283						-	1 Kegiatan	283
			Parade Lagu Daerah dan Nusantara				1 kegiatan	266						-	1 Kegiatan	266
			Temu Budaya Nasional				4 cabang seni	580						-	4 cabang	580
			Pameran dan Pergelaran se-Sumatera				1 kegiatan	475						-	1 Kegiatan	475
			Pameran Seni Rupa				1 Kegiatan Berkesenian	210						-	1 Kegiatan	210
			Pasar Seni Taman Budaya				15 kali	1,022						-	15 kali	1,022
			Hari Seni Taman Budaya				1 kegiatan	877						-	1 Kegiatan	877
			Promosi Seni dan Budaya Melayu Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	574						-	1 Kegiatan	574
			Workshop Seni Peran				1 Kegiatan Berkesenian	246						-	1 Kegiatan	246
			Workshop Seni Rupa				1 Kegiatan Berkesenian	163						-	1 Kegiatan	163
			Pelatihan Alat Musik Tradisional di Kalangan Pelajar				1 kegiatan	222						-	1 Kegiatan	222
			Aubade				1 kegiatan	139						-	1 Kegiatan	139
			Pelatihan Pemandu Museum Daerah				15 orang	131						-	15 orang	131
			Pengembangan Pusat Informasi Kebudayaan Melayu											-		-
			Pengembangan Zapin Center											-		-
			Partisipasi Penyelenggaraan Even Budaya Se- Provinsi Riau dan Luar Provinsi Riau											-		-
			Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau Untuk Masyarakat Se- Provinsi Riau				1 kegiatan	773						-	1 Kegiatan	773
			Pembelian Hak Cipta Karya Budaya Melayu											-		-
			Penyediaan Perangkat dan Pengelolaan Sistem Informasi Cagar Budaya Provinsi Riau				1 kegiatan	946						-	1 Kegiatan	946
			Pemagaran Zona Inti Situs Cagar Budaya (Candi Muara Takus)				1 kegiatan	4,921						-	1 Kegiatan	4,921
			Pergelaran Budaya Provinsi Riau Pada Hari Nusantara				1 kegiatan	448						-	1 Kegiatan	448
			Peningkatan Pelestarian Produk Budaya Melayu Provinsi Riau				3 kegiatan	2,500						-	3 kegiatan	2,500
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Lighting Taman Budaya Provinsi Riau				1 kegiatan	800						-	1 Kegiatan	800
			Pembuatan Album Instrumen Lagu Melayu Riau				500 keping CD	190						-	500 buah cd	190

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2015 (perubahan)		2016 (perubahan)		2017 (perubahan)		2018 (perubahan)		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
			Pengadaan Koleksi Perpustakaan untuk Ruang Perpustakaan Museum Daerah Provinsi Riau				500 eksemplar	160						-	500 explr	160
			Peningkatan Mutu Ruang Perpustakaan Museum Daerah Provinsi Riau				1 ruang	150						-	1 ruang	150
														-		-
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur											-		-
			Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit Guru Se- Provinsi Riau				170 guru	340						-	170 guru	340
			Program Penataan Kelembagaan											-		-
			Penyusunan Analisa Jabatan Organisasi Perangkat Daerah				100 Pns	211						-	100 orang	211
			Program Penataan tatalaksana											-		-
			Kajian dan Analisis Struktur Organisasi Perangkat Daerah				2 Naskah	173						-	2 naskah	173
														-		-
														-		-

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

RUDYANTO, SH, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19680312 199403 1 004

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan visi dan misi Dinas Pendidikan, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2014-2019 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

7.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan strategis Dinas Pendidikan tahun 2014-2019 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan serta sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan pendidikan yang andal sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi Dinas Pendidikan dengan memperhatikan rumusan misi. Dengan demikian, tujuan strategis Dinas Pendidikan 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Menengah
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan
3. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang Bermutu dan berdaya saing
4. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan pelayanan Pendidikan Tinggi

7.3 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Riau (2014-2019)

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikandiperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2017. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis (t1) Peningkatan ketersediaan Layanan Pendidikan Menengah yang bermutu dan berdaya saing dengan sasaran :

1) Terselenggaranya Pelayanan Pendidikan Menengah Universal

2) Meningkatnya Mutu dan kesesuaian Layanan Pendidikan menengah.

3) Meningkatnya tata kelola manajemen layanan pendidikan menengah.

4) Meningkatnya prestasi minat dan bakat pendidikan menengah di tingkat nasional. Adapun Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai berikuit:

(1) APK SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C mencapai 93,41%

(2) APM SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C mencapai 70,43%

(3) APS SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C (16-18 Tahun) mencapai 75,57%

(4) Rasio Siswa terhadap Guru SMA/MA/SMK mencapai 1:21

(5) Rasio Siswa terhadap Kelas SMA/MA/SMK 1:32

(6) Rasio Guru Terhadap Kelas SMA/MA/SMK 1:1

(7) SMA/MA/SMK yang menerapkan kurikulum 2013 mencapai 75%

(8) SMA/MA/SMK yang berakreditasi mencapai 95%

(9) SMA/MA/SMK yang memenuhi SPM mencapai 90%

(10) Guru SMA/MA/SMK dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S1/D4 mencapai 95%

2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis (t2) Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan sasaran :

1. Meningkatnya Jumlah Sekolah yang Terakreditasi

2. Meningkatnya Jumlah Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan yang meliliki Sertifikasi Kompetensi

3. Meningkatnya Angka Kelulusan Siswa SMA/SMK/MA/SMLB/ Paket C

3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis Peningkatan ketersediaan dan keterjangkuan Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang Bermutu dan Berdaya Saing dengan sasaran :

1) Terpenuhinya pendidikan khusus dan layanan khusus

2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan khusus dan layanan khusus

3) meningkatnya tata kelola pendidikankhusus dan layanan khusus

4) terpenuhinya layanan pendidikan di daerah marjinal

5) meningkatnya prestasi minat dan bakat pendidikan bagipendidikan khusus dan layanan khusus. Adapun Indikator sasaran/ kinerja adalah:

(1) APK SD/MI/SDLB/Paket A mencapai 116,80%

(2) APM SD/MI/SDLB/Paket A mencapai 96,37%

(3) APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B mencapai 109,10%

(4) APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B mencapai 97,50%

(5) APKSMA/MA/SMK/SMLB/Paket C mencapai 82,44%

(6) APM SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C mencapai 73,26%

(7) Jumlah PTK Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang mengukuti Diklat Kompetensi mencapai 60%

(8) Jumlah Layanan terhadap anak Autis

4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis (t4) Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan pelayanan Pendidikan Tinggi dengan sasaran :

1. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan perguruan tinggi bermutu yang merata

7.4 Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan guru dan dosen sebagai profesi. Guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4 danbersertifikat pendidik, sedangkan dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-2/S-3 dan bersertifikat pendidik. Pemerintah harus menyelesaikan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik selambat-lambatnya pada akhir tahun 2014. Selain itu, langkah inidilakukan untuk memastikan regenerasi guru yang berkompeten mengingat dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperkirakan sekitar 700 ribu guru akan pensiun. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2014-2019 Dinas Pendidikan akan mempertahankan kebijakan yang telah dilakukan dan menindak lanjuti kebijakan-

kebijakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guruyang telah dilaksanakan oleh Kemendikbud, kebijakan-kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Menindaklanjuti kebijakan pengembangan sistem rekrutmen guru dengan pemberian beasiswa ikatan dinas pandubakat;

b. peningkatan sistem rekrutmen guru berkualifikasi S-1/D-4 yang berkompeten;

c. pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi S-1/D-4 dan peningkatan kualifikasi guru dan dosen menjadi S-2/S-3;

d. memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi pendidik antara lain melalui Uji Kompetensi Awal (UKA) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan; dan

e. peningkatan peran perguruan tinggi dalam pembinaan profesionalisme guru berkelanjutan melalui kegiatan KKG/MGMP.

7.5 Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Lulusannya

Peningkatan kualitas dan kompetensi guru bergantung pada kualitas lembaga penyedia tenaga pendidik. Penerapan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan ketersediaan LPTK sebagai lembaga yang bertugas menghasilkan calon tenaga kependidikan dan menyelenggarakan sertifikasi pendidik. Untuk menjamin ketersediaan guru yang berkompeten diperlukan peningkatan mutu LPTK. Sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi, peningkatan mutu LPTK dilakukan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut:

a. penyediaan pembiayaan bagi peningkatan kompetensi dosen LPTK

b. fasilitasi perizinan dan akreditasi program studi di LPTK;

c. fasilitasi penertiban LPTK yang tidak berizin dan/atau tidak berakreditasi; dan

d. peningkatan sarana dan prasarana LPTK.

7.6 Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Selain tenaga pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Permasalahan

yang dihadapi kepala sekolah adalah lemahnya kompetensi manajerial, sedangkan yang dihadapi pengawas sekolah adalah lemahnya kompetensi kepengawasan.

Secara khusus, kepala sekolah dasar menghadapi permasalahan tingginya beban kerja karena tidak mempunyai tenaga administrasi sekolah. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut:

a. memberikan beasiswa S-1 dan S-2 bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah;
b. menyelenggarakan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah;
c. merevitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS; dan
d. mendorong pemerintah daerah kab/kota untuk menyediakan tenaga administrasi sekolah di setiap sekolah dasar.

7.7 Penerapan Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa

Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalah gunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiatisme, serta menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain sebagai berikut:

a. menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban alam penyelenggaraan pendidikan;
b. mengembangkan kurikulum pendidikan (kurikulum muatan lokal 2013) yang memberikan muatan *soft skills* akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;
c. menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli pembelajaran aktif di lapangan;
d. memperkuat pendidikan kepanduan/kepramukaan dan keolahragaan; dan

e. menilai prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak muliadan karakter berbangsa dan bernegara.

7.8 Pengembangan Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif,Inovatif, Sportif dan Wirausaha

Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) tahun 2010—2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dirumuskan kebijakan pengintegrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:

a. melakukan kajian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan peserta didik sedini mungkin;

b. meningkatkan kualitas pendidikan yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada peserta didik sedini mungkin;

c. menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara pendidikan

d. menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif; mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian diinstitusi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan

e. memfasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri.

7.9 Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan

Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan sistem evaluasi yang terpercaya. Salah satu indikatornya adalah belum terpadunya hasil ujian nasional pendidikan menengah, sehingga hasil ujian

nasional tersebut belum digunakan untuk masuk perguruantinggi. Hal tersebut diantaranya diakibatkan oleh belum sempurnanya pelaksanaan ujian nasional. Selain itu, substansi ujian nasional pun belum mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang sebenarnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut:

a. penyempurnaan sistem pengujian dan penilaian pendidikan termasuk penjaminan keterpaduan pengujian dan penilaian pendidikan antar jenjang pendidikan;

b. penguatan sistem akreditasi satuan/program pendidikan; dan

c. penguatan sistem sertifikasi kompetensi lulusan.

7.10 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai denganStandar Nasional Pendidikan

Pembangunan sarana dan prasarana secara besar-besaran merupakan terobosan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna meningkatkan akses pendidikan. Prasarana yang dibangun pemerintah diantaranya unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), perpustakaan, dan laboratorium. Pembangunan sarana dan prasarana fisikterutama difokuskan pada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Sejalan dengan logika itu, lokasi pembangunan USB cenderung dikonsentrasikan di daerah-daerah pemekaran, pedesaan, terpencil, terisolir, pariwisata dan daerah yang termasuk kantong kemiskinan. Dari beberapa penjelasan tersebut, kebijakan yang dilakukan adalah melalui:

a. penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak sedang dan berat

b. pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan *workshop*;

c. pembangunan ruang kelas baru, unit sekolah baru dan revitalisasi

7.11 Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan

Dalam rangka menghadapi tuntutan global, penguasaan dan pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan. Namun, masih ada kesenjangan literasi TIK antar wilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat. Di samping itu juga akan memberikan peluang munculnya plagiatisme dan pelanggaran HAKI sehingga diperlukan integrasi penggunaan TIK dalam pembelajaran. Padatahun 2010—2014, penguatan pemanfaatan TIK untuk *e*-pembelajaran, *e*-manajemen dan *e*-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut.

a. penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untukpenguatan dan perluasan e-pembelajaran pada semua jenjang pendidikan
b. pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan publik.
c. pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik
d. pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK pada pendidikan dasar dan menengah; dan
e. peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK diKab/kota;
f. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidik (PTK);
g. pendampingan kurikulum 2013 dan peningkatan kualifikasi PTK.

7.12 Koordinasi Antar, Dinas Kab/Kota dan/atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Kondisi saat ini masih terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan antar bidang maupun antar pusat dan daerah serta kurang terintegrasinya penetapan prioritas serta target kinerja pendidikan di pusat dan di daerah. Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten danKota, telah diatur pembagian urusan antara Kemdikbud, Dinas Pendidikan Provinsi serta Dinas

Pendidikan Kabupaten dan Kota, dalam pengelolaan pendidikan. Koordinasi antar Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Kemendikbud dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan sebagai berikut:

a. peningkatan koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi dan antar Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta Kemendikbud untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan; dan

b. peningkatan koordinasi antara Kemdikbud dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta satuan pendidikan untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan.

7.12 Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Perbatasan/Terdepan, Tertinggal, Terpencil (3T) dan Rawan Bencana

Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal termasuk daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah tersebut. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan untuk semua, mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada di NKRI ini. Pembangunan pendidikan didaerah perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:

a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah perbatasan, tertinggal dan rawan bencana;

b. pembangunan sekolah terpadu di Kabupaten/Kota

c. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap,SD-SMP satu atap, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

7.13 Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Hasil penyelarasan pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah,

kompetensi dan lokasi. Dinas Pendidikan Provinsi Riau harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standardisasi penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut.

a. menyelaraskan rencana pengembangan layanan pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
b. menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri;
c. mengembangkan sinergitas antar Kementrian/ lembaga/ dinas yang terkait dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;
d. membangun lembaga pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai *cluster* industri; dan
e. meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri dan menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pendidikan							
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
	a. SD/MI (Sekolah/Penduduk 7 - 12 Tahun)	204.00	223.00	224.00	225.00	226.00	227.00	227.00
	b. SMP/MTS (Sekolah/Penduduk 13 - 15 Tahun)	238.00	228.00	229.00	230.00	231.00	232.00	232.00
	c. SMA/SMK/MA(Sekolah/Penduduk 16 - 18 Tahun)	44.74	44.59	42.44	41.62	39.92	38.80	38.80
2	Rasio murid terhadap Guru							
	a. SD/MI (Murid/Guru)	16.00	15.00	14.40	13.97	13.58	12.83	12.83
	b. SMP/MTS (Murid/Guru)	14.00	11.00	15.01	15.38	15.72	16.57	16.57
	c. SMA/SMK/MA (Murid/Guru)	14.00	12.00	14.16	14.16	14.15	14.44	14.44
3	Rasio murid Terhadap kelas							
	a. SD/MI (Jumlah Murid/Kelas)	22.00	24.00	22.67	22.17	21.67	21.17	21.17
	b. SMP/MTS (Jumlah Murid/Kelas)	28.00	28.00	26.67	25.67	24.44	23.52	23.52
	c. SMA/SMK/MA (Jumlah Murid/Kelas)	28.00	30.00	29.33	29.33	29.33	29.80	29.80
4	Rasio guru Terhadap kelas							
	a. SD/MI (Jumlah Guru/Kelas)	0.72	0.60	0.65	0.67	0.68	0.70	0.70
	b. SMP/MTS (Jumlah Guru/Kelas)	0.49	0.41	0.43	0.45	0.47	0.49	0.49
	c. SMA/SMK/MA (Jumlah Guru/Kelas)	0.50	0.39	0.40	0.45	0.50	0.54	0.54
5	Tingkat kelulusan menurut jenjang pendidikan (%)							
	a. SD	99.84	99.84	99.94	99.95	99.96	99.97	99.97
	b. SLTP	99.29	99.19	99.42	99.53	99.64	99.76	99.76
	C. SLTA	98.25	98.92	98.45	98.87	99.25	99.45	99.45
6	Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	na	na	na	50.00	150.00	300.00	300.00

BAB VII

P E N U T U P

Sejalan dengan semangat reformasi dan amanat perjuangan yang terkandung dalam Undang-Undang, Intruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Depdiknas yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggung jawabannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, maka salah satu kegiatan yang harus dilakukan untuk itu adalah penyusunan rencana strategis (*strategic planning*) instansi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2014 - 2019.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2014 - 2019 ini merupakan acuan dan panduan dalam melaksanakan dan mengembangkan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh seluruh jajaran di lingkungan Disdik. Tahun 2014-2019. Dinas Pendidikan merencanakan 8 (Delapan) program yang merupakan penjabaran empat issu strategis bidang pendidikan yaitu: 1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan bermutu; 2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; 3) penguatan tata kelola Oleh karena itu, rencana strategis ini akan ditindak lanjuti melalui rencana kerja tahunan (RKT) Dinas Pendidikan sampai Tahun 2019 mendatang.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Untuk memperoleh komitmen yang tinggi, pemahaman bersama (*shared vision*) akan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai Disdik pada kurun waktu 2014-2019 sangat diperlukan. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut, secara berjenjang menurut hirarki struktur organisasi Disdik, rencana strategis ini perlu disosialisasikan dan diseminasikan dengan baik sampai ke jenjang yang paling bawah sekalipun.

Terakhir, mudah–mudahan rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat menjadi acuan dalam implementasinya. Rencana strategis ini akan berubah bila diperlukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi sosial, ekonomi

dan politik, yang mungkin terjadi baik dalam skala Provinsi, Nasional maupun Internasional.